

PERENCANAAN WILAYAH DAN PERKOTAAN



**Gito Sugiyanto, Ramses Victor Elim, Nevi Kurniawati, Yunus Arifien,
Suharno, Retna Kristiana, Fathan Mubina Dewadi, Lisa Astria Milasari,
Fauziah Lestari Akri, Syafri, Nunik Hasriyanti**

ISBN 978-623-198-199-8



PERENCANAAN WILAYAH DAN PERKOTAAN

**Gito Sugiyanto
Ramses Victor Elim
Nevi Kurniawati
Yunus Arifien
Suharno
Retna Kristiana
Fathan Mubina Dewadi
Lisa Astria Milasari
Fauziah Lestari Akri
Syafri
Nunik Hasriyanti**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

PERENCANAAN WILAYAH DAN PERKOTAAN

Penulis :

Gito Sugiyanto
Ramses Victor Elim
Nevi Kurniawati
Yunus Arifien
Suharno
Retna Kristiana
Fathan Mubina Dewadi
Lisa Astria Milasari
Fauziah Lestari Akri
Syafri
Nunik Hasriyanti

ISBN : 978-623-198-199-8

Editor : Ari Yanto. M.Pd.

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id

Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, April 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Perencanaan Wilayah Dan Perkotaan ini.

Buku Ini Membahas Pengertian perencanaan, Pengertian kota dan sejarah perkembangannya, Defenisi dasar perencanaan wilayah dan kota, Faktor faktor perencanaan wilayah, Permasalahan Perencanaan Wilayah, Alasan perencanaan wilayah dan kota diperlukan, Kebutuhan perencanaan, Pendekatan dalam perencanaan wilayah, Lingkup perencanaan wilayah dan kota, Proses perencanaan kota, Manfaat dalam perencanaan wilayah dan kota.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENGERTIAN PERENCANAAN.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Pengertian Perencanaan	1
1.2.1 Menurut Suddendorf dan Corballis (2007).....	2
1.2.2 Menurut Eric Damian Kelly dan Barbara Becker (2000).....	2
1.2.3 Menurut Taufiqurokhman (2008).....	2
1.2.4 Menurut Dian Wijayanto (2012)	2
1.2.5 Menurut Irham Fahmi (2012).....	3
1.2.6 Menurut Ulber Silalahi (2011).....	3
1.2.7 Menurut Montana dan Charnov (2000)	3
1.2.8 Menurut Wikipedia.....	4
1.3 Jenis-Jenis Perencanaan.....	6
1.4 Perencanaan Kota atau Perencanaan Wilayah.....	6
DAFTAR PUSTAKA	9
BAB 2 PENGERTIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN KOTA.....	13
2.1 Pendahuluan.....	13
2.2 Pengertian Kota	14
2.2.1 Pengertian Kota	14
2.2.2 Pengertian Kota sebagai Urban	17
2.3 Sejarah Perkotaan	19
DAFTAR PUSTAKA	23
BAB 3 DEFINISI DASAR PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	25
3.1 Konsep Dasar Perencanaan.....	25
3.2 Definisi Perencanaan Kota	27
3.3 Definisi Perencanaan Wilayah	31

3.4 Definisi Perencanaan Wilayah dan Kota	33
3.5 Perbedaan Wilayah dan Kota	34
DAFTAR PUSTAKA	36
BAB 4 FAKTOR-FAKTOR PERENCANAAN WILAYAH	37
4.1 Pendahuluan.....	37
4.2 Faktor Perencanaan	41
4.3 Penutup	49
DAFTAR PUSTAKA	51
BAB 5 PERMASALAHAN PERENCANAAN WILAYAH.....	53
5.1 Peningkatan Jumlah Penduduk, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan	53
5.2 Kesenjangan Tata Ruang Antar Wilayah.....	54
5.3 Ancaman Bencana Alam	57
5.4 Krisis Pangan, Energi, Air	57
5.5 Perubahan Iklim.....	58
5.6 Kerusakan Ekologis.....	58
5.7 Indonesia Belum Memiliki Perencanaan Yang Terintegrasi.....	59
5.8 Ketegasan Dalam Menjalankan Aturan Masih Lemah	59
5.9 Pemerintah Kurang Memiliki Kemampuan Untuk Mengantisipasi Masalah Di Masa Depan	60
5.10 Belum Semua Wilayah Indonesia Memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Yang Sesuai Dengan RTRW Nasional.....	60
DAFTAR PUSTAKA	67
BAB 6 ALASAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA DIPERLUKAN	69
6.1 Pendahuluan.....	69
6.2 Pembangunan berorientasi transit (TOD)	69
6.3 Desain Perkotaan Ramah Lingkungan	70
6.4 Ergonomi Perkotaan.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
BAB 7 KEBUTUHAN PERENCANAAN	75

7.1 Pendahuluan.....	75
7.2 Konsep Perancangan Kota.....	76
7.3 Tata Ruang Kota	78
7.4 Soal-Soal Latihan.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
BAB 8 PENDEKATAN DALAM PERENCANAAN	
WILAYAH.....	87
8.1 Lingkup Perencanaan Wilayah.....	87
8.2 Perencanaan Wilayah.....	89
8.3 Peranan dan Fungsi Perencanaan Wilayah.....	91
8.4 Pendekatan dalam Perencanaan Wilayah.....	93
DAFTAR PUSTAKA	97
BAB 9 LINGKUP PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA. 99	
9.1 Pengenalan Lingkup Perencanaan Wilayah, Teori Perencanaan, Wilayah dan Kota	99
9.1.1 Perencanaan Wilayah.....	99
9.1.2 Teori Perencanaan.....	100
9.1.3 Wilayah dan Kota.....	102
9.2 Penerapan Teori dan Tipologi Perencanaan Wilayah dan Kota	102
9.2.1 Penerapan Teori Perencanaan Wilayah.....	102
9.2.2 Tipologi Perencanaan.....	103
9.3 Tujuan Perencanaan Wilayah.....	104
9.4 Jenis- Jenis Perencanaan.....	104
9.5 Contoh Presedent (Studi Kasus).....	107
DAFTAR PUSTAKA	110
BAB 10 PROSES PERENCANAAN KOTA.....	111
10.1 Umum.....	111
10.2 Pengertian Kota	112
10.3 Permasalahan Kota.....	112
10.4 Teori-Teori Kota.....	115
10.5 Integrasi Kawasan Pertumbuhan Suatu Kota	118
10.6 Tahapan dalam Perencanaan Kota.....	119

10.7 Membangun <i>Smart City</i>	123
10.8 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	125
10.9 Penutup	126
DAFTAR PUSTAKA	128
BAB 11 MANFAAT DALAM PERENCANAAN	
WILAYAH DAN KOTA	129
11.1 Pendahuluan.....	129
11.2 Tujuan Perencanaan Wilayah dan Kota	129
11.2.1 Sifat Perencanaan Wilayah dan Kota	130
11.2.2 Tujuan Perencanaan Wilayah dan Kota	132
11.3 Manfaat Perencanaan Wilayah dan Kota	133
DAFTAR PUSTAKA	136
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 7.1. Desain Ibukota NKRI	75
Gambar 7.2. Kota Terbaik di Dunia	76
Gambar 7.3. Konsep Perancangan Kota	77
Gambar 9.1. Idealized Planning Model.....	101
Gambar 9.2. Potensi Wisata Gunung Galunggung	107

BAB 1

PENGERTIAN PERENCANAAN

Oleh Gito Sugiyanto

1.1 Pendahuluan

Perencanaan merupakan cara berpikir dalam memahami persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, yang utama adalah tentang masa depan dan berkembang menjadi hubungan antara tujuan dan keputusan yang diambil secara kolektif dalam mengusahakan kebijakan dan program. Di dalam perencanaan diharapkan apa yang diinginkan dapat terjadi dan terwujud di kemudian hari sesuai dengan apa yang dipikirkan. Pemikiran yang baik akan membawa kepada masa depan yang sukses apabila kita memang dengan serius memikirkannya dan memberikan keputusan yang tepat. Salah satu bentuk perencanaan adalah perencanaan wilayah dan perkotaan yang akan dibahas dalam buku ini. Pada bab pertama dibahas pengertian perencanaan dan jenis-jenis perencanaan.

1.2 Pengertian Perencanaan

Berikut ini diuraikan definisi perencanaan berdasarkan beberapa referensi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Perencanaan adalah properti mendasar dari perilaku cerdas (*intelligent behavior*). Hal ini melibatkan penggunaan logika dan imajinasi untuk memvisualisasikan tidak hanya hasil akhir yang diinginkan, tetapi juga langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut. Aspek penting dari perencanaan adalah hubungannya dengan peramalan. Peramalan bertujuan untuk memprediksi seperti apa masa depan, sementara perencanaan membayangkan seperti apa masa depan.

1.2.1 Menurut Suddendorf dan Corballis (2007)

Perencanaan adalah proses berpikir mengenai kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Perencanaan didasarkan pada pandangan ke depan, kapasitas fundamental untuk perjalanan waktu. Evolusi pemikiran ke depan, kemampuan untuk berpikir ke depan, dianggap sebagai penggerak utama dalam evolusi manusia (Suddendorf dan Corballis, 2007).

“Planning is the process of thinking regarding the activities required to achieve a desired goal. Planning is based on foresight, the fundamental capacity for mental time travel. The evolution of forethought, the capacity to think ahead, is considered to have been a prime mover in human evolution” (Suddendorf and Corballis, 2007).

1.2.2 Menurut Eric Damian Kelly dan Barbara Becker (2000)

“Perencanaan merupakan sebuah cara rasional dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik” (Kelly dan Becker, 2000).

1.2.3 Menurut Taufiqurokhman (2008)

“Perencanaan adalah bentuk kegiatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan serta dianggap perlu untuk mencapai hasil terbaik” (Taufiqurokhman, 2008).

1.2.4 Menurut Dian Wijayanto (2012)

Wijayanto (2012) mendefinisikan perencanaan (*planning*) sebagai proses penetapan tujuan dan pemilihan cara untuk merealisasikan tujuan tersebut. Setiap organisasi tidak dapat lepas dari proses perencanaan.

1.2.5 Menurut Irham Fahmi (2012)

Menurut Fahmi (2012) perencanaan merupakan dasar pijakan dari langkah-langkah selanjutnya. Sebuah perencanaan yang baik telah menempatkan perusahaan tersebut tahan terhadap berbagai kondisi hantaman resesi ekonomi manapun.

1.2.6 Menurut Ulber Silalahi (2011)

Silalahi (2011) mendefinisikan perencanaan sebagai fungsi yang sangat mendasar dari setiap manajer organisasi, baik bisnis maupun publik, besar maupun kecil. Untuk menjadi efektif, manajer harus mengetahui apa yang akan dicapai dan bagaimana cara untuk mencapainya.

1.2.7 Menurut Montana dan Charnov (2000)

Perencanaan merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai tujuan dan juga dalam jangka waktu tertentu. Sehingga, dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisis seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya (<https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-perencanaan/>).

Selanjutnya Montana dan Charnov (2000) menyatakan bahwa garis besar proses perencanaan berorientasi pada hasil tiga langkah sebagai berikut:

- a. Memilih tujuan.
- b. Mengevaluasi jalur alternatif.

- c. Memutuskan arah spesifik dari rencana.

1.2.8 Menurut Wikipedia

Dalam sebuah organisasi, perencanaan dapat menjadi proses manajemen, berkaitan dengan penentuan tujuan arah masa depan dan penentuan misi dan sumber daya untuk mencapai target tersebut. Untuk memenuhi tujuan, manajer dapat mengembangkan rencana seperti rencana bisnis atau rencana pemasaran. Perencanaan selalu memiliki tujuan. Tujuannya melibatkan pencapaian tujuan atau target tertentu seperti: penggunaan sumber daya yang efisien, mengurangi risiko, memperluas organisasi dan asetnya, dll.

“Planning according to established principles is a core part of many professional occupations, particularly in fields such as management and business. Once a plan has been developed it is possible to measure and assess progress, efficiency and effectiveness. As circumstances change, plans may need to be modified or even abandoned (<https://en.wikipedia.org/wiki/Planning>).”

Perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang paling penting. Di dalam perencanaan terdapat kegiatan dalam menjelaskan tujuan organisasi, membuat strategi, dan juga mengembangkan rencana kerja organisasi. Perencanaan merupakan suatu tahap awal dalam aktivitas suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi (<https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-perencanaan/>).

Kebijakan publik merupakan upaya untuk mengatasi masalah sosial melalui pembuatan kebijakan (Yalmanov, 2021). Suatu kebijakan dibuat dengan tujuan untuk mengatasi masalah sosial yang telah diprioritaskan (Knoepfel *et al.*, 2011). Perencanaan kebijakan publik meliputi perencanaan lingkungan, penggunaan lahan, regional, perkotaan, dan tata ruang. Di banyak negara, pengoperasian sistem perencanaan kota dan pedesaan sering disebut sebagai perencanaan dan profesional yang mengoperasikan sistem tersebut dikenal sebagai perencana.

Perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan antisipatif yang membantu mengatasi kompleksitas. Proses yang melibatkan pembuatan dan evaluasi setiap rangkaian keputusan yang saling terkait. Kinerja yang direncanakan akan membawa hasil yang lebih baik. Perencanaan dan penetapan tujuan adalah sifat penting dari sebuah organisasi. Perencanaan meliputi rencana, proses berpikir, tindakan, dan implementasi. Perencanaan adalah memutuskan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang harus melakukannya. Fungsi perencanaan melibatkan penetapan tujuan dan mengaturnya dalam urutan logis. Sebuah organisasi yang merencanakan dengan baik mencapai tujuan lebih cepat daripada organisasi yang tidak merencanakan sebelum implementasi. Kritik terhadap sisi gelap perencanaan telah menjadi tema perspektif modern dan *post-modern* (Allmendinger dan Gunder, 2016). Perencanaan didorong oleh keinginan untuk mencari performativitas dan efisiensi kelembagaan (Gunder, 2003). Salah satu bentuk kebijakan perencanaan yaitu berkaitan dengan perencanaan kota dan wilayah dalam pembentukan ruang kota (Yiftachel, 2006).

1.3 Jenis-Jenis Perencanaan

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, terdapat beberapa jenis perencanaan seperti yang diuraikan sebagai berikut (<https://www.gramedia.com/literasi/perencanaan/>):

1. Perencanaan strategis
2. Perencanaan taktis
3. Perencanaan operasional
4. Perencanaan proyek
5. Perencanaan keuangan
6. Perencanaan sumber daya manusia.

Selain keenam bentuk perencanaan tersebut, masih ada bentuk perencanaan yang lainnya, salah satunya yaitu perencanaan kota atau perencanaan wilayah. Perencanaan kota adalah proses teknis dan politik yang difokuskan pada pengembangan dan desain tata guna lahan dan lingkungan binaan, termasuk udara, air, dan infrastruktur yang masuk ke/dan perkotaan, seperti transportasi, komunikasi, dan jaringan distribusi serta aksesibilitasnya (School of Urban Planning, 2022).

1.4 Perencanaan Kota atau Perencanaan Wilayah

Secara tradisional, perencanaan kota mengikuti pendekatan *top-down* dalam perencanaan induk tata letak fisik pemukiman (Taylor, 1998). Perhatian utamanya adalah pada aspek kesejahteraan masyarakat yang meliputi pertimbangan efisiensi, sanitasi, perlindungan dan penggunaan lingkungan (School of Urban Planning, 2022), serta pengaruh rencana induk terhadap kegiatan sosial dan ekonomi (Midgley, 1999). Perencanaan kota menjawab pertanyaan tentang bagaimana orang akan hidup, bekerja, dan bermain di daerah tertentu sehingga memandu pembangunan yang teratur di daerah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan (Caves, 2004). Meskipun sebagian besar berkaitan dengan perencanaan pemukiman dan komunitas, perencanaan kota

juga bertanggung jawab untuk merencanakan transportasi barang, sumber daya, manusia, dan limbah yang efisien, distribusi kebutuhan pokok seperti: air dan listrik, rasa inklusi dan kesempatan bagi orang-orang dari segala jenis, budaya dan kebutuhan, pertumbuhan ekonomi atau pengembangan usaha, meningkatkan kesehatan dan melestarikan area lingkungan yang secara aktif berkontribusi terhadap pengurangan emisi CO₂ (Pobiner, 2020). Sebagian besar tim perencanaan kota terdiri dari orang-orang berpendidikan tinggi yang bekerja untuk pemerintah kota (Levy, 2017). Hal ini erat kaitannya dengan bidang perancangan kota (Assche et al, 2012). Disiplin perencanaan kota adalah kategori yang lebih luas mencakup sub-bidang yang berbeda seperti perencanaan penggunaan lahan, zonasi, pembangunan ekonomi, perencanaan lingkungan, dan perencanaan transportasi (American Planning Association, 2023). Perencanaan kota mencakup teknik-teknik seperti: memprediksi pertumbuhan populasi, zonasi, pemetaan dan analisis geografis, menganalisis ruang taman, mensurvei pasokan air, mengidentifikasi pola transportasi, mengenali permintaan pasokan makanan, mengalokasikan layanan kesehatan dan sosial, dan menganalisis dampak penggunaan lahan. Mereka menangani masalah jangka pendek seperti bagaimana orang bergerak melalui kota, atau masalah jangka panjang seperti penggunaan lahan dan pertumbuhan (Landis, 2012). Salah satu model yang digunakan adalah Sistem Informasi Geografis (SIG). Kode bangunan dan peraturan lainnya sesuai dengan perencanaan kota dengan mengatur bagaimana kota dibangun dan digunakan dari tingkat individu (Ben-Josef, 2012). Metodologi penegakan termasuk zonasi pemerintah, izin perencanaan, dan kode bangunan serta kemudahan pribadi dan perjanjian pembatasan (Smit dan Valiante, 2015). Pentingnya perencanaan kota meningkat di abad 21, ketika masyarakat modern mulai menghadapi masalah peningkatan

pertumbuhan populasi, perubahan iklim, dan pembangunan yang tidak berkelanjutan (Heidari et al., 2021a) (Heidari dkk, 2021b).

DAFTAR PUSTAKA

- Allmendinger, P. and Gunder, M. 2016. "Applying lacanian insight and a dash of derridean deconstruction to planning's 'Dark Side'" *Planning Theory* vol. 4 no. 1 pp. 87-112. doi:10.1177/1473095205051444.
- American Planning Association. 2023. "What Is Planning?" American Planning Association. Available at: <https://www.planning.org/aboutplanning/> Archived on 15 February 2023.
- Assche, K. V, Beunen, R., Duineveld, M., and de Jong, H. 2012. "Co-evolutions of planning and design: Risks and benefits of design perspectives in planning systems" *Planning Theory* vol. 12 no. 2 pp. 177-198. doi:10.1177/1473095212456771.
- Ben-Joseph, E. 2012. "Codes and Standards in Urban Planning and Design" *The Oxford Handbook of Urban Planning*. Oxford, England: Oxford University Press. pp. 352-370.
- Caves, R. W. 2004. "Encyclopedia of the City". Routledge. p. 704.
- Fahmi, I. 2012. "Analisis Kinerja Keuangan". Bandung: Alfabeta.
- Gunder, M. 2003. "Passionate Planning for Desire: an the Others' Agonistic Response to the Dark Side of Planning" *Progress in Planning* vol. 60 no. 3 pp. 235-319. doi:10.1016/s0305-9006(02)00115-0.
- Heidari, H., Arabi, M., Warziniack, T. and Sharvelle, S. 2021a. "Effects of urban development patterns on municipal water shortage" *Frontiers in Water Sec. Water and Built Environment* vol. 3 694817. doi:10.3389/frwa.2021.694817.
- Heidari, H., Arabi, M., Warziniack, T. and Kao, Shih-Chieh. 2021b. "Shifts in hydroclimatology of US megaregions in response to climate change" *Environmental Research Communications* vol. 3 no. 6 065002. doi:10.1088/2515-7620/ac0617.

- <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-perencanaan/>.
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Planning>.
- <https://www.gramedia.com/literasi/perencanaan/>.
- <https://www.pustakaindo.co.id/20-pengertian-perencanaan-menurut-para-ahli-lengkap/>.
- Kelly, E. D. and Becker, B. 2000. *"Community Planning: An Introduction to the Comprehensive Plan"*. Washington: Island Press.
- Knoepfel, P., Larrue, C., Varone, F. and Hill, M. 2011. *"Public Policy"*. doi:10.1332/policypress/9781861349071.003.0002.
- Landis, J. D. 2012. *"Modeling Urban Systems"*. The Oxford Handbook of Urban Planning. Oxford, England: Oxford University Press. pp. 323-350.
- Levy, J. M. 2017. *"Contemporary Urban Planning 11th Edition"*. Routledge.
- Midgley, J. 1999. *"Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare"*. Los Angeles: SAGE Publications Ltd.
- Montana, P. J. and Charnov, B. H. 2000. *"Management 5th Edition"*, Barron's Business Review Book. Barrons Educational Series.
- Pobiner, J. 2020. "Three urban planning trends that are changing how our cities will look in the future". *Building Design and Construction*. Available at: <https://www.bdcnetwork.com/blog/3-urban-planning-trends-are-changing-how-our-cities-will-look-future>.
- School of Urban Planning. 2022. *"What is Urban Planning"*. School of Urban Planning, McGill University. Available at: <https://www.mcgill.ca/urbanplanning/>.
- Silalahi, U. 2011. *"Asas-Asas Manajemen"*. Bandung: Refika Aditama.
- Smit, A. and Valiante, M. 2015. *"Public Interest, Private Property: Law and Planning Policy in Canada"*. Vancouver, British Columbia: University of British Columbia Press. pp. 1-36.

- Suandy, E. 2016. "*Perencanaan Pajak Edisi 6*". Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Suddendorf, T. and Corballis, M.C. 2007. "The evolution of foresight: What is mental time travel, and is it unique to humans?" *The Behavioral and Brain Sciences* vol. 30 no. 3 pp. 299-313, discussion 313-351. doi:10.1017/S0140525X07001975.
- Taufiqurokhman. 2008. "*Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama. Jakarta.
- Taylor, N. 1998. "*Urban Planning Theory Since 1945*". Los Angeles: SAGE Publications Ltd.
- Wijayanto, D. 2012. "*Pengantar Manajemen*". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yalmanov, N. 2021. "Public Policy and Policy-Making". *KnE Social Sciences* vol. 5 no. 2 pp. 558-564. XXIII International Conference Culture, Personality, Society in the Conditions of Digitalization: Methodology and Experience of Empirical Research Conference. <https://doi.org/10.18502/kss.v5i2.8400>.
- Yiftachel, O. 2006. "Re-engaging Planning Theory? Towards South-Eastern Perspectives" *Planning Theory* vol. 5 no. 3 pp. 211-222. doi:10.1177/1473095206068627.

BAB 2

PENGERTIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN KOTA

Oleh Ramses Victor Elim

2.1 Pendahuluan

Kota merupakan suatu lingkungan yang tidak dibentuk secara singkat oleh manusia, melainkan merupakan lingkungan yang dibangun melalui proses yang panjang. Setiap tahapan perkembangan suatu wilayah akan membentuk suatu lingkungan yang disebut kota. Berbagai macam faktor turut berperan dalam proses terbentuknya suatu kota seperti faktor politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam sebuah kota, terdapat tempat dimana masyarakat beraktifitas dan bekerja dalam berbagai kepentingan masing-masing. Terjalannya interaksi dan keramaian aktifitas masyarakat dalam suatu kota merupakan tanda adanya pertumbuhan dari kota itu sendiri. Tidak terbatas pada jumlah orang, keramaian penduduk di suatu kota juga dapat dilihat dari hiruk pikuk lalu lintas, kesibukan setiap orang dalam bermacam bidang, dan juga berbagai aktifitas kompleks yang dilakukan dengan berbagai macam kebutuhan dan peranan masyarakat di dalamnya (Alfian, 2007).

Perkembangan suatu kota tentu tidak terlepas dari berbagai hal-hal penting yang bergerak di dalamnya. Kota menjadi daerah pusat segala bentuk kegiatan publik baik itu dalam pemerintahan, kebudayaan, keagamaan, maupun kegiatan-kegiatan ekonomi. Kota memiliki ciri adanya berbagai fasilitas umum, pusat pendidikan, perbelanjaan, pusat

kesehatan dan lain-lain. Terdapat pula berbagai organisasi yang dibentuk dalam suatu kota sesuai kepentingan masing-masing. Perkembangan-perkembangan ini tentu diawali dari sejarah lampau terbentuknya suatu kota karena suatu kota merupakan lingkungan yang dibentuk dalam waktu yang relatif panjang.

Kondisi wilayah perkotaan saat ini merupakan akumulasi dari setiap tahap perkembangan yang terjadi sebelumnya dan dipengaruhi oleh berbagai faktor karena sebenarnya kota merupakan sebuah sistem yang terbuka serta bersifat dinamis sehingga dalam perkembangannya kota sukar untuk dikontrol dan sewaktu waktu bisa menjadi tidak beraturan. Salah satu faktor yang berperan penting dalam perubahan wajah kota itu sendiri adalah masyarakat/warga kota yang mendiami wilayah tersebut. Sejalan dengan perkembangan kota maka munculah berbagai permasalahan di tengah warga kota (urban) seperti masalah urbanisasi, kemiskinan, kualitas lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban, kapasitas daerah dalam pengembangan dan pengelolaan, pertumbuhan kota yang belum seimbang serta globalisasi.

2.2 Pengertian Kota

2.2.1 Pengertian Kota

Kota berasal dari bahasa sangsekerta yaitu "*kotta*" atau dalam ungkapan lain disebut *kita* atau *kuta*. Dalam Anglo-Amerika, terdapat dua istilah yang merujuk kepada kota yakni "*town*" dan "*city*". istilah *town* dan *city* dalam Bahasa Indonesia memiliki arti berbeda, *town* merujuk kepada "kota kecil", sedangkan *city* pada "kota besar" (Menno dan Alwi dalam Jamaludin, 2015). Kota merupakan suatu pemukiman yang relatif luas dan besar. Kota juga merupakan suatu wilayah yang padat dan permanen dimana terdapat kumpulan individu heterogen dalam segi sosial (Amos

Rapoport dalam Fahmi 2009). Berbagai elemen dan strata masyarakat, terdapat dalam sebuah kota dan menunjukkan adanya keberagaman tiap kelompok individu dalam kota tersebut. Menurut Zahnd (2006), kota merupakan sebuah simbol adanya kesejahteraan, kesempatan, usaha, dan tidak menutup kemungkinan ada pula kemiskinan, perjuangan, dan sumber beberapa masalah seperti polusi udara.

Hoekveld Geograf dalam Kustiwan (2010) menyatakan bahwa suatu kota berdasarkan komponen dasarnya, terdiri atas aspek morfologi, sosial, ekonomi, hukum, dan jumlah penduduk.

1. Morfologi

Morfologi merujuk pada bentuk dan juga susunan-susunan yang membentuk suatu kota. Pada dasarnya terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada bentuk fisik suatu kota dan desa. Di kota mudah ditemui gedung-gedung besar dan tinggi sedangkan di desa, lebih sering ditemukan lahan pertanian dan rumah-rumah penduduk yang berjarak. Namun seiring berjalannya waktu, tentu hal ini akan sulit dijadikan suatu standar yang membedakan desa dan kota karena terdapat pula desa-desa yang mulai meniru gaya rumah-rumah dari kota.

2. Sosial

Dalam kehidupan sosial, masyarakat kota lebih terbuka dalam menjalin pergaulan. Setiap orang secara bebas menentukan dengan siapa mereka menjalin interaksi dan relasi. Namun seringkali ditemui juga tradisi relasi yang saling mengkotak-kotakan karena status sosial dan kepentingan yang berbeda.

3. Ekonomi

Karakteristik utama masyarakat kota adalah berada pada wilayah non agraris. Kota lebih menjalankan fungsi pada bagian industri, jasa, perdagangan, dan kultural. Interaksi dan interelasi masyarakat lebih dominan pada aktivitas yang bersifat ekonomis dan perniagaan sehingga berbagai transaksi perdagangan terjadi di pertokoan, supermarket, dan mall.

4. Hukum

Kota dikaitkan dengan adanya penguatan hak-hak masyarakat yang terikat secara hukum dan dilindungi secara menyeluruh pada semua penghuni kota. Wilayah kota memiliki penerapan hukum yang kuat dan tertulis.

5. Jumlah Penduduk

Pengertian kota dapat dilihat berdasarkan jumlah penduduknya. Beberapa pendapat menyatakan bahwa ukuran kota, tergantung pada jumlah penduduknya. Istilah kota ini kemudian diklasifikasikan berdasarkan jumlah penduduknya, yaitu :

- a. Kota kecil, jumlah penduduk antara 20.000 sampai 50.000 jiwa
- b. Kota sedang/medium, jumlah penduduk antara 50.000 sampai 100.000 jiwa
- c. Kota besar, jumlah penduduk antara 100.000 sampai 1.000.000 jiwa
- d. Kota metropolitan, jumlah penduduk antara 1.000.000 sampai 10.000.000 jiwa
- e. Kota megapolis/megapolis, jumlah penduduk lebih dari 10.000.000 jiwa

Terdapat sepuluh kriteria untuk merumuskan secara lebih spesifik terkait kota yang dikemukakan oleh Amos Rapoport dalam Fahmi 2009 yaitu :

1. Ukuran dan jumlah penduduk yang besar dibanding tempat
2. Permanen
3. Adanya kepadatan minimum berdasarkan massa dan tempat
4. Terdapat struktur dan tata ruang seperti adanya jalur jalan dan fasilitas-fasilitas perkotaan
5. Adanya tempat masyarakat tinggal dan bekerja
6. Adanya wilayah-wilayah pemerintahan, administrasi, militer, pusat keagamaan, kelembagaan, dan pusat intelektual
7. Perbedaan yang bersifat hirarki

8. Adanya pusat perekonomian sebagai wadah penghubung wilayah pertanian dan pemasaran
9. Terdapat pusat pelayanan
10. Terdapat falsafah hidup perkotaan pada masyarakat di tempat itu.

Sudut pandang tentang arti sebuah kota pun juga bisa tergantung pada ekspresi kehidupan orang sebagai pelaku dan pembuatnya karena sebenarnya sebuah kota merupakan ungkapan kehidupan manusia yang paling kompleks jika dilihat dari sisi budaya dan antropologi.

Selain dari yang disebutkan di atas, ciri kota tidak hanya berpatokan pada adanya elemen-elemen secara fisik, melainkan juga pada menitikberatkan pada fungsi dan perannya. Kota tidak sebatas adanya gedung dan manusia, melainkan juga menjadi wadah adanya aktifitas bagi masing-masing orang yang menjalankan tugasnya (Fahmi, 2009). Kota pada awalnya bukan tentang tempat pemukiman, melainkan sebagai pusat pelayanan bagi wilayah pedesaan sekitarnya untuk memanfaatkan jasa-jasa dari kota tersebut sehingga munculah istilah “pusat kota” dimana pusat kota inilah yang menjadi titik dari suatu daerah untuk menjalankan perannya dalam hal pelayanan (Daldjoeni, 1997 dalam Jamaludin, 2015). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kota adalah tempat dimana jumlah penduduknya besar, luas areanya terbatas, wilayahnya permanen, terdapat aktivitas manusia yang aktif dan terdapat pusat kegiatan-kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

2.2.2 Pengertian Kota sebagai Urban

Kota memiliki pengertian yang kompleks karena mengandung banyak hal di dalamnya. Telah disebutkan bahwa kota memiliki makna sebagai *town* dan *city*. Namun dalam pengertian lain, kota juga disebut sebagai *urban*. Makna *town* dan

city didasari dari batas teritorial yang bercirikan kota, sedangkan urban merujuk kepada kualitas kehidupan yang bercirikan kota. *Town* dan *city* dibedakan atas dasar besarnya yakni kota kecil dan kota besar, sedangkan urban didasari dari ciri dan cara hidup ataupun suasana dan penghidupan modern yang disebut perkotaan (Kustiwan, 2014). Menurut UU No. 24 Tahun 1992 perkotaan adalah kawasan yang kegiatan utamanya bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pemusatan, dan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Perkotaan tentu berbeda dengan pedesaan baik dalam segi struktur maupun potensinya. Oleh karena itu sebagian besar masyarakat pedesaan akan berpindah ke kota karena kesempatan yang ada cukup besar. Perpindahan penduduk dari desa ke kota disebut urbanisasi. Urbanisasi seringkali dipicu oleh faktor penarik dan faktor pendorong. Perkembangan industri dan perdagangan di wilayah kota menjadi faktor penarik sedangkan keinginan untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup menjadi faktor pendorong yang membuat masyarakat pedesaan ingin berpindah ke perkotaan (Alfian, 2007). Selain dalam perdagangan, potensi lain yang menarik dari sebuah kota dapat dilihat dari adanya fasilitas pemenuhan kebutuhan hidup seperti pusat perbelanjaan, kawasan industri dan sebagainya. Selain itu dalam bidang kesehatan, terdapat pula rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang memadai. Dalam bidang pendidikan, tentu saja terdapat fasilitas pendidikan dengan kualitas yang baik. di dalam kota pun terdapat tempat wisata atau rekreasi yang tentu saja menarik bagi masyarakat pedesaan (Syadzily, 2020).

2.3 Sejarah Perkotaan

Terbentuknya suatu kota diawali dengan adanya perkumpulan dari pedagang berbagai daerah di suatu tempat. Pedagang-pedagang tersebut kemudian mencari tempat persinggahan yang aman dan strategis. Lokasi strategis yang ditemui sebagian besar merupakan daerah di tepi laut atau dekat aliran sungai sehingga dapat dilihat beberapa kota besar yang saat ini berada di negara-negara tertentu merupakan kota yang berbatasan langsung dengan tepi laut ataupun sungai-sungai besar. Kumpulnya pedagang di suatu tempat kemudian membentuk kota kecil yang dikelola oleh pihak tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Kota kecil tersebutlah yang kemudian terus mengalami perkembangan hingga saat ini (Syadzily, 2020).

Dinamika perkembangan kota terus mengalami pergerakan dari masa ke masa dimulai dengan bersifat sederhana sampai bersifat kompleks. Beberapa tipe-tipe kota dari dahulu sampai sekarang adalah sebagai berikut :

1. Kota Kuno

Menurut sejarah, cikal bakal terbentuknya suatu kota didapati pada gua-gua, lembah, dan tempat-tempat berlandung. Lokasi strategis suatu kota terletak di tepi laut atau tepi sungai. Unsur-unsur pembentuk kota kuno adalah jumlah penduduk, ragam pekerjaan, dan sistem pemerintahan. Pada beberapa kota kuno di dunia, ciri yang paling sering menonjol adalah terbentuknya benteng dan menara untuk melindungi kota dari serangan musuh. Selain benteng, pada kota kuno juga didapati parit untuk menghalau serangan musuh

2. Kota Praindustri

Tanda memasuki kota praindustri adalah munculnya pusat-pusat kegiatan seperti ruang publik (tempat masyarakat interaksi), tempat ibadah, pasar tradisional (tempat pendistribusian barang dari desa ke kota dan sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari), dan juga pusat

pemerintahan. Lokasi dari keempat fasilitas ini pada dasarnya berdekatan satu sama lain. Kedekatan lokasi ini menunjukkan bahwa empat fasilitas tersebut merupakan kegiatan pokok bagi masyarakat kota praindustri.

3. Kota Industri

Munculnya kota industri dicirikan dengan mulai berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat dari penggunaan rasionalisme untuk mencapai kebahagiaan hidup masyarakat. Sedangkan penggunaan teknologi dimaksudkan untuk memperlancar produksi dan juga distribusi barang-barang konsumsi.

4. Kota Modern

Kota modern ditandai dengan meluasnya globalisasi ke pelosok dunia dan menjadi kota impian bagi setiap daerah yang sedang berkembang. Pada masa industri, jumlah penduduk meningkat pesat dan menimbulkan berbagai masalah seperti padatnya pemukiman kumuh, kurang tersedianya air bersih, dan kurangnya rumah layak huni yang berdampak pada perkembangan masyarakat yang tidak sehat. Oleh karena itu pada kota modern, dihadirkan tiga hal penting yang menjadi perhatian utama. Hal yang pertama yaitu peningkatan pemanfaatan teknologi untuk mempermudah perwujudan kehidupan manusia, yang kedua mengubah pola pikir masyarakat agar lebih memperhatikan lingkungan baik melalui sistem daur ulang sampah atau memanfaatkan sumber energi non reguler sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Serta yang ketiga adalah pemanfaatan tenaga listrik dan komputerisasi sebagai sumber utama untuk menggerakkan roda kegiatan masyarakat. Ketiga hal tersebut dapat terlihat jelas pada kota-kota besar di dunia.

5. Kota Postmodern

Kota postmodern ditandai dengan globalisasi yang tinggi. Terdapat pula interaksi dan kerja sama yang saling menguntungkan antara berbagai kota. Teknologi dan ilmu pengetahuan dimanfaatkan secara maksimal dengan memanfaatkan berbagai ide-ide kreatif yang dapat diakui eksistensinya. Berbagai teknologi baru yang mungkin akan sulit dicerna bagi kaum awam akan terus dikembangkan seperti teknologi daur ulang air seni, penyediaan bahan makanan dalam kapsul, maupun aktivitas di luar angkasa. Pada masa ini, masyarakat sangat menghargai pluralitas dan sangat modern sehingga tidak sulit dalam menerapkan hal-hal baru sebagai inovasi dalam suatu kota.

E.E. Bergel, (1955) mengemukakan beberapa istilah berkaitan dengan perkembangan suatu wilayah menjadi sebuah kota sebagai berikut :

1. *Village* (desa), diartikan sebagai tempat pemukiman para petani. Ciri utamanya adalah tidak didominasi antara desa satu dengan yang lain.
2. *Town* (kota kecil), merupakan suatu pemukiman perkotaan yang mendominasi lingkungan pedesaan.
3. *City* (kota besar), merupakan suatu pemukiman perkotaan yang mendominasi sebuah kawasan baik pedesaan maupun perkotaan.
4. *Metropolis* (*metro*=hidup, *polis*=kota). Batasan metropolis semula didasarkan pada jumlah penduduk, yaitu lebih dari 1.000.000. Kemudian batasan ini tidak digunakan karena banyak kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.000.000.

Suatu tempat harus memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah kota. Menurut Horton dan Hunt dalam Jamaludin 2015,

menyebutkan bahwa ada tiga persyaratan agar suatu tempat dapat disebut kota yaitu *Pertama*, tersedianya air. Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Sebab tanpa air manusia akan sulit untuk hidup. *Kedua*, terjadinya surplus pangan. Hal ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan warga kota. *Ketiga*, tersedianya infrastruktur transportasi. Hidup manusia sangat tergantung satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu diperlukan transportasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di samping persyaratan di atas, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan suatu daerah berkembang menjadi sebuah kota. Beberapa faktor yang mendorong suatu tempat berkembang menjadi sebuah kota antara lain : letak yang strategis, topografi halus, tanah yang subur, iklim/cuaca yang mendukung, selain itu daerah tersebut juga menjadi pusat kegiatan agama, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan studi/sekolah, pusat kegiatan rekreasi dan kesehatan, serta menjadi pusat kegiatan perdagangan dan industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Magdalia. 2007. *Kota dan Permasalahannya*. Working Paper. D. I. Yogyakarta. Direktorat Jendral Kebudayaan BPNB.
- Bergel, E E. 1955. *Urban Sociologi*. 109 New York.
- Fahmi, Khairul. 2009. *Pengembangan Kawasan Sudirman Kota Pekanbaru Berbasis Transit Oriented Development*. Jakarta.
- Jamaludin, A Nazrullah. 2015. *Sosiologi Perkotaan, Memahami Masyarakat Perkotaan dan Problematikannya*. Bandung. Pustaka Setia.
- Kustiwan, Iwan. 2014. *Pengertian Dasar dan Karakteristik Kota Perkotaan dan Perencanaan Perkotaan, in Modul Perencanaan Kota. Tangerang Selatan*. Universitas Terbuka. P.535 Available at : <http://respository.ut.ac.id/3999/1/ADPU4433-M1.pdf>.
- Markus Zahnd. 2006. *Perencanaan Kota Terpadu*. Yogyakarta. Kanisius.
- Syadzily, H, Ace. 2020. *Sejarah Terbentuknya Kota dan Pertumbuhannya*. Jakarta. UIN Jakarta.

BAB 3

DEFINISI DASAR PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Oleh Nevi Kurniawati

3.1 Konsep Dasar Perencanaan

Empat komponen yang membentuk ide perencanaan adalah: (1) pengumpulan data dari masa lalu hingga saat ini, (2) analisis data untuk memahami masalah saat ini dan ramalan untuk masa depan, (3) perencanaan tujuan, dan (4) pembuatan rencana aksi untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan dari berbagai perspektif adalah sebagai berikut.

Branch (1983:2) dalam Djunaedi, 2014 mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang diarahkan ke masa depan dalam mengarahkan aktivitas manusia dan sumber daya alam. Perencanaan adalah proses yang ditujukan ke masa depan dalam mengarahkan kegiatan manusia dan sumber daya alam. Perencanaan adalah kegiatan yang mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya publik, menurut More . Bahasa yang sama dapat ditemukan dalam UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1: dalam Djunaedi, 2014 Perencanaan adalah proses untuk memutuskan kegiatan masa depan yang dapat diterima melalui serangkaian pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. (DJUNAEDI, 2014)

Perencanaan harus mampu mengantisipasi dinamika dan kompleksitas wilayah dan kota karena dapat berubah dengan cepat dan tidak terduga di masa mendatang. Ini membutuhkan perencanaan kreatif dan integrasi perencanaan dan implementasi;

antara lain, umpan balik dari pelaksana rencana diperlukan untuk menjaga agar rencana tidak gagal.

Perencanaan kota dan wilayah bersifat publik dalam arti melibatkan tindakan orang, organisasi, atau pemerintah, dan hasilnya berdampak pada komunitas yang lebih luas. Hasil perencanaan harus disahkan oleh masyarakat atau badan yang bertindak sebagai representasi masyarakat dalam masyarakat demokratis karena sifatnya publik.

The American Planning Association (APA), yang menyatakan bahwa perencanaan adalah profesi dinamis yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan komunitasnya dengan menciptakan komunitas yang menyenangkan, lebih adil, lebih sehat, lebih efisien, dan lebih menarik, antara lain menyatakan bahwa tujuan perencanaan wilayah dan kota adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, APA sangat menekankan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, warga, dan perusahaan, dalam membina lingkungan masyarakat yang mendukung tujuan masyarakat.

Berdasarkan beberapa sudut pandang yang diberikan di atas, kita dapat memilih definisi perencanaan yang lebih menyeluruh, seperti yang diberikan oleh Alexander (1983) dalam Djunaedi (2014) sebagai berikut: Kemampuan dan keinginan untuk mengalokasikan sumber daya dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Strategi yang telah ditetapkan adalah yang mendukung perencanaan, yaitu aktivitas masyarakat dan organisasi untuk mengembangkan strategi yang optimal terkait dengan tindakan masa depan untuk mencapai serangkaian tujuan yang diinginkan dan memecahkan masalah nyata dalam konteks yang kompleks.

Untuk mencapai tujuan, perencanaan merupakan proses yang berkesinambungan yang melibatkan proses lain atau kondisi

yang berubah-ubah. Perencanaan mencakup keseluruhan proses, menurut Catanasen (1979) termasuk: (Noor Hamidah, 2022)

1. Analisis, yaitu mengolah data, menggambarkan manfaat manajemen bencana, ketahanan, dan prakiraan atau prediksi masa depan berdasarkan analisis saat ini
2. Kebijakan, yaitu memilih strategi pelaksanaan yang efektif, mengetahui standar-standar rencana tandingan, dan membuat usulan untuk masa yang akan datang.
3. Rancangan (Desain) khususnya pembuatan model dan pilihan desain. Perencanaan adalah ilmu multidisiplin yang luas yang mengacu pada keahlian dari banyak bidang lain, termasuk arsitektur, arsitektur lansekap, spesialis, pariwisata, geografi, ekonomi, hukum, dan banyak lagi.

Proses perencanaan, pemerintah kota dan pemerintah berpartisipasi dalam proses perencanaan untuk mewujudkan pemerataan dan kelestarian lingkungan perkotaan.

3.2 Definisi Perencanaan Kota

Kata perencanaan memiliki banyak arti, sebagian besar bidang keilmuan menggunakan istilah perencanaan. Di bidang ekonomi, perencanaan berarti mengelola sumber daya yang langka dengan bijak. Jayadinata (Wikantiyoso, 2005) dalam Syahrul (2020) ahli tata kota mendeskripsikan, perencanaan melibatkan hubungan yang bersinergi antara manusia dan lingkungan dimasa depan

Perencanaan pada dasarnya adalah pemilihan kondisi masa depan yang kita inginkan saat ini (pilih masa depan yang kita inginkan hari ini) serta proses yang perlu kita ambil untuk memenuhi langkah tersebut. Untuk menciptakan masa depan yang kita inginkan, kita harus menentukan pilihan pada saat ini, bukan di masa yang akan datang. Tujuan menempa masa depan bukanlah

untuk memutuskan apa yang akan dilakukan besok, tetapi apa yang harus dilakukan hari ini untuk esok hari

Dari perspektif lain tentang perencanaan, yang diungkapkan oleh Friedman dalam Tarigan (2008:04) dalam Syahrul (2020) "Perencanaan adalah langkah-langkah untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial, untuk menciptakan sesuatu di masa yang akan datang. Tujuan yang dimaksud adalah kemauan bersama dan dimaksudkan untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program.

Pakar manajemen menyatakan definisi perencanaan yang berbeda, dikutip oleh Riyadi (2004) dalam Syahrul (2020) meliputi:

1. Harold Koontz dan Cyril O'donnel menjelaskan bahwa "perencanaan adalah fungsi manajemen yang melibatkan pemilihan antara alternatif tujuan, kebijakan, program dan prosedur"
2. George R. Terry menguraikan perencanaan sebagai metode untuk memilih, menghubungkan fakta, dan menggunakan asumsi tentang masa depan dengan menguraikan dan menciptakan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan.

Sementara LAN RI-DSE (1999) dalam Syahrul (2020) memandang perencanaan sebagai proses membuat penilaian tentang kondisi untuk menerapkan orientasi masa depan, Kartasmita (1997) dalam Syahrul (2020) menggambarkan sebagai fungsi manajemen yang pada dasarnya merupakan proses pengambilan keputusan antara berbagai alternatif untuk mencapai tujuan. tujuan yang dimaksudkan. (Ibad, 2020)

Perencanaan adalah proses menciptakan tujuan dan sasaran, memilih tindakan, dan mempertimbangkan strategi terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan.

Amirullah (2004:91) dalam Syahrul (2020) menegaskan bahwa istilah “perencanaan” memiliki banyak definisi, antara lain:

- a) Proses adalah istilah dasar yang menjelaskan bagaimana tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang telah diputuskan.
- b) Menetapkan tujuan dan sasaran, yaitu Merencanakan kegiatan, ke arah mana organisasi akan di tuju
- c) Memilih aktivitas, atau mengoptimalkan beberapa aktivitas yang efisien daripada hanya menggunakan aktivitas yang tidak efektif.
- d) Tujuan, yang merupakan hasil akhir atau tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh perusahaan. Menetapkan standar yang berlaku akan membantu dalam hal ini.

Dari beberapa pengertian perencanaan di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam perencanaan secara umum dapat dikatakan beberapa hal pokok sebagai unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri. Unsur-unsur yang dimaksud antara lain:

- A. Adanya asumsi berdasarkan fakta. Karena hasil perencanaan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan, perencanaan harus didasarkan pada asumsi yang didukung oleh fakta atau bukti.
- B. Adanya pilihan atau alternatif yang digunakan untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan menunjukkan bahwa pada saat membuat suatu rencana harus dipertimbangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dimaksud.
- C. Tujuan harus dicapai; dalam situasi ini, perencanaan merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan dengan melakukan tindakan.

- D. Menggunakan analisis prediktif sebagai langkah untuk meramalkan potensi masalah yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan perencanaan desain
- E. Keputusan yang menghasilkan kebijakan yang perlu diterapkan.

Unsur-unsur perencanaan, menurut LAN-DSE (1999) dalam Syahrul (2020) dinyatakan sebagai berikut:

1. Perencanaan memerlukan pengambilan keputusan atau pilihan, seperti memilih prioritas atau strategi atau alternatif untuk mencapai tujuan.
2. Perencanaan memerlukan alokasi sumber daya
 - a) Memanfaatkan sumber daya alam, manusia, atau keuangan yang ada dengan sebaik-baiknya
 - b) Analisis pengumpulan data terhadap sumber data yang tersedia
3. Tujuan yang jelas harus direncanakan atau dicapai dengan menggunakan alat (ekonomi, politik, sosial, ideologis, atau kombinasi dari semuanya)
4. Perencanaan adalah tentang masa depan
5. Perencanaan adalah proses yang berkelanjutan

Pendapat yang berbeda dari para ahli membuat sulit untuk mendefinisikan konsep umum perencanaan. Soekartawi menegaskan, sebuah perencanaan dapat dibuat berdasarkan beberapa faktor dan kriteria, antara lain:

- a) Konsep rencana lengkap mengenai rencana tindakan yang akan dilakukan.
- b) Keinginan masyarakat harus diperhatikan karena rencana yang disusun perlu memperhatikan aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat.
- c) Sumber daya yang dapat diakses secara potensial harus dipertimbangkan

- d) Penting juga untuk mempertimbangkan distribusi dan ketersediaan sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- e) Aspek kelestarian dan keberlanjutan memerlukan perhatian khusus (*sustainable*)

Proses perencanaan diawali dengan pengumpulan data melalui penelitian dan survei. Perencanaan diperlukan untuk analisis data di berbagai bidang yang terkait dengan perencanaan. “Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi yang ada, memprediksi pertumbuhan banyak aspek terkait yang tidak dapat dikendalikan, mengevaluasi faktor pembatas, menetapkan tujuan dan kemungkinan tujuan yang ingin dicapai, serta mencari cara untuk mencapai tujuan tersebut” adalah apa yang dikatakan Tarigan (2008:3) dalam Syahrul (2020). didefinisikan sebagai perencanaan. Perencanaan dengan demikian merupakan kegiatan konstan dan terorganisir. Kegiatan pengumpulan data yang berfungsi sebagai titik awal untuk refleksi dan proyeksi masa depan yang akan digunakan untuk menentukan langkah apa yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan sumber daya yang ada.

3.3 Definisi Perencanaan Wilayah

Perencanaan dan implementasi pembangunan khusus industri saat ini menyebabkan sejumlah masalah terkait pembangunan. Beragam inisiatif dilakukan untuk melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah secara terpadu. Sistem kerja yang terintegrasi dalam arah perencanaan adalah salah satunya. Perencanaan yang komprehensif adalah nama dari sistem kerja ini. Tuntutan, tujuan, dan kepentingan sektor lain diperhitungkan selama implementasi strategi komprehensif ini.

Dalam hal ini, ada dua komponen yang menyusun sistem perencanaan: satu terkait dengan organisasi perencanaan itu sendiri, dan yang lainnya terkait dengan wilayah perencanaan. Atas dasar ide metodis ini, muncul apa yang disebut perencanaan wilayah yang komprehensif. Ada tiga jenis skala spasial yang berbeda, sebagaimana ditentukan oleh definisi kawasan dan perencanaan menyeluruh, yaitu:

1. Wilayah nasional adalah wilayah yang dikelilingi oleh batas administratif dan politik suatu negara dan berisi sejumlah wilayah administratif, perkotaan, atau regional.
2. Wilayah regional adalah sub-wilayah nasional yang memiliki batas-batas baik berdasarkan entitas administratif tertentu, batas geografis tertentu, atau kombinasi keduanya. Daerah ini dapat merupakan daerah pembangunan yang terdiri dari beberapa kabupaten atau kota, atau dapat juga terbatas pada daerah administrasi provinsi.
3. Wilayah Lokal. Seperti halnya pemekaran wilayah sub-nasional, batas-batas lokal dapat mengikuti batas-batas unit administratif dan unit fisik yang ada. Oleh karena wilayah dalam skala ini biasanya hanya mencakup wilayah yang sempit, maka penetapan batas atas dasar satuan pemerintahan biasanya lebih mudah dilakukan. Wilayah lokal yang sering digunakan adalah wilayah administrasi di tingkat kabupaten/kota. Dalam konteks saat ini telah dikembangkan perencanaan wilayah skala lokal yang lebih spesifik, seperti kawasan desa, wilayah adat atau kawasan perencanaan lainnya yang diatur dalam kebijakan tata ruang.

Aspek kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan fisik selalu menjadi pertimbangan dalam perencanaan wilayah. Oleh karena itu, ketiga ranah keberadaan tersebut selalu menjadi bagian dari

setiap perencanaan wilayah pada berbagai skala wilayah. Kontribusi kegiatan menurut fokusnya dapat diketahui dari banyak hal, sekalipun ketiga unsur tersebut sangat sulit dibedakan dalam skala yang lebih luas karena saling ketergantungannya. Dari perspektif pengelolaan lahan, hal ini konsisten dengan kecenderungan menuju pembangunan berkelanjutan. (Sutaryono, 2020)

3.4 Definisi Perencanaan Wilayah dan Kota

Definisi perencanaan kota yang lebih rinci diungkap oleh Bayer, dkk (2010) dalam Djunaedi (2014) sebagai berikut:

1. Perencanaan kota berorientasi masa depan: Perencana mengumpulkan data dari masa lalu hingga saat ini untuk menilai kondisi yang akan kita hadapi di masa depan; Dengan memprediksi masa depan, kita rumuskan tujuan atau visi masa depan, dan untuk mencapai tujuan tersebut kita kemudian mengatur langkah-langkah yang kita sebut rencana.
2. Perencanaan kota terkait tempat: Perencanaan kota berbeda dari perencanaan Perencanaan kota mengatur ruang atau tempat, termasuk penggunaan lahan menata penempatan fasilitas umum seperti terminal bis, dsb. Perencanaan kota menata bentuk kota ke masa depan.
3. Perencanaan kota membantu para pengambil keputusan: Berdasarkan tujuan masa depan, perencana kota menyusun beberapa alternatif penataan kota ke masa depan. Para pembuat keputusan memilih alternatif yang dirasa terbaik untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi rencana pengembangan dan penataan kota ke masa depan. Rencana kota tersebut antara lain berguna bagi perorangan, kelompok atau perusahaan sebagai pertimbangan untuk memutuskan pilihan atau lokasi tempat usaha dan tempat tinggalnya.

Perbedaan antara perencanaan kota (*urban planning*) dan perencanaan wilayah (*regional planning*) antara lain terletak pada obyek yang direncanakan. Perencanaan wilayah merencanakan objek berupa wilayah, sedangkan objek perencanaan kota berupa kota. Perbedaan objek tersebut mengandung perbedaan isu-isu yang dihadapi; Kota memiliki masalah yang berbeda dengan wilayah. Salah satu isu khas yang sering dihadapi wilayah: ketimpangan perkembangan pembangunan antarbagian wilayah, sedangkan permasalahan yang sering dihadapi di perkotaan adalah kemacetan lalu lintas.

3.5 Perbedaan Wilayah dan Kota

Istilah “Kota” memiliki dua pengertian (Djunaedi, 2014). Yang pertama adalah “kota” (kata benda) sebagai “pemerintahan kota” (*municipality*) dengan wilayah administrasinya, yang juga dikenal sebagai kota. Arti kedua adalah “daerah urbanisasi” yaitu pemukiman padat penduduk dengan prasarana dan sarana yang lengkap dan dapat dibedakan dengan daerah perdesaan yang padat penduduknya, tersebar, dan minim infrastruktur dan fasilitas umum.

Dalam bidang perencanaan wilayah dan kota (PWK), biasanya digunakan tiga istilah yang berkaitan dengan ruang lingkup: (1) mikro, (2) mezo, dan (3) makro. Cakupan mikro mengacu pada ruang terkecil, yang mencakup ruang di dalam gedung, gedung, dan kompleks gedung. Mezo adalah area yang mencakup ruang regional atau sebagian kota, sedangkan makro adalah ruang yang mencakup tingkat kota, regional (*regional*), dan negara bagian (*nasional*). Terlepas dari kenyataan bahwa ada tiga ruang lingkup yang diketahui, ilmu perencanaan wilayah dan kota hanya berurusan dengan perencanaan dari mezzo ke makro. Sedangkan ruang mikro hingga mezo banyak dibicarakan dalam bidang arsitektur.

Daerah (*region*) adalah wilayah yang lebih luas dari kota, yang dapat mencakup beberapa kota dan/atau desa (campuran) yang saling berinteraksi dan berkolaborasi. Kategori wilayah seringkali mencakup kota, kabupaten, dan provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- DJUNAEDI, A. 2014. *PENGANTAR PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA*. YOGYAKARTA: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Ibad, S. 2020. 'Manajemen Tata Ruang Kota (Konteks Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Kota dalam Perencanaan, Kordinasi, dan Pengendalian tata ruang kota)'. Depublish.
- Noor Hamidah, M.S. 2022. *Arsitektur Kota, Perancangan Kota, Dan Ruang Terbuka Hijau*. Depublish.
- Sutaryono. 2020. *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah Implementasi dalam Kebijakan Pertanahan*. STN Press.

BAB 4

FAKTOR-FAKTOR PERENCANAAN WILAYAH

Oleh Yunus Arifien

4.1 Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Ancaman kelaparan dan kekurangan gizi penduduknya khususnya pada bayi dan balita telah menjadi persoalan yang sampai hari ini belum bisa terselesaikan oleh negara. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat, maka upaya peningkatan kapasitas produksi tanaman pangan melalui pencetakan sawah baru dan peningkatan jaringan irigasi telah dilakukan. Namun, upaya tersebut belum memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan produksi pangan, karena terbentur pada berbagai kendala teknis dan kendala anggaran. Areal sawah baru yang dikembangkan terutama di luar Jawa ternyata kurang produktif akibat kendala biofisik tanah sehingga dampak perluasan areal baru tersebut tidak cukup berarti bagi peningkatan produksi pangan nasional, padahal biaya investasi yang diperlukan sangat mahal dan membutuhkan jangka waktu yang lama bagi pemantapan ekosistem sawah baru tersebut.

Pada dua dekade akhir abad 20 dan memasuki millenium ke-3 wacana pembangunan wilayah di Indonesia ditandai dengan membesarnya fenomena metropolitanisasi. Sampai tahun 1990 telah tumbuh beberapa kawasan yang mengarah terbentuknya metropolitan seperti Jabodetabek,

Medan Raya, Bandung Raya, Surabaya Gerbangkertasusila, dan Semarang Raya dan lain-lain. Salah satu isu yang mengiringi menguatnya metropolitanisasi dan perlu mendapat perhatian adalah perkembangan koridor antar kota. Dalam sepuluh tahun terakhir, wilayah sepanjang koridor Jakarta-Cirebon-Semarang, Jakarta-Bandung, Semarang-Solo-Yogyakarta dan Surabaya-Malang mengalami pertumbuhan daerah perkotaan yang pesat, bahkan kawasan Jabodetabek dan Metropolitan Bandung raya berkecenderungan membentuk koridor yang nyaris bersatu. Pembentukan koridor-koridor ini ditandai oleh semakin kaburnya (*blurring*) perbedaan antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan (Firman, 1992).

Daerah-daerah perdesaan di sepanjang koridor telah mengalami transformasi struktur wilayah (McGee, 1991) menyebut transformasi tersebut sebagai proses “kota-desasi”, yaitu perubahan struktur wilayah agraris ke arah struktur non agraris. Proses transformasi wilayah tersebut tentunya bukan hanya spasial, tetapi yang lebih penting adalah perubahan sosio-ekonomik dan kultural penduduk perdesaan yang antara lain menyangkut struktur produksi, mata pencaharian, konsepsi dan praktek-praktek kehidupan bersama, cara hidup, perilaku dan banyak aspek sosiokultural lain. Di samping itu, tidak terintegrasinya kegiatan-kegiatan perkotaan yang melakukan penetrasi ke daerah perdesaan diyakini akan menimbulkan kesenjangan sosioekonomi, konflik-konflik sosial budaya, terutama sebagai konsekuensi menjadi marginalnya penduduk perdesaan.

Ruang adalah sesuatu yang dinamis, misalnya ketersediaan jalan disatu sisi akan mengintervensi pola hidup manusia, namun disisi lain manusia lah yang mengintervensi ketersediaan jalan karena manusia membutuhkan aksesibilitas untuk keperluan mobilitasnya. Terlebih lagi dengan adanya globalisasi, dimana manusia dituntut untuk dapat berada dimana saja dan kapan saja.

Perubahan ruang, merupakan suatu hal yang wajar. Akan tetapi bukan berarti semua perubahan ruang berdampak baik bagi kehidupan manusia. Transformasi spatial merupakan sebuah proses perubahan ruang dari yang bercirikan pedesaan menjadi perkotaan atau juga dapat disimpulkan sebagai sebuah proses perkembangan daerah sub-urban atau pinggiran kota, kehidupan manusia akan didorong ke arah modern. Kehidupan modern yang diidentifikasi melalui kegiatan perekonomiannya, akan menimbulkan dua sisi dampak yang berbeda. Perekonomian akan menimbulkan akses terhadap pengembangan kualitas kehidupan lebih baik, namun disisi lain mendorong manusia untuk lebih konsumtif.

Penekanan pembangunan pada sektor modern perkotaan telah terbukti meningkatkan pertumbuhan di sektor dan lokasi yang hanya memiliki tingkat produktifitas tinggi. Laju pertumbuhan investasi dan akumulasi modal hanya terpusat di sektor modern tersebut. Konsep tersebut menginspirasi terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan di perkotaan (*growth pole economy*). Diharapkan dengan terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan terjadi proses penetesan pembangunan ke daerah-daerah belakang (*trickle down process*) dan pemerataan akan terjadi secara "otomatis" dari kutub-kutub pertumbuhan ke daerah belakang tersebut (*hinterland*). Namun pada kenyataannya penetesan pembangunan itu tidak terjadi, dan yang terjadi adalah pengurusan sumberdaya yang dimiliki daerah oleh pusat secara besar-besaran (*massive backwash effect*). Paradigma pembangunan yang *urban biased* tersebut telah menimbulkan berbagai persoalan seperti terjadinya urbanisasi yang berlebihan (*over urbanization*) karena akumulasi kapital yang berada di perkotaan. Urbanisasi yang berlebihan tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan di kota dan yang terjadi bukan lagi *economies of scale* (*economies of*

agglomeration) namun justru *diseconomies of scale*. Kota-kota besar tumbuh dengan cepat sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang sering mengabaikan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada daerah *hinterland*.

Diberlakukannya Undang-Undang mengenai Otonomi Daerah akan berimplikasi luas dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintahan Daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar di dalam merencanakan arah pembangunannya. Di sisi lain, pemerintah daerah akan semakin dituntut untuk lebih mandiri di dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan di daerahnya. Otonomi daerah juga mengisyaratkan semakin pentingnya pendekatan pembangunan dengan basis pengembangan wilayah dibanding pendekatan pembangunan dengan pendekatan sektoral. Pembangunan berbasis pengembangan wilayah memandang pentingnya keterpaduan intersektoral, interspasial, serta antar pelaku-pelaku pembangunan di dalam dan antar daerah.

Mc. Gee (1991) menyatakan bahwa proses perkembangan dan urbanisasi kota-kota di Indonesia (terutama di Pulau Jawa) ditandai oleh adanya restrukturisasi internal kota-kota besarnya. Kota-kota di Indonesia pada beberapa dekade mendatang cenderung akan terus berkembang baik secara demografis, fisik, maupun spasial. Fenomena menyusutnya penduduk perdesaan dalam dua dekade yang lalu akibat adanya migrasi besar-besaran penduduk perdesaan. Hal ini memberi indikasi bahwa kota-kota di Indonesia akan berkembang pesat baik secara demografis maupun spasial di masa mendatang.

Perkembangan jumlah penduduk juga dapat memberikan suatu gambaran bagaimana perkembangan suatu perkotaan terjadi. Pertumbuhan kepadatan penduduk yang pesat menekan eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan berpeluang terlampaui. Hal ini mendorong adanya perambahan

pemanfaatan ruang pada kawasan yang seharusnya dikonservasi dan dilindungi, seperti konversi lahan pertanian sawah dan bantaran sungai menjadi perumahan dan industri.

Perencanaan wilayah di Indonesia setidaknya memerlukan unsur-unsur yang urutan/langkah-langkahnya meliputi: (a) Gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan (baik jangka pendek, menengah, maupun panjang). Untuk dapat menggambarkan kondisi saat ini (*existing condition*) dan permasalahan yang dihadapi diperlukan pengumpulan data terlebih dahulu (data primer dan sekunder); (b) Penetapan visi, misi, dan tujuan umum; (c) Identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan dihadapi pada masa mendatang; (d) Pemroyeksian berbagai variabel terkait, baik yang dapat dikendalikan maupun yang di luar jangkauan pengendalian rencana; (e) Penetapan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (berupa tujuan yang dapat diukur); (f) Mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran tersebut (dengan memperhatikan keterbatasan dana dan faktor produksi yang tersedia);

4.2 Faktor Perencanaan

Perencanaan wilayah adalah proses untuk mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan serta menetapkan lokasi dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan wilayah merupakan suatu agenda atau rancangan antara manusia dengan lingkungan yang dengan sengaja dibuat untuk menambah, mengurangi, memperbaiki, ataupun melengkapi sesuatu dengan harapan memperoleh hasil maksimal dan efisien meliputi masalah

ekonomi dan pembangunan wilayah. Defenisi yang sangat sederhana mengatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Beberapa tahapan dalam perencanaan, antara lain : (1) Identifikasi Persoalan; (2) Perumusan tujuan umum dan sasaran khusus hingga target-target yang kuantitatif, (3) Proyeksi keadaan di masa akan datang, (4) pencarian dan penilaian berbagai alternative; dan (5) penyusunan rencana terpilih. Dalam penyusunan perencanaan wilayah terdapat empat elemen dasar, yaitu sebagai berikut: (1) Merencanakan berarti memilih; (2) Perencanaan merupakan alat pengkondisian sumber daya alam; (3) Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan; dan (4) Perencanaan berorientasi terhadap masa depan (Tarigan, R., 2005).

Syarat-syarat perencanaan yang baik antara lain adalah logis, masuk akal, realistic (nyata), sederhana, sistematis dan ilmiah, obyektif, fleksibel, manfaat, dan optimasi dan efisiensi

Dalam perencanaan wilayah terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi faktor-faktor perencanaan berupa sumberdaya alam dan SDM yang disertai dengan ketercukupan modal dan keberadaan teknologi, ideologi dan falsafah, sasaran, dasar Kebijakan, data dan metode, kondisi lingkungan, sosial, politik dan budaya guna memperoleh kelancaran dalam perencanaan hingga pembangunan wilayah.

Sebagaimana layaknya suatu aktivitas yang terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan dan selalu bersifat dinamis, keberhasilan atau kegagalan program perencanaan pembangunan selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tersebut secara khusus dapat berbeda tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang berlaku di daerah perencanaan. Substansi permasalahan yang berbeda antara satu

daerah dan daerah lainnya dapat menyebabkan berbedanya faktor-faktor dimaksud.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan wilayah antara lain meliputi : (1) Kestabilan politik dan keamanan dalam negeri, (2) Dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, (3) Realistis, sesuai dengan kemampuan sumber daya dan dana, (3) Koordinasi yang baik, (4) *Top down* dan *bottom up planning*, (5) Sistem pemantauan dan pengawasan yang terus menerus, dan (6) Transparansi dan dapat diterima oleh masyarakat.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu program perencanaan wilayah dengan merujuk pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan wilayah yang antara lain meliputi :

1) Faktor Lingkungan Kestabilan dalam Negeri

Faktor-faktor lingkungan bisa berasal dari luar (eksternal) maupaun dari dalam (internal). Faktor eksternal biasanya datang dari wilayah tetangga, atau pengaruh global yang berkembang dalam lingkup nasional maupun internasional. Sedangkan faktor internal merupakan pengaruh yang datang dari dalam wilayah perencanaan sendiri. Unsur-unsur yang berada dalam faktor lingkungan ini dapat dibagi menurut bidang :

a. Sosial

Hampir di setiap negara berkembang, perencanaan wilayah selalu diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi yang ideal, masyarakat dapat menjadi tujuan/objek dari sebuah perencanaan sekaligus juga menjadi aktor atau subjek perencanaan. Dalam konteks perencanaan sosial, Schoorl (1984) menyatakan bahwa “perencanaan sosial dapat berarti perencanaan untuk masyarakat (*societal planning*)”. Ini berarti bahwa perencanaan sosial memiliki

tujuan-tujuan sosial yang khas dalam suatu strategi pembangunan dimana masyarakat harus bisa menerimanya sebagai upaya untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan.

Kondisi sosial masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program perencanaan wilayah. Kondisi sosio-ekonomi masyarakat yang menjadi gambaran tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya; stratifikasi sosial yang membentuk hubungan hierarkis dalam proses kemasyarakatan, tingkat pendidikan, dan fakta-fakta sosial lainnya merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menyusun perencanaan wilayah.

b. Budaya

Faktor budaya yang ada dalam kelompok masyarakat tidak dapat diabaikan dalam menyusun perencanaan wilayah yang akan diimplementasikan dalam bentuk proses pelaksanaan pembangunan. Pentingnya masalah ini sudah banyak di kemukakan oleh para administrasi pembangunan, karena hal ini sangat disadari sebagai salah satu faktor yang cukup urgen untuk diperhatikan oleh para perencana wilayah.

Masalah budaya (*Culture*) yang turut mewarnai kebiasaan hidup masyarakat yang dalam suatu daerah tertentu juga mempunyai andil yang cukup besar terhadap perencanaan wilayah. Bila ingin mencapai sasaran yang diharapkan, perencanaan wilayah harus mempertimbangkan faktor budaya/ culture yang berlaku di dalam masyarakat setempat.

Dalam banyak hal, faktor budaya ini sering disatukan dengan faktor sosial, karena keterkaitan antara keduanya sangat erat dan bahkan sangat sulit untuk

dipisahkan. Kehidupan sosial kemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat, yang terus berkembang menjadi nilai-nilai budaya yang melekat dalam interaksi antar anggota masyarakat.

c. Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan masalah pembangunan disamping faktor-faktor lainnya. Para ahli studi pembangunan bahkan meyakini pentingnya faktor ini dalam proses pembangunan sebagai faktor yang mempunyai determinan tinggi. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan yang banyak terjadi di negara-negara berkembang, dimana pada umumnya mereka memberikan prioritas yang tinggi terhadap pembangunan ekonomi. Keadaan ekonomi yang meningkat diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan dibidang lainnya, sehingga lebih mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Stabilitas ekonomi menjadi target utama yang harus di wujudkan melalui proses pembangunan, karena dengan adanya stabilitas ekonomi yang dinamis, proses pembangunan akan berhasil dengan baik, walaupun hal itu tidak dapat dilepaskan dari adanya stabilitas di bidang lainnya.

d. Politik

Faktor politik merupakan faktor lain yang dipandang dapat mempengaruhi jalannya proses pembangunan. Keterkaitan tersebut oleh para ahli politik dan pembangunan terutama dapat dilihat dari adanya ideologi yang dianut oleh suatu negara. Ideologi sebagai

falsafah negara dipandang sebagai unsur yang memberikan pengaruh kuat terhadap pola, sistem dan kultur yang diterapkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan suatu negara.

e. Administrasi

Mekipun merupakan aspek yang berbeda dengan aspek politik, aspek administrasi oleh para ahli cenderung tidak dipisahkan dari aspek politik. Dalam kesempatan ini yang penting dikemukakan adalah bahwa aspek tersebut juga memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya proses pembangunan, dan secara keseluruhan berpengaruh pula terhadap proses perencanaan.

2) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas perencanaan yang baik akan lebih memungkinkan tercipta oleh SDM yang tepat dan berkualitas, sementara itu perencanaan yang baik juga lebih memungkinkan untuk dapat diimplementasikan dalam program-program pembangunan. Dengan demikian, kualitas perencanaan yang baik sangat tergantung pada kemampuan, keahlian, dan keluwesan oleh para perencananya disamping Teknik dan metode yang digunakan.

Secara keseluruhan pemikiran yang mencerminkan menyeluruh (*holistic thinking*) dimana ia memandang seorang perencana pembangunan daerah harus mengenal wilayahnya, masalah-masalah yang ada didalamnya, kebutuhan masyarakat, memahami adanya kebijaksanaan pemerintah baik lokal maupun nasional, memadukan kepentingan lokal dan nasional, memprediksi berbagai kemungkinan secara multi dimensional (sosial, ekonomi, politik, administrasi, dan sebagainya) merumuskan rancangan program, mengimplementasikannya serta mengevaluasinya.

3) Faktor Sistem Yang Digunakan

Yang dimaksud dengan faktor perencanaan disini adalah aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu sebagai dasar atau landasan pelaksanaan perencanaan pembangunannya. Friedman (1987) mengemukakan bahwa ada berbagai jenis perencanaan pembangunan yang terbagi menurut sudut pandang yang berbeda, seperti :

4) Faktor Perkembangan Ilmu Dan Teknologi

Kita mengetahui betapa besar pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap proses pembangunan. Kita dapat mengatakan bahwa yang terjadi adalah proses saling mempengaruhi, yang akan terus berlanjut tanpa mengenal batas akhir. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong, dan pembangunan yang berhasil akan mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Bintoro mengatakan, “ilmu dan teknologi dapat merupakan sumber yang penting dalam proses perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan.”

5) Faktor Pendanaan

Faktor pendanaan pada dasarnya merupakan faktor yang sudah *given*. Artinya hal itu memang harus ada untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Namun ada satu yang perlu disampaikan disini bahwa dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal ini harus benar-benar diperhatikan sebagai suatu hal yang sangat penting. Perencanaan pembangunan daerah adalah kegiatan yang “mahal”. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar serius, dalam arti pihak-pihak yang terkait, termasuk para perencananya harus fokus terhadap tugasnya, punya komitmen terhadap tujuan

yang ingin dicapai dan harus bekerja keras, teliti serta tidak terburu-buru dalam penyusunannya.

Dengan kata lain ini berarti bahwa *cost and benefits* yang dihasilkan harus seimbang, sehingga tidak terjadi pemborosan, apalagi menghasilkan rencana yang sia-sia (tidak akurat). Produk perencanaan pembangunan daerah harus menjadi produk hukum, politik, dan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk keputusan atau kebijaksanaan pemerintah daerah sebagai landasan/acuan pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Selain itu dalam perencanaan pembangunan daerah harus sudah diperhitungkan pendanaannya mulai dari berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan, sumber pendanaan, dan sistem pengelolaannya. Ini penting demi efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.

6) Faktor Potensi Sumber daya Alam

Potensi wilayah berkaitan dengan kebermanfaatan sumber daya bagi wilayah bersangkutan maupun dalam kaitan dengan hubungan antarwilayah. Potensi wilayah merupakan suatu sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi suatu wilayah tersebut baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sumber daya manusia ialah potensi manusia itu sendiri yang dapat mengolah sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam di permukaan bumi tersebar tidak merata, ada yang berlimpah dan ada pula yang minim akan sumber daya alam, bahkan ada yang tidak memiliki sama sekali. Hal ini menyebabkan terjadinya saling ketergantungan antarwilayah sehingga dibutuhkan adanya bentuk kerja sama, saling menghormati, dan saling membantu. Yang dimaksud sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat digunakan untuk kepentingan hidupnya. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan peningkatan berbagai kebutuhan, mulai dari

pangan, sandang, maupun permukiman. Dibutuhkan juga sumber daya alam lainnya seperti tanah, air, energi, mineral, dan lainnya yang diambil dari persediaan sumber daya alam di bumi. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan untuk kepentingan manusia menyebabkan menipisnya persediaan sumber daya alam, bahkan sisa-sisa pengelolaan berbagai barang akhirnya menimbulkan bencana bagi kehidupan manusia.

Pembangunan yang dilakukan oleh setiap negara ternyata dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Sejalan dengan itu eksploitasi sumber daya alam semakin meningkat. Akibatnya persediaan sumber daya alam makin terkuras dan pencemaran lingkungan semakin meningkat. Hal ini terjadi tidak hanya pada negara maju, tetapi juga terjadi pada negara berkembang, termasuk Indonesia. Negara maju masih meneruskan pola hidupnya yang mewah dan boros. Jumlah penduduk, kendaraan bermotor, dan konsumsi energi terus meningkat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Sementara negara berkembang berusaha keluar dari kemiskinannya melalui peningkatan pembangunan. Untuk itu, eksploitasi sumber daya alam dilakukan, baik untuk kebutuhan dalam negeri, maupun untuk ekspor. Eksploitasi sumber daya alam yang terus-menerus dan kurangnya kesadaran terhadap lingkungan menyebabkan bencana lingkungan yang terjadi di berbagai bagian bumi makin beragam (Soegimo, 2009).

4.3 Penutup

Perencanaan dan pengembangan wilayah adalah suatu sistem yang padu dan mutlak terjadi pada wilayah di suatu negara. Dikatakan sebagai suatu sistem yang padu dikarenakan suatu perencanaan dan pengembangan wilayah memiliki komponen, unsur-unsur, dan langkah-langkah yang dirancang serta

dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Perencanaan wilayah merupakan langkah awal suatu pergerakan yang berisikan rancangan untuk bisa memajukan wilayah. Pengembangan wilayah adalah suatu langkah nyata yang diterapkan pada wilayah untuk memaksimal dan mengoptimalkan daya guna lahan pada suatu wilayah guna membuat wilayah tersebut menjadi maju dan berkembang serta mampu bersaing seiring maraknya globalisasi. Hasil atas perencanan dan pengembangan wilayah beragam bergantung pada hasil pembangunan baik fisik maupun nonfisik pada wilayah tersebut.

Latihan Soal

- 1) Apa yang dimaksud perencanaan wilayah dan kota?
- 2) Apa yang mempeharuhi perencanaan wilayah dan kota?
- 3) Jelaskan apa apa saja aspek yang dipelajari dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota?
- 4) Mengapa Perencanaan Wilayah dan Kota di perlukan?

DAFTAR PUSTAKA

- Firman, T. 1992. The Spatial Pattern of Urban Population Growth in Java 1980-1990. *Bulletin of Indonesian Economics Studies* 28 (2)
- Friedman, J. 1987. *Planning in the Public Domain : From Knowledge to Action*, Priceton University Press, Princeton.
- McGee, T.G. 1987. "Urbanisasi or Kotadesasi" : The Emergence of New Regions of Economics Interaction in Asia', Honolulu Environment and Policy Institut, pp. 93-108.
- _____. 1991. Southeast Asian Urbanization: Three Decades of Changes, *Prisma*, 51, pp.2-6.
- _____. 1991. The Future of the Asian City : the Emergence of Desakota Regions. *Proceeding International Seminar and Workshop on the South East Asian City of the Future*, Jakarta, January 21-25, 1990
- Schoorl J.W. 1984 *Modernisasi : Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang (Diterjemahkan Oleh R.G. Soekadijo)*, Gramedia, Jakarta.
- Soegimo, D. 2009. *Geografi*. Jakarta: Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Tarigan, R. 2005. *Perencanaan pembangunan wilayah / Robinson Tarigan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. *Tentang Penataan Ruang*. Jakarta

BAB 5

PERMASALAHAN PERENCANAAN WILAYAH

Oleh Suharno

5.1 Peningkatan Jumlah Penduduk, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan

Kawasan perkotaan di Indonesia saat ini cenderung mengalami permasalahan yang khas, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, terutama akibat urbanisasi, yang membuat pengelolaan ruang kota menjadi lebih sulit. Selain itu, daya dukung lingkungan dan sosial yang ada juga semakin menurun, sehingga tidak dapat memenuhi permintaan akibat tekanan penduduk.

Tidak mengherankan juga jika arus migrasi ke kota-kota besar semakin meningkat, terutama bagi tenaga kerja wanita yang bekerja di industri tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan pesat jumlah penduduk di kota-kota tersebut, terutama di pinggiran (Firman, 2003, Häkli, 2020). Untuk kasus Jabotabek, hal ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di kabupaten dan kota sekitar Jakarta, seperti Tangerang, Bekasi, dan Depok.

Data yang ada menunjukkan bahwa jumlah penduduk perkotaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Pada tahun 1980 penduduk perkotaan baru mencapai 32,8 juta jiwa atau 22,3 persen dari total penduduk nasional. Pada tahun 1990 jumlah ini meningkat menjadi 55,4 juta jiwa atau 30,9 persen, dan menjadi 90 juta jiwa atau 44 persen pada tahun 2002. Angka ini mencapai 154,2 juta jiwa atau 56,4 persen dari jumlah penduduk nasional pada tahun 2019. Angka ini diperkirakan akan

meningkat pada tahun 2025 mencapai 170,4 juta jiwa atau 59,3 persen dari total penduduk Indonesia sebanyak 287 juta jiwa (Statistik, 2021).

Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan dari waktu ke waktu akan berimplikasi pada tingginya tekanan pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian khusus, terutama yang berkaitan dengan penyediaan kawasan pemukiman, fasilitas umum dan sosial, dan ruang terbuka publik (ruang terbuka) di perkotaan.

Jumlah penduduk yang besar, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan menjadi faktor permasalahan penataan ruang di Indonesia. Berdasarkan kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal, banyak penduduk menjadikan lahan pertanian yang subur difungsikan sebagai tempat tinggal atau pemukiman. Selain rumah, kebutuhan pokok manusia adalah pangan.

Dengan berkurangnya lahan sawah atau lahan pertanian secara besar-besaran, berarti sumber daya dan bahan pokok harus ditanam di tempat lain, dan hal ini berdampak pada peningkatan harga bahan pokok. Buruknya tata ruang dan wilayah menjadi salah satu penyebabnya. Dalam hal pelaksanaan tata ruang dan wilayah yang baik, Indonesia masih memiliki sejumlah permasalahan.

Pemerataan penduduk perlu dilakukan, dengan cara transmigrasi agar penduduk tidak terkonsentrasi pada satu daerah, dan daerah sebagai tempat transmigran juga mampu memperbaiki masalah kemiskinan (banyak menyediakan lapangan pekerjaan) sehingga penduduk akan lebih menyebar.

5.2 Kesenjangan Tata Ruang Antar Wilayah

Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) telah ditetapkan, Indonesia yang memuat 112 wilayah dengan dua pertimbangan utama (regionalisasi dan pemerataan wilayah). Kesenjangan harus

diperkecil dengan akses yang mudah sehingga antar daerah mudah untuk disamakan (Nasional, 2008).

Penataan ruang kawasan perkotaan memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan ruang publik, khususnya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Penataan ruang kota harus dimulai dengan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang secara alami harus diselamatkan (kawasan lindung) untuk menjamin kelestarian lingkungan, dan kawasan-kawasan yang secara alami rawan bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan bencana alam lainnya. Kawasan-kawasan inilah yang harus kita kembangkan sebagai ruang terbuka, baik hijau maupun non hijau.

Secara hierarkis, struktur pelayanan perkotaan harus mampu mengakomodir ruang terbuka publik dalam penataan ruang kota di setiap tingkatan. Mulai dari lingkungan terkecil (RT/RW), kelurahan, kecamatan hingga tingkat metropolitan, elemen ruang terbuka hijau yang relevan harus disediakan.

Permasalahan yang kita hadapi berkaitan dengan ruang terbuka publik atau ruang terbuka hijau pada umumnya terkait dengan beberapa permasalahan perkotaan, seperti menurunnya kualitas lingkungan yang dapat berdampak pada perubahan perilaku sosial masyarakat yang cenderung kontra produktif dan merusak, serta munculnya banjir dan tanah longsor. Dari aspek kondisi lingkungan, rendahnya kualitas airtanah, tingginya pencemaran udara dan kebisingan di perkotaan merupakan hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan keberadaan ruang terbuka hijau secara ekologis. Kondisi ini secara ekonomi juga dapat menurunkan tingkat produktivitas, dan menurunkan tingkat kesehatan dan harapan hidup masyarakat, bahkan menyebabkan kelainan genetik dan menurunkan tingkat kecerdasan anak pada generasi mendatang akibat paparan polusi udara yang berlebihan. Selain itu, dari aspek perilaku sosial, tingginya tingkat kriminalitas dan konflik horizontal

antarkelompok masyarakat perkotaan juga secara tidak langsung disebabkan oleh minimnya ruang perkotaan yang dapat menyalurkan kebutuhan interaksi sosial dan penghilang stres yang dialami masyarakat perkotaan. Selain itu, tingginya frekuensi banjir dan tanah longsor di perkotaan saat ini juga disebabkan oleh terganggunya sistem tata air akibat terbatasnya daerah resapan air dan tingginya volume air permukaan.

Sementara itu, secara teknis permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan ruang terbuka hijau di perkotaan antara lain belum optimalnya penyediaan ruang terbuka hijau baik secara kuantitatif maupun kualitatif, lemahnya kelembagaan dan sumber daya manusia, kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau, dan terbatasnya ruang/lahan di kawasan perkotaan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.

Belum optimalnya optimalisasi ketersediaan ruang terbuka hijau terkait dengan belum memadainya proporsi luasan yang dialokasikan untuk ruang terbuka, serta rendahnya rasio jumlah ruang terbuka yang tersedia per kapita. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kenyamanan kota, penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat dan secara tidak langsung menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya lokal (artefak alam dan nilai sejarah).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban perkotaan adalah dengan mengembangkan kawasan perdesaan sehingga arus urbanisasi ke perkotaan dapat dikurangi, misalnya dengan mengembangkan kawasan agropolitan (Suharno, 2016). Dengan berkembangnya kawasan agropolitan maka dikembangkan sarana produksi di desa untuk mengolah bahan baku yang dihasilkan di desa, sehingga akan terjadi nilai tambah di desa yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain mengembangkan sarana produksi, sarana dan prasarana penunjang lainnya juga dikembangkan, sehingga

kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan yang bernuansa pertanian.

Selain itu, untuk mendukung kota yang telah berkembang menjadi sangat besar (metropolitan) yang notabene memiliki berbagai permasalahan yang sangat kompleks, maka perlu dikembangkan kota-kota satelit di sekitarnya dengan menjalankan fungsi-fungsi tertentu serta dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai. sehingga mampu menarik sebagian penduduk yang semula berorientasi pada kota inti sehingga beban kota inti menjadi berkurang.

5.3 Ancaman Bencana Alam

Bencana alam yang kerap terjadi di negeri ini juga menjadi salah satu penyebab krisis tata ruang di Indonesia. Indonesia perlu bertindak bijak dalam penanggulangan bencana melalui penataan ruang. Hal ini bertujuan untuk sepenuhnya menghilangkan atau setidaknya mengurangi risiko bencana di masa mendatang, serta meminimalkan kerentanan serta potensi dampak dan kerugian. Indonesia perlu mengubah penanggulangan bencana dengan instrumen penataan ruang, yang bertujuan tidak hanya untuk menghilangkan sepenuhnya risiko dari bencana, tetapi untuk mengurangi kerentanan, meminimalkan dampak dan potensi kerugian akibat bencana yang muncul (Wikantiyoso, 2010).

5.4 Krisis Pangan, Energi, Air

Krisis pangan dapat dihilangkan dengan upaya melestarikan sawah abadi untuk melindungi sawah beririgasi. Di sisi lain, dengan mengoptimalkan lahan cadangan yang ada, kita bisa meminimalisir kemungkinan krisis yang akan terjadi.

Kebijakan pelestarian sawah abadi sebagai pelindung sawah beririgasi untuk mengatasi krisis pangan. Selain kebijakan pelestarian sawah abadi, hal ini juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan lahan cadangan yang berada di luar Jawa, seperti

Bangka, Belitung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Nusa Tenggara Barat (Warsilah dan Wardiat, 2017).

5.5 Perubahan Iklim

Adaptasi perubahan iklim dalam tata ruang perlu diarusutamakan ke dalam perubahan iklim dalam sistem tata ruang nasional. Asas pengarusutamaan perubahan iklim dalam sistem penataan ruang nasional merupakan jaminan bahwa penataan ruang yang dilakukan telah memperhitungkan proyeksi perubahan iklim ke depan dan jaminan bahwa penataan ruang yang dilakukan tidak meningkatkan kerentanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim, serta meningkatkan ketahanan kawasan terhadap dampak perubahan iklim masa depan. Diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi. Dalam hubungannya dengan mitigasi, penataan ruang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengurangan emisi karbon (Sitadevi, 2016).

5.6 Kerusakan Ekologis

Perubahan penggunaan lahan menyebabkan kerusakan ekologis. Kerusakan ekologis ditandai dengan: penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, penurunan luas kawasan lindung, daerah resapan air dan peningkatan daerah aliran sungai (DAS) kritis. Jejak ekologis merupakan gambaran besarnya lahan produktif (darat dan laut) yang diperlukan untuk kelangsungan hidup suatu populasi dalam memproduksi dan mengkonsumsi semua sumber daya termasuk limbah yang dihasilkan yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelestarian suatu wilayah. Indonesia harus menata strategi pembangunannya agar tidak defisit (Sundari, 2010).

5.7 Indonesia Belum Memiliki Perencanaan Yang Terintegrasi

Penataan ruang hendaknya juga selalu terintegrasi dengan rencana pembangunan (Winarni *et al*, 2021). Penataan ruang yang tidak boleh digabungkan dengan rencana pembangunan (Hoernig, 2004). Akibatnya, terjadi kerancuan karena tata ruang tidak dijadikan acuan dalam pembangunan. Perencanaan tata ruang biasanya lebih dipengaruhi oleh keputusan politik. Tak heran jika stabilitas politik di negeri ini masih jauh dari baik. Banyak partai politik atau pihak yang bertanggung jawab justru mengeluarkan kebijakan yang tidak objektif.

Terutama di bidang penataan ruang. Penataan ruang harus objektif berdasarkan karakteristik daerah, bukan kebijakan politik. Jika hal ini terus terjadi, maka akan melahirkan tata guna lahan yang buruk. Hal ini terjadi biasanya dengan kesepakatan dan pemberian uang secara sembunyi-sembunyi atau sering disebut dengan suap atau korupsi (Crane, 1995).

5.8 Ketegasan Dalam Menjalankan Aturan Masih Lemah

Kurangnya ketegasan hukum bagi pelanggar tata ruang adalah salah satunya. Masyarakat yang melakukan penyimpangan tata ruang hampir tidak pernah atau jarang mendapat tindakan tegas dan sanksi. Akibatnya, penyimpangan pemanfaatan ruang dianggap remeh dan tidak berarti. Kondisi seperti ini mengakibatkan buruknya implementasi rencana tata ruang wilayah (Crane, 1995).

5.9 Pemerintah Kurang Memiliki Kemampuan Untuk Mengantisipasi Masalah Di Masa Depan

Di masa lalu, penataan ruang dan pembangunan wilayah dan kota hanya dilihat sebagai fenomena internal, namun kini dengan perekonomian global yang semakin terintegrasi, harus diakui bahwa penataan ruang tidak semata-mata merupakan fenomena internal, tetapi sangat dipengaruhi dinamikanya. oleh faktor global (Crane, 1995).

Adanya konflik antar daerah: konflik pemerintah pusat-daerah, konflik antar daerah dan pengaruh globalisasi turut menentukan pola penataan ruang di Indonesia. Situasi ini berimplikasi pada pengembangan tata ruang wilayah dan kota pada periode boom ekonomi (1980-pertengahan 1990-an), periode krisis ekonomi (1998-1999), periode pasca krisis (era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal), dan pasca pandemi Covid-19.

5.10 Belum Semua Wilayah Indonesia Memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Yang Sesuai Dengan RTRW Nasional

Menurut catatan Kementerian Pekerjaan Umum, pada tahun 2015 hanya 51% dari 34 provinsi di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tanpa peraturan daerah yang jelas, pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam mengatur penetapan suatu daerah dan menindak jika terjadi pelanggaran RTRW di daerahnya.

Mungkin tidak terbayangkan 30 tahun lalu, gejala globalisasi ekonomi melanda dunia dengan intensitas yang sangat besar, memasuki abad ke-21. Globalisasi yang pada dasarnya ditandai dengan arus bebas modal, manusia, barang, dan informasi, pada gilirannya berimplikasi pada semakin terintegrasinya sistem sosial ekonomi dan politik global. Seperti yang dinyatakan oleh

Castells (1996) bahwa ruang tempat telah berubah menjadi ruang arus. Hal ini tentunya memberikan dampak yang luar biasa bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, sehingga permasalahan pembangunan yang dihadapi negara tersebut semakin rumit.

Globalisasi tidak mengenal batas yurisdiksi nasional atau provinsi (Sub Regional). Contohnya dapat dilihat pada hubungan berbagai daerah (negara) yang berbatasan langsung, misalnya Hong Kong (sebelum menjadi bagian dari Cina) dengan beberapa provinsi di Cina Selatan, seperti Ghuang Zhu (Xu, 2008); Meksiko dengan Amerika Serikat, khususnya di sekitar negara bagian Texas dan California; dan Segitiga Pertumbuhan Sijori (Singapura-Johor-Riau).

Globalisasi telah menghasilkan restrukturisasi kota dan wilayah di seluruh dunia (Sassen, 2000). Kota dan daerah terintegrasi dalam suatu jaringan, yang saling terkait erat satu sama lain. Namun, kota dan daerah yang terkena dampak dan terintegrasi ke dalam jaringan bersifat selektif, artinya tidak semua kota atau daerah memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam jaringan. Hanya kota dan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif yang bisa masuk. Sementara itu, persaingan antar kota dan daerah untuk menarik investasi terjadi di dalam jaringan. Artinya fungsi dan peran kota dan daerah dapat naik turun sesuai dengan kinerjanya. Proses ini, pada gilirannya, berdampak pada restrukturisasi tata ruang kota dan wilayah.

Penutup globalisasi industri abad ke-20 telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan sosial ekonomi dan fisik kota dan daerah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Hal ini antara lain tercermin dari meningkatnya kebutuhan lahan untuk kawasan industri dan pemukiman baru, sebagai akibat dari meningkatnya investasi, terutama modal asing, di sektor industri, jasa, dan properti. Hal ini sangat mudah dipahami karena industri manufaktur dan properti sangat mengelompok di kota-kota besar

dan sekitarnya, karena fasilitasnya berada di sana. Alhasil, kota-kota besar di Jawa seperti Jabotabek, Gerbangkertasusila, dan Bandung Raya mengalami perkembangan yang luar biasa. Juga mudah dipahami bahwa pembangunan secara fisik terjadi di pinggiran kota-kota besar ini, karena faktor 'kemudahan' memperoleh tanah yang lebih murah.

Kawasan pusat kota juga telah beralih fungsi secara masif, dari pusat industri manufaktur menjadi pusat kegiatan bisnis, keuangan, dan jasa. Industri manufaktur bergeser ke arah pinggir kota. Pemukiman di pusat kota berubah fungsi menjadi kawasan bisnis, supermall, perkantoran dan sebagainya, sedangkan permukiman bergeser ke arah pinggiran kota. Namun perlu diperhatikan bahwa perkembangan kegiatan industri di pinggiran kota besar merupakan industri *footloose*, yaitu jenis industri yang keterkaitannya dengan bahan baku lokal dan ekonomi lokal sangat lemah, misalnya industri barang elektronik, garmen, sepatu dan sebagainya, dimana bahan baku bahan bakunya dipasok dari luar negeri. Keterkaitan dengan ekonomi lokal terbatas pada penyediaan tenaga kerja murah.

Fenomena keruangan lain yang dapat diamati saat itu bahkan hingga saat ini adalah alih fungsi lahan pertanian subur di pinggiran kota menjadi kawasan industri dan permukiman baru. Hal ini terjadi dalam skala masif dan tidak terkendali, sementara penataan ruang wilayah hanya macan kertas. Konversi ini bahkan terjadi di daerah-daerah yang berfungsi sebagai pelindung, seperti Bopunjur (Bogor-Puncak-Cianjur) dan Bandung Utara. Penataan ruang ternyata sangat dikuasai oleh para pengembang yang hanya berorientasi pada usaha pertanahan daripada pengembangan tata ruang wilayah. Saat itu pemerintah kota dan kabupaten serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) tampak tak berdaya menghadapi tekanan dari pengembang. Contohnya adalah rencana pembangunan permukiman kontroversial di Jonggol, yang

direncanakan menjadi pusat pemerintahan nasional. Namun, pada akhirnya rencana kontroversial ini dibatalkan oleh pemerintah.

Bentuk penataan ruang untuk pengembangan wilayah dan kota di Jawa ditandai dengan intensifikasi hubungan perkotaan-perdesaan. Perbedaan fisik antara kota dan desa semakin tidak jelas. Demikian pula kegiatan sosial ekonomi masyarakat desa tidak selalu identik dengan pertanian, tetapi sudah merupakan campuran dari kegiatan non pertanian. Kehidupan masyarakat pedesaan juga diwarnai dengan semakin berkembangnya kegiatan lapangan kerja di luar pertanian. Hal ini disebabkan semakin terbukanya kesempatan kerja di luar pertanian, sedangkan keterbatasan lahan pertanian yang mereka miliki tidak memungkinkan mereka untuk dijadikan sebagai mata pencaharian yang utuh.

Dapat dilihat juga bahwa perkembangan sosial-ekonomi dan fisik daerah pinggiran kota telah membentuk kecenderungan pengembangan jalur-jalur di daerah perkotaan yang menghubungkan kota-kota besar, seperti jalur Jakarta-Bandung; Semarang-Solo-Yogyakarta; Semarang-Surabaya dan lainnya. Pembangunan ini berjalan seolah tanpa kendali, karena memang rencana tata ruang hampir tidak berdaya untuk mengendalikannya.

Di daerah luar Jawa, yang menonjol adalah pesatnya perkembangan wilayah Pulau Batam. Tidak mengherankan, karena Batam adalah bagian dari Segitiga Pertumbuhan Sijori (Singapura-Johor-Riau). Kelangkaan lahan di Singapura menyebabkan investor menanamkan modalnya di Batam. Proses ini didukung oleh kerjasama Singapura, Malaysia dan Indonesia. Pada gilirannya, hal ini menyebabkan Batam berkembang menjadi konsentrasi kegiatan industri di luar Pulau Jawa. Sementara itu, Batam juga mengalami laju pertumbuhan penduduk yang pesat, yaitu 15,6 persen per tahun dalam kurun waktu 1990-2000, karena pesatnya laju pendatang yang tertarik oleh kesempatan kerja di sana,

terutama dari Pulau Jawa. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan perkotaan di Batam, seperti perumahan liar, kriminalitas, dan lain-lain.

Daerah di luar Jawa yang terkenal untuk dikembangkan adalah Kalimantan Timur yang sedang berkembang karena potensi minyak, gas bumi dan perikanan. Proporsi penduduk perkotaan, yang sering disebut dengan tingkat urbanisasi, provinsi ini mencapai 57,6 persen pada tahun 2000, suatu angka yang tinggi dibandingkan provinsi lain, kecuali DKI Jakarta. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,74 persen per tahun dalam kurun waktu 1990-2000, suatu angka yang tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia secara keseluruhan sebesar 1,35 persen per tahun. Hal ini mencerminkan perkembangan kegiatan ekonomi di sektor migas, serta sumber daya mineral, yang pada dasarnya didorong oleh investasi dari luar negeri. Hal ini juga mencerminkan bagaimana arus investasi, sebagai bagian dari globalisasi, mempengaruhi perkembangan di provinsi dan rencana tata ruang nasional. Perkembangan ini pada gilirannya telah mendorong pertumbuhan kota Balikpapan dan Samarinda.

Provinsi lain yang berkembang pesat akibat dampak global antara lain Bali dan Sumatera Utara. Bali yang merupakan salah satu pusat pariwisata dunia telah mencapai tingkat urbanisasi hampir 50 persen pada tahun 2000, yang berarti sekitar separuh penduduk Bali tinggal di daerah yang dikategorikan perkotaan. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung yang menjadi lokasi hotel dan kegiatan wisata lainnya mencapai 2,77 persen per tahun selama periode 1990-2000. Perkembangan kegiatan ekonomi di Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata. Jelas bahwa guncangan apa pun yang memengaruhi pariwisata, seperti terorisme atau wabah penyakit, memengaruhi perkembangan ekonomi di Bali. Misalnya, peristiwa bom Bali dan pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap perekonomian

Bali. Sementara itu, perkembangan perekonomian Provinsi Sumatera Utara ditopang oleh potensi perkebunan khususnya kelapa sawit.

Provinsi-provinsi yang berada di perbatasan juga berpotensi memanfaatkan dampak positif globalisasi, seperti Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, dan Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina. Namun, hingga saat ini tampaknya dampak tersebut belum bekerja secara maksimal.

Masalah perencanaan wilayah meliputi: peningkatan jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Permasalahan lainnya terkait dengan tingginya laju konversi atau alih fungsi lahan, terutama lahan yang seharusnya dilindungi agar tetap hijau menjadi kawasan terbangun, berdampak pada rendahnya kualitas lingkungan perkotaan. Lemahnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat terhadap aspek penataan ruang juga menjadi permasalahan, seperti munculnya permukiman kumuh di bantaran sungai dan munculnya kemacetan lalu lintas akibat tingginya sekat-sekat jalan pada ruas-ruas jalan tertentu.

Permasalahan di atas merupakan sebagian kecil dari permasalahan yang dapat timbul akibat buruknya tata ruang dan tata wilayah. Jika penataan ruang dan wilayah tidak dilakukan dengan baik, mungkin di masa depan, dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, lahan pertanian dapat habis untuk membangun perumahan, yang akan mengakibatkan krisis pangan.

Kesimpulannya, penataan ruang di Indonesia belum optimal menjadi instrumen integrasi program yang mendorong terwujudnya pembangunan yang efektif dan efisien. Penataan ruang belum sepenuhnya layak digunakan sebagai instrumen yang mampu menjawab persoalan dan permasalahan pembangunan wilayah dan perkotaan. Penataan ruang di Indonesia belum

didukung oleh lembaga yang dapat mengkoordinasikan berbagai sektor. Kondisi lain, masih belum optimalnya penertiban pemanfaatan ruang dan belum efektifnya penegakan hukum dalam menangani penyimpangan yang terjadi di masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Castells, M., 1996. The information age: Economy, society and culture (3 volumes). *Blackwell, Oxford*, 1997, p.1998.
- Crane, R. 1995. The practice of regional development in Indonesia: Resolving central-local coordination issues in planning and finance. *Public Administration and Development*, vol. 15, no. 2, pp. 139-149, ISSN 0271-2075, <https://doi.org/10.1002/pad.4230150205>
- Firman, T., 2003. The spatial pattern of population growth in java, 1990-2000: continuity and change in extended metropolitan region formation. *International Development Planning Review*, 25(1), pp.53-67.
- Hoernig, H. 2004. Monitoring of indicators in local and regional planning practice: Concepts and issues. *Planning Practice and Research*, vol. 19, no. 1, pp. 81-99, ISSN 0269-7459, <https://doi.org/10.1080/0269745042000246595>
- Häkli, J. 2020. A Missing Citizen? Issue Based Citizenship in City-Regional Planning. *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 44, no. 5, pp. 876-893, ISSN 0309-1317, <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12841>
- Nasional, R.T.R.W., 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008.
- Sassen, S., 2000, June. Globalisation and telecommunications: impacts on the future of urban centrality. *In Urban Forum* (Vol. 11, No. 2, pp. 185-200). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Sitadevi, L., 2016. Membangun Ketahanan Kota terhadap Dampak Perubahan Iklim: Studi Kasus Kota Bandar Lampung. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 27(3), pp.190-207.
- Statistik, B.P., 2021. Hasil sensus penduduk 2020.

- Suharno, S., 2016. Identifikasi Dan Potensi Ekonomi Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan Unggulan Dan Potensial Di Kabupaten Wonosobo. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 26(2).
- Sundari, E.S., 2010. Studi untuk menentukan fungsi hutan kota dalam masalah lingkungan perkotaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota UNISBA*, 6(2).
- Warsilah, H. and Wardiat, D., 2017. *Pembangunan Sosial di Wilayah Perbatasan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wikantiyoso, R., 2010. Mitigasi Bencana Di Perkotaan; Adaptasi Atau Antisipasi Perencanaan Dan Perancangan Kota?(Potensi Kearifan Lokal Dalam Perencanaan Dan Perancangan Kota Untuk Upaya Mitigasi Bencana). *Local Wisdom: Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, 2(1), pp.18-29.
- Winarni, E., Ahmad, A.A. and Suharno, S., 2021. Community participation of development planning in purbalingga regency. *ICORE*, 5(1).
- Xu, J. 2008. Governing city-regions in China: Theoretical issues and perspectives for regional strategic planning. *Town Planning Review*, vol. 79, no. 2, pp. 157-185, ISSN 0041-0020, <https://doi.org/10.3828/tpr.79.2-3.2>

BAB 6

ALASAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA DIPERLUKAN

Oleh Retna Kristiana

6.1 Pendahuluan

Populasi perkotaan sebagai global diprediksi akan meningkat sebesar 63% antara 2014 dan 2050 terhadap 32% total pertumbuhan populasi pada periode yang sama, peningkatan tercepat terjadi di antara kota-kota besar yang menampung lebih dari 20 juta penduduk dan sebagian besar berlokasi di negara-negara berkembang. Tren ini menciptakan tantangan keberlanjutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perkotaan menunjukkan contoh ketidakstabilan sosial karena meningkatnya ketidaksetaraan dan pengangguran, polusi udara dan air, kemacetan lalu lintas dan kekerasan dan kejahatan perkotaan. Perkotaan juga menciptakan peluang luar biasa untuk pembangunan ekonomi. Perkotaan modern diciptakan sebagai inisiatif untuk berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi dan tantangannya.

6.2 Pembangunan berorientasi transit (TOD)

Pembangunan berorientasi transit (TOD) telah menarik minat perencana kota dan peneliti dalam beberapa tahun terakhir (Papa & Bertolini, 2015). Dalam infrastruktur TOD di masa pasca pandemi COVID-19 saat ini masih menemui beberapa kendala seperti stasiun dan pengembangan properti TOD yang belum terintegrasi dan harus dirancang secara tepat untuk mengakomodasi kualitas pergerakan orang (Berawi, 2019),

efisiensi jaringan jalan menurun dari waktu ke waktu (Alawadi, 2021), sikap apatis terhadap kebutuhan dan harapan pejalan kaki diabaikan di tingkat lokal dan nasional yang didukung oleh terbatasnya alokasi dana untuk fasilitas pejalan kaki untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur pejalan kaki yang berkualitas baik (Bivina & Parida, 2020), dan ketidakpastian yang tidak terkonsolidasi data statistik untuk menguatkan peran transit dan perjalanan kereta api jarak jauh dalam memperlambat atau mempercepat penyebaran (Corazza *et al.*, 2021) dll. Hal ini merupakan fakta yang tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa kondisi fisik kota berkontribusi positif atau negatif terhadap kesehatan, kenyamanan orang dan, oleh karena itu, kualitas hidup mereka. Jadi harus ditekankan bahwa kekurangan yang terdeteksi di ruang publik muncul dari hubungan antara apa yang dirasakan orang (saat ini), versus apa yang dibangun (disediakan) (Sarmiento, 2015)(Silva-Roquefort, 2019). TOD memadukan penggunaan perumahan, ritel, kantor, ruang terbuka, dan publik dalam lingkungan yang dapat dilalui dengan berjalan kaki, sehingga nyaman bagi penghuni dan karyawan untuk bepergian dengan berjalan kaki, sehingga dapat menciptakan komunitas yang ramah pejalan kaki dan pejalan kaki (Raman, 2019)(Matsuyuki, 2020).

6.3 Desain Perkotaan Ramah Lingkungan

Menurut (Lyu *et al.*, 2020), Desain perkotaan yang ramah pejalan kaki di sekitar area TOD dapat secara signifikan meningkatkan aksesibilitas area stasiun. Dalam kerangka TOD, *walkability* terkait dengan berbagai aspek desain, lingkungan, perilaku, sosio-demografis dan operasional (Alawadi, 2021).

Fleksibilitas merupakan elemen sentral untuk keberhasilan dalam manajemen infrastruktur pada umumnya dan infrastruktur TOD pada khususnya karena dalam praktiknya kinerja infrastruktur harus dilihat sebagai proses yang dinamis (Sánchez-

Silva, 2019). Perencanaan dan perancangan kota berpusat pada pejalan kaki yang memperhatikan kebutuhan, perilaku, dan persepsi mereka (Blečić, 2020) karena desain pola pembangunan dapat mengarah pada masyarakat yang lebih sehat (Zuniga-Teran *et al.*, 2017).

6.4 Ergonomi Perkotaan

Desain yang berpusat pada manusia dapat meningkatkan tingkat kepuasan pejalan kaki (Nag, 2020). Ergonomi perkotaan adalah masalah utama perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan, kegunaan, dan keamanan lingkungan perkotaan. Namun, ini adalah tugas yang sulit karena kompleksitas keterkaitan antara lingkungan perkotaan khususnya Area TOD dan aktivitas manusia di mana penelitian tentang inovasi fasilitas transit sangat bergantung pada ergonomi sebagai elemen kekuatan untuk menciptakan landmark kota baru (Appolloni *et al.*, 2020). Tahap pertama adalah area siap bangun dengan ukuran medium; dan tahap kedua adalah area siap bangun dengan luas tanah yang luas (Widoyoko *et al.*, 2020).

Prinsip-prinsip utama dalam memikirkan kembali jalan-jalan dan ruang publik untuk kota pasca pandemi adalah mendukung panduan kesehatan masyarakat, mempertimbangkan jarak fisik, meningkatkan ruang luar yang tersedia bagi orang-orang, menciptakan jalan yang lebih aman yang memprioritaskan berjalan kaki, mendukung ekonomi lokal dan membawa masyarakat ke dalam proses (Barbarossa, 2020).

Menciptakan lingkungan yang lebih ramah pejalan kaki dapat mendukung tujuan lingkungan (misalnya, pengurangan emisi karbon) dan sosial (misalnya, aktivitas fisik), tetapi merencanakan infrastruktur pejalan kaki yang menghubungkan beragam asal dan tujuan potensial untuk populasi yang berbeda secara demografis adalah tugas yang menantang (Coutts, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Alawadi, K. 2021. Revisiting transit-oriented development: Alleys as critical walking infrastructure. *Transport Policy*, 100, 187–202. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.11.007>
- Appolloni, L., Giretti, A., Corazza, M. V., & D'Alessandro, D. 2020. Walkable Urban Environments: An Ergonomic Approach of Evaluation. *Sustainability*, 12(20), 8347. <https://doi.org/10.3390/su12208347>
- Barbarossa, L. 2020. The post pandemic city: Challenges and opportunities for a non-motorized urban environment. An overview of Italian cases. *Sustainability (Switzerland)*, 12(17), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su12177172>
- Berawi, M. A. 2019. Developing a conceptual design of transit-oriented development to improve urban land use planning. *Journal of Design and Built Environment*, 19(1), 40–48. https://doi.org/https://www.mendeley.com/catalogue/d8b0c437-8a67-3e18-ad98-fc904e973e0f/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Be3bc78ce-a085-4556-af3b-459c7858e328%7D
- Bivina, G. R., & Parida, M. 2020. Prioritizing pedestrian needs using a multi-criteria decision approach for a sustainable built environment in the Indian context. *Environment, Development and Sustainability*, 22(5), 4929–4950. <https://doi.org/10.1007/s10668-019-00381-w>
- Blečić, I. 2020. Planning and design support tools for walkability: A guide for Urban analysts. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 12, Issue 11). <https://doi.org/10.3390/su12114405>

- Corazza, M. V., Moretti, L., Forestieri, G., & Galiano, G. 2021. Chronicles from the new normal: Urban planning, mobility and land-use management in the face of the COVID-19 crisis. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 12, 100503. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2021.100503>
- Coutts, C. 2019. Exploratory Analysis of Revealed Pedestrian Paths as Cues for Designing Pedestrian Infrastructure. *Journal of Urban Planning and Development*, 145(4). [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)UP.1943-5444.0000539](https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000539)
- Jie, L. 2019. Urban Road Network Optimization Based on Improved Artificial Bee Colony Algorithm. In *PervasiveHealth: Pervasive Computing Technologies for Healthcare*. <https://doi.org/10.1145/3387168.3387213>
- Lyu, G., Bertolini, L., & Pfeffer, K. 2020. How does transit-oriented development contribute to station area accessibility? A study in Beijing. *International Journal of Sustainable Transportation*, 14(7), 533–543. <https://doi.org/10.1080/15568318.2019.1578841>
- Matsuyuki, M. 2020. Impact of gentrification on travel behavior in transit-oriented development areas in Bangkok, Thailand. In *Case Studies on Transport Policy* (Vol. 8, Issue 4, pp. 1341–1351). <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2020.09.005>
- Nag, D. 2020. Assessment of relationships between user satisfaction, physical environment, and user behaviour in pedestrian infrastructure. In *Transportation Research Procedia* (Vol. 48, pp. 2343–2363). <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.08.284>
- Papa, E., & Bertolini, L. 2015. Accessibility and Transit-Oriented Development in European metropolitan areas. *Journal of Transport Geography*, 47, 70–83. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2015.07.003>

- Qian, L. 2021. Model Development for Optimized Land Usage in Urban Agglomeration Zone Using Bee Colony Algorithms. *Microprocessors and Microsystems*, 81. <https://doi.org/10.1016/j.micpro.2020.103739>
- Raman, R. 2019. Taxonomy of urban mixed land use planning. *Land Use Policy*, 88. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104102>
- Sánchez-Silva, M. 2019. Flexibility of infrastructure management decisions: the case of a project expansion. *Structure and Infrastructure Engineering*, 15(1), 72–81. <https://doi.org/10.1080/15732479.2018.1486439>
- Sarmiento, M. L. 2015. Bioética urbana: La ciudad como bien común. *Bitacora Urbano Territorial*, 25(2), 15–20. <https://doi.org/10.15446/bitacora.v2n25.52013>
- Silva-Roquefort, R. 2019. Urban ergonomics as an adaptative strategy of public space. A critical analysis of the current urban paradigm. *Bitacora Urbano Territorial*, 29(2), 159–168. <https://doi.org/10.15446/bitacora.v29n2.70141>
- Zhang, J. 2021. Short-term origin-destination demand prediction in urban rail transit systems: A channel-wise attentive split-convolutional neural network method. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 124. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2020.102928>
- Zuniga-Teran, A. A., Orr, B. J., Gimblett, R. H., Chalfoun, N. V., Guertin, D. P., & Marsh, S. E. 2017. Neighborhood design, physical activity, and wellbeing: Applying the walkability model. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(1). <https://doi.org/10.3390/ijerph14010076>

BAB 7

KEBUTUHAN PERENCANAAN

Oleh Fathan Mubina Dewadi

7.1 Pendahuluan

Dengan masyarakat perkotaan bumi sudah melewati ambang batasan 5 puluh persen dari masyarakat garis besar, sudah jadi semakin jelas kalau kehidupan urban jadi era depan. Urbanisasi maju cepat, khususnya di negara- negara bertumbuh, serta diiringi dengan bermacam kesempatan serta tantangan (PUPR, 2015). Berikut akan dijelaskan mengenai desain ibu kota NKRI yang akan dijelaskan pada gambar 7.1.



Gambar 7.1. Desain Ibukota NKRI (Nuranisa, 2022)

Aglomerasi membolehkan terdapatnya rasio ekonomi yang penting buat kota serta wilayah, namun pula memunculkan bermacam bayaran serta ieksternalitas yang terpaut dengan keributan, kemacetan, serta pencemaran. Tantangan garis besar semacam pergantian hawa serta

terkurasnya pangkal energi pengaruhi banyak aspek dalam bermacam metode serta menginginkan respons- respons terkini yang inovatif (Dewadi, 2021). Berikut akan dijelaskan mengenai kota terbaik di dunia (London) pada gambar 7.2.



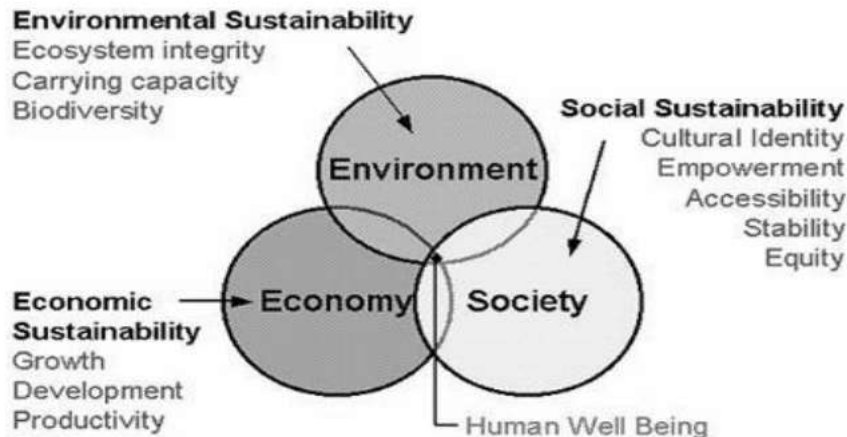
Gambar 7.2 Kota Terbaik di Dunia

Dalam bagan mengalami tantangan itu, ipendekatan yang berlainan buat pemograman sudah dicoba serta diaplikasikan di semua bumi. Bimbingan Internasional mengenai Pemograman Kota serta Area (Bimbingan) didesain buat memuat kritisnya kesenjangan dengan sediakan kerangka referensi (Wibowo & Dewadi, 2022).

7.2 Konsep Perancangan Kota

Perancangan Kota (Urban Design) merupakan suatu kombinasi kegiatan antara profesi perencana kota, arsitektur, lansekap, rekayasa awam, serta pemindahan dalam bentuk

raga. Penyusunan kota biasanya lebih memperhatikan pada bentuk fisik kota (PSD III Desain Arsitektur, 2023). Berikut akan dijelaskan mengenai konsep perancangan kota pada gambar 7.3.



Gambar 7.3. Konsep Perancangan Kota (Priyoga, 2023)

Perancangan kota bisa menciptakan dirinya dalam bentuk nampak depan gedung, konsep suatu jalur, atau sebuah rencana kota dapat dikatakan pula kalau perancangan kota berkaitan dengan bentuk wilayah perkotaan (Dewadi, *et al.*, 2019). Ruang- ruang Terbuka berbentuk jalur, halaman, dan akhirnya ruang yang lebih besar, dirancang bersamaan dengan perancangan fisik bangunannya, alhasil kota tersebut ialah cara serta produk dari penyusunan kota. Produk penyusunan kota itu bisa dikategorikan dalam 2 wujud biasa yang diucap Ruang Kota (Urban Ruang) serta Ruang Terbuka (Dewadi, 2021).

7.3 Tata Ruang Kota

Pada dasarnya ruang kota harus dibedakan oleh sesuatu karakteristik yang muncul, seperti kualitas pengolahan detail serta kegiatan yang berjalan di dalamnya. Suatu ruang kota dengan cara sempurna dilingkupi oleh bilik, lantai dan mempunyai maksud yang tegas untuk melayani (Dewadi, *et al.*, 2021).

Sekelompok gedung, baik perkantoran maupun menguntungkan bisa membuat suatu ruang di sekelilingnya bagus berbentuk plaza, jalurnya. Sebuah ruang kota dapat diolah dengan lansekap yang bagus selaku halaman kota yang hening (Supriyono, *et al.*, 2022). Dalam perihal ini suatu tempat tertentu dalam kota berfungsi sebagai lokasi suatu kegiatan berarti, tetapi tidak mempunyai pelingkup fisik dan lantai yang sebaiknya (Dewadi & Dewadi, 2022).

Ruang terbuka dapat dikatakan sebagai unsur ruang alam yang dibawa ke dalam kota ataupun alun-alun terbuka yang didiamkan senantiasa semacam keadaan aslinya. Skala ruang terbuka ini lebih banyak ditentukan oleh batuan serta dataran tanah dari ditetapkan oleh luas serta panjangnya (Nanda, *et al.*, 2022).

Terbuka di dalam kota mempunyai beberapa maksud sebagai pelengkap dan pengontras wujud urban, sediakan tanah buat pemakaian di era depan (Nanda, *et al.*, 2022). Pada saat melakukan survei untuk perancangan kota, kita harus menekuni ruang-ruang kota sebagai struktur totalitas. Ikatan ruang kota (Urban Ruang) dengan jalur merupakan ruang kota bisa pula berbentuk suatu koridor (Nanda, *et al.*, 2022).

Ruang koridor merupakan ruang buat pergerakan linier lagi ruang pulau ataupun oasis merupakan tempat stasiun keduanya dapat dihubungkan timbal balik. Jalan selaku “linear urban ruang” jika terlingkup kedua sisinya atau mempunyai beberapa bagian dengan karakteristik yang mempersatukan

pohon-pohon atau bangunan-bangunan sebetuk (Dewadi, *et al.*, 2021).

Ikatan ruang terbuka (*Open Ruang*) dengan jalur merupakan jalur tercantum sistem kota. Dimana jalur tercantum pathway ialah ialah rute-rute sirkulasi yang biasa digunakan orang dalam melaksanakan pergerakan, bagus inter ataupun dampingi kota, lewat jaringan jalur pokok dan inferior (Murtalim, 2020).

Jalan termasuk dalam ruang- ruang pertemuan kegiatan yang marak. Filosofi bagian pembuat kota dalam setiap perancangan kota harus memperhatikan elemen-elemen perancangan yang ada sehingga nantinya kota tersebut hendak mempunyai karakteristik yang nyata (Dewadi, *et al.*, 2021).

Elemen penyusunan kota terdiri dari aturan untuk tanah (*Land Use*) ialah bagian pokok dalam dasar perencanaan dalam dua format, bagi terlaksananya ruang 3 format (Sitorus , *et al.*, 2022). Tata guna lahan merupakan suatu pengaturan lahan serta ketetapan buat memakai tanah untuk arti khusus cocok dengan peruntukannya (Dewadi, *et al.*, 2021). Dalam jadikan tanah ada penjatahan pemakaian tanah jadi kelompok- kelompok sesuai dengan interaksi antara unsur kegiatan, orang, dan posisi, pertama menghasilkan pengelompokan kegiatan, guna, dan karakter khusus, menciptakan *mixed land use plan* sebagai pengganti (Lewaherilla, *et al.*, 2022)

Dalam penjatahan penggunaan lahan yang terbatas. Untuk masa yang akan tiba, kebijaksanaan *mixed use* digunakan buat tingkatkan kehidupan 2 puluh 4 jam (Abbas, *et al.*, 2020). Filosofi bagian pembuat kota dalam setiap perancangan kota harus memperhatikan elemen- elemen perancangan yang ada sehingga nantinya kota tersebut hendak

mempunyai karakteristik yang dan lantai dasar yang diperuntukkan buat mendukung public ruang (Dewadi, 2021).

Kesalahan di masa lalu dalam peraturan tata guna tanah, antara lain kurangnya keanekaragaman penggunaan lahan dalam suatu area serta kekeliruan dalam memperkirakan aspek area serta raga alami (Raja Ma'arof, *et al*, 2021).

Oleh sebab itu, perihal yang wajib dicermati buat aturan untuk tanah di masa mendatang merupakan *mixing use* dalam sesuatu urban zona, buat meningkatkan kehidupan dua puluh empat jam dengan membenarkan sirkulasi melalui sarana pejalan kaki, dan penggunaan prasarana yang lebih bagus (Surbakti, *et al*, 2022). Analisis yang berdasarkan lingkungan natural, serta perbaikan sistem infrastruktur serta rencana perawatan sangatlah dibutuhkan (Wibowo, *et al*, 2021).

7.4 Soal-Soal Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan arsitektur perkotaan (Della, *et al*, 2022)?
2. Bagaimana konsep perkotaan yang baik agar wilayah semakin sejuk (Dewadi, 2016)?
3. Apakah perkotaan yang baik dapat menunjang kehidupan sehari-hari yang baik pula (Dewadi, 2021)?
4. Jelaskan pengaruh desain yang baik bagi nilai jual semacam wisata dsb (Dewadi, 2022)!
5. Bagaimana konsep perancangan kota yang baik agar minim polusi (Mulyadi & Dewadi, 2021)?
6. Sebutkan komponen-komponen pendukung dalam merancang perkotaan (Nanda, *et al*, 2022)!
7. Sebutkan parameter-parameter agar kota-kota di Indonesia dapat unggul seperti di negara-negara maju pada umumnya (Farahdiansari, *et al*, 2021)!

8. Bagaimana kolaborasi Insinyur dan Arsitektur agar memadai dalam perencanaan perkotaan (Jati, et al., 2022)?
9. Apakah pembangunan ibu kota dan pusat pemerintahan harus dipisah (A, et al., 2022)? Jelaskan secara detil (Wibowo, et al., 2022)?
10. Perlukah penataan ibukota yang lebih inovatif (Dimyati, et al., 2021)?

DAFTAR PUSTAKA

- Farahdiansari, A. P., Dewadi, F. M. & Rahdiana, N., 2021. Analisis Unjuk Kerja BBM dengan Eco-Racing sebagai Campuran BBM yang Ekonomis. *JTMMX*, II(1), pp. 1-5.
- Wibowo, C., Sukarno, S., Nursanti, Y. B. & Dewadi, F. M., 2022. Kebutuhan Perguruan Tinggi di Wonogiri sebagai Bagian dari Pengembangan Sumber Daya Manusia. *VISIONER : Jurnal Penelitian Komunikasi dan Sosial Politik*, IV(1), pp. 20-27.
- Abbas, A. et al., 2020. *Implementation of clustering unsupervised learning using KMeans mapping techniques*. Medan, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering.
- A. & Dewadi, F. M., 2022. Perancangan Mesin Roll Plat Listrik sebagai Peningkatan Efisiensi Kerja di Industri Manufaktur. *Jurnal Mekanika Terapan*, III(1), pp. 18-25.
- A, F. M. et al., 2022. Optimization of Vapor Compression Type for Desalination of Seawater Using the DFMA Method. *Jurnal Teknik Mesin Mechanical Xplore (JTMMX)*, III(1), pp. 1-8.
- A. et al., 2021. Analisis Rancangan Sel Surya untuk Kebutuhan Cadangan Energi Listrik di Kolam Wilayah Graha Raya Bintaro, Tangerang Selatan. *JTMMX*, II(1), pp. 6-12.
- Della, R. H. et al., 2022. *Kesehatan & Keselamatan Kerja Era Society 5.0*. 1st ed. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Dewadi, F. M., 2016. *Perancangan Mesin Roll Pelat Dengan Penggerak Motor Listrik Ac 1 Fasa Kapasitas Daya Listrik 180 W*, Jakarta: Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal.
- Dewadi, F. M., 2021. Analisis Efektivitas Liquid Section Heat Exchanger dengan Tube in Tube Heat Exchanger dari Sisi Aplikatif. *JTMMX*, II(1), pp. 28-36.
- Dewadi, F. M., 2021. Efisiensi Pada Sepeda Listrik Dengan Dinamo Sepeda Sebagai Generator. *Praxis : Jurnal Sains, Teknologi, Masyarakat dan Jejaring*, IV(1), pp. 13-23.

- Dewadi, F. M., 2021. Pembelajaran dan Pengenalan Musik dalam Melatih Daya Ingat Anak. *JECED: Journal of Early Childhood Education and Development*, III(1), pp. 15-23.
- Dewadi, F. M., 2021. *Pengaruh Analisis Manajemen Stres Kinerja Perusahaan terhadap Pencapaian Kinerja Karyawan Optimal berdasarkan Pengalaman Pemuda Kreatif Kavling Rawa Bunga, Tangerang Selatan*. Bukit Tinggi, IAIN Bukit Tinggi.
- Dewadi, F. M., 2022. Klasifikasi Perpindahan Panas. In: R. Pido, ed. *Perpindahan Panas: Dasar dan Praktisi dari Perspektif Akademisi dan Praktisi*. Bandung: Indie Press, pp. 1-8.
- Dewadi, F. M., Dahlan, D. & Maulana, E., 2019. Frame e-Bike Optimization Capacity 48V. *JOJAPS*, Volume XIV, pp. 129-138.
- Dimiyati, D. et al., 2021. Evaluasi Kekuatan Resistance Spot Welding Pada Proses Tailor Welded Blankss Menggunakan Mill-Steel Beda Ketebalan. *Borobudur Engineering Research (BENR)*, I(1), pp. 96-107.
- Jati, R. R., Sofiyanti, B. & Dewadi, F. M., 2022. Pengenalan Material Yang Digunakan Dalam Proses Pengelasan Berdasarkan Spesifikasi Material. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, I(3), pp. 300-305.
- K., Nanda, R. A., A. & Dewadi, F. M., 2022. Pelatihan Pemanfaatan Aquaponik Bagi Warga Kavling Rawa Bunga, Tangerang Selatan. *Journal of Entrepreneurship and Community Innovations*, I(1), pp. 16-21.
- K., Nanda, R. A. & Dewadi, F. M., 2022. Pengukuran Intensitas Cahaya Menggunakan Sensor BH-1750 Berbasis Mikrokontroler: Studi Kawasan Kampus UBP Karawang. *Praxis*, V(1), pp. 74-81.
- K. et al., 2022. Archimedes' Principle Applied to Buoy Design for Measuring Purposes in Offshore Illumination Conditions. *JTMMX*, III(1), pp. 40-48.

- K. et al., 2021. A Report on Metal Forming Technology Transfer from Expert to Industry for Improving Production Efficiency. *Mechanical Engineering for Society and Industry*, I(2), pp. 96-103.
- Lewaherilla, N. C. et al., 2022. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Indonesia, Patent No. 000354858.
- M., Dewadi, F. M., A. & Sigalingging, W. S., 2021. Pengaruh Parameter Temperatur Quenching terhadap Sifat Mekanik dan Struktur Mikro Rear Hub Spindles. *Buana Ilmu*, V(2), pp. 101-118.
- M., 2020. *Analisis Unjuk Kerja Eco Racing sebagai Suplemen Penghemat Bahan Bakar*. Malang, Universitas Widyagama Malang.
- Mulyadi, D. & Dewadi, F. M., 2021. Analisis Rancangan Sel Surya untuk Kebutuhan Cadangan Energi Listrik di Kolam Wilayah Graha Raya Bintaro, Tangerang Selatan. *Jurnal Teknik Mesin Mechanical Xplore*, II(1), pp. 6-12.
- Nanda, R. A. et al., 2022. Perancangan dan Perakitan Elektronika Mikrokontroler berbasis IOT untuk Studi Pengukuran Sistem HVAC. *JTMMX*, VII(1), pp. 43-55.
- Nuranisa, I., 2022. *Majalahpajak*. [Online] Available at: <https://majalahpajak.net/pembangunan-ikn-jaring-investor-pemerintah-tebar-insentif/> [Accessed 15 Maret 2023].
- Priyoga, I., 2023. *Desain Berkelanjutan (Sustainable Design)*, Semarang: Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Pandanaran.
- PSD III Desain Arsitektur, 2023. *Perancangan Kota*. [Online] Available at: chrome-extension://oemmnadbldboiebfnladdacbdadm/file:///C:/Users/Fathan%20Mubina%20Dewadi/Downloads/11727405.pdf [Accessed 15 Maret 2023].

- PUPR, 2015. *Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah*, Jakarta: United Nations Human Settlements Programme.
- Raja Ma'arof, R. A., Saputra, O. . A., Dewadi, F. M. & Noor, A., 2021. *Engaging Students: Blending Class Activities with Industry-linked Teaching Approach in Occupational Safety and Health Course Delivery*, Kuala Lumpur: Universiti Kuala Lumpur.
- S. et al., 2021. Pengaruh Penahanan Suhu Reaktor pada Pengujian LDPE dengan Debit Air 46 L/Min. *JTMMX*, II(1), pp. 19-27.
- Sitorus , E. et al., 2022. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja Era Sociey 5.0*. Indonesia, Patent No. 000338122.
- Supriyono, T. et al., 2022. Analisis Chassis Mobil Robot Penanaman Bibit Kangkung Menggunakan Metode Elemen Hingga. *JTMMX*, II(2), pp. 1-8.
- Surbakti, D., Wibowo, C. & Dewadi, F. M., 2022. Perbaikan Gerobak Sampah sebagai Bagian dari Manajemen Sampah Sisi Hulu di Lingkungan Permata Penggilingan Jakarta. *Indonesian Journal of Engagement, Community Services, Empowerment and Development*, II(2), pp. 165-174.
- Wibowo, C. & Dewadi, F. M., 2022. Design Pressure Reduction System (PRS) untuk Compressed Natural Gas (CNG) Kapasitas 30 Nm³/h dalam Sisi Teknis dan Ekonomis. *TEKINFO: Jurnal Penelitian Teknik dan Informatika*, II(2), pp. 60-65.
- Wibowo, C., Dewadi, F. M. & Afgani, A. A., 2021. Impementasi Material Titanium pada Sepeda Listrik sebagai Rangka yang Efisien. *JTMMX*, II(1), pp. 13-18.

BAB 8

PENDEKATAN DALAM PERENCANAAN WILAYAH

Oleh Lisa Astria Milasari

8.1 Lingkup Perencanaan Wilayah

Klasifikasi perencanaan berdasarkan tingkat operasionalisasinya dalam bentuk perencanaan secara sektoral maupun bersifat lintas sektoral pada kawasan tertentu. Klasifikasi perencanaan menurut tingkatnya adalah sebagai berikut :

- a. ***Normative planning***, berupa perumusan kebijakan dengan memberikan pertimbangan dan alternatif mengenai pengambilan keputusan, baik secara ideal maupun yang tujuan yang ingin dicapai.
- b. ***Strategic planning***, lebih terkait pada program pembangunan yang terdiri dari identifikasi, analisis dan evaluasi terhadap tujuan dan sasaran, dengan melalui kriteria-kriteria dan proses dalam mencapai tujuan yang diinginkan
- c. ***Operational planning***, terkait pada implementasi proyek dengan tindakan-tindakan melibatkan pemangku kebijakan yang dilatarbelakangi oleh perubahan.

Aktivitas perencanaan wilayah memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan wilayah dan juga menjadi dasar awal sebagai respon terhadap pertumbuhan wilayah. Melalui perencanaan diharapkan dapat mencapai tujuan dan penyelesaian solusi dari permasalahan perencanaan. Perencanaan wilayah merupakan proses penetapan yang digunakan pada kawasan tertentu tergantung pada tujuan yang diinginkan. Dalam

menetapkan wilayah maupun kawasan harus memperkirakan berbagai masalah yang timbul dan mengetahui tujuan yang akan dicapai. Perencanaan wilayah sering dimasukkan dalam produk perencanaan tata ruang wilayah nasional dan rencana pengembangan wilayah regional.

Lingkup perencanaan wilayah sebagai salah satu hasil perencanaan secara administratif didasarkan secara administratif pada kebijakan otonomi daerah yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan produk penataan ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan, serta pemantauan produk penataan ruang. Perencanaan wilayah berbagai negara memiliki sudut pandang yang tidak sama pada kehidupan ekonomi dan permasalahan yang dihadapi. Di negara berkembang konsep perencanaan wilayah dikaitkan dengan hasil pembangunan wilayah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan wilayah sebagai bentuk administratif berdasarkan pendekatan wilayah dengan batas-batas dan kebijakan otonomi daerah dengan kewenangan pemerintah mencakup tahapan awal perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, dan pengendalian wilayah atau tata ruang. (LA Milasari, dkk, 2023)

Terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses perencanaan yakni melalui sektor dan wilayah, sebagaimana keberhasilan dari pembangunan sangat ditentukan oleh pengelolaan daerah secara berkelanjutan baik dalam sosial, ekonomi, budaya maupun penguasaan teknologi oleh sumberdaya manusia. Disamping itu berkaitan dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007, pasal 14 menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang terdiri dari rencana umum dan rencana terinci. Dengan bentuk produk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu pada skala nasional, skala propinsi, maupun skala kabupaten atau kota.

Bentuk perencanaan Wilayah atau dengan istilah pengembangan wilayah (*regional development planning*) berupa

potensi sumber daya yang tersedia, memiliki perkembangan wilayah berbeda dengan perkembangan lainnya baik secara ekonomi, demografi, maupun fisik. Justifikasinya karakteristik daerah yang berbeda, kesannya akan menimbulkan intervensi pembangunan yang berdampak dengan wilayah sekitarnya. Adapun tujuan dari perencanaan wilayah antara lain adalah :

1. Membentuk keharmonian antara kelompok masyarakat, aktivitas dan keruangan
2. Menurunkan kemajemukan antar wilayah
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur di setiap daerah

8.2 Perencanaan Wilayah

Perencanaan wilayah sebagai upaya yang berkelanjutan dalam menemukan pola paradigma yang sesuai dengan kompleksitas pada wilayah dan kawasan. Dalam prakteknya, perencanaan wilayah sebagai sebuah proses kebijakan publik berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan, kepentingan masing-masing subjek dan bagaimana manfaat tersebut mempengaruhi proses perencanaan tata ruang wilayah di Indonesia.

Potensi di setiap wilayah beragam, baik jenis sumber daya alam dan karakteristik sumber daya manusia. Hal ini mengidentifikasi sebuah wilayah sebagai urban maupun rural bukanlah persoalan sederhana. Mengingat perkembangan wilayah saat ini dipengaruhi oleh permasalahan kompleks kehidupan manusia. Sebagai contohnya pada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan kota yang lainnya mengalami perubahan lahan yang sangat signifikan, dan memiliki dampak yang beragam.

Perbedaan pemahaman dan rekognisi dalam elaborasi produk rencana tata ruang nasional dengan rencana tata ruang daerah, dikarenakan mengambil keputusan sesaat. Sebaliknya, Pemerintah tidak akan mengabaikan peluang dalam menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) atau devisa yang sudah tersedia.

Meskipun demikian bentuk negosiasi baik prosedural maupun *around the table* akan tercapai titik temu dalam produk rencana tata ruang.

Bahkan dengan memperhatikan fenomena yang ada di eksisting maupun pada pengumpulan data terkait keruangan secara umum terdapat beberapa permasalahan yang bersifat konseptual, diantaranya :

1. Perencanaan wilayah dan peraturan perundang-undangan seringkali tidak berjalan dengan baik. Minimnya informasi dan sosialisasi produk tata ruang terkait isu permasalahan dan hasil rencana mengakibatkan kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat.
2. Perbedaan dan persamaan persepsi terkait hasil produk tata ruang seringkali menimbulkan konflik kepentingan di antara pemangku kepentingan atau stakeholder.
3. Tahapan perencanaan tidak dapat mempertimbangkan kepentingan semua kelompok yang dapat mengelola wilayah/daerah, kecuali ketaksesuaian dan kontrakdiksi keruangan tidak diberi kesempatan sebagai bentuk pemecahan permasalahan.
4. Dengan hasil kebijakan, analisis, konsep serta strategi rencana tata ruang yang tidak terstruktur, akan berdampak pada pemangku kebijakan seringkali tidak mengimplementasikan kebijakan tidak searah dengan tujuan dan sasaran rencana tata ruang di masa mendatang. Pada waktu yang sama minimnya koordinasi antar lembaga menimbulkan kesan tumpang tindih.
5. Adanya dua substansi (dualisme) diantara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan serta faktor ekologis akan mempengaruhi hasil produk rencana tata ruang.

8.3 Peranan dan Fungsi Perencanaan Wilayah

Peranan dan fungsi penggunaan lahan sangat diperlukan bagi masyarakat, karena perencanaan penggunaan lahan akan memudahkan segala sesuatu yang perlu dilakukan. Perencanaan wilayah memegang peranan penting, antara lain:

a. Melayani kebutuhan masyarakat

Kebutuhan masyarakat sebagai tujuan perencanaan. Memenuhi kebutuhan komunitas, melakukan perubahan, dan mencegah hasil yang tidak diinginkan. Kebutuhan masyarakat mendorong produk perencanaan penggunaan lahan.

Hasil perencanaan ini memperhatikan kebutuhan masyarakat agar tidak timbul kesenjangan sosial di masyarakat. Perubahan dilakukan ke arah yang lebih baik dalam perencanaan wilayah atau wilayah dengan menggunakan standar produk perencanaan nasional. Menjaga kelestarian lingkungan

Sumber daya alam terbatas dalam ruang dan waktu. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang rasional dan rasional. Ada hubungan yang erat antara lingkungan dan manusia. Manusia dapat sangat bergantung pada lingkungan, oleh karena itu aktivitas manusia sangat bergantung pada lingkungan.

Kerusakan sumber daya alam banyak ditentukan oleh ulah manusia, seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan penggundulan hutan, yang kesemuanya itu tidak terlepas dari perbuatan manusia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam, namun pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan menyebabkan degradasi lingkungan.

Perencanaan tata guna lahan ke depan, seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan sektor pertambangan, dan pembangunan ibu kota baru, akan mengakibatkan perpindahan penduduk dan urbanisasi. Ini harus mempertimbangkan penggunaan lahan dan dampak yang akan terjadi jika pembangunan dilanjutkan. Perencanaan pembangunan merupakan aspek kunci dalam perencanaan wilayah untuk mengatasi ketimpangan, permasalahan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, meningkatkan kesempatan kerja dan untuk pembangunan secara keseluruhan (Manan, 2017).

Dimungkinkan juga untuk menghindari penggunaan lahan yang perlu dilestarikan, seperti kawasan hutan lindung dan cagar alam. Artinya sejak awal Anda sudah bisa mengantisipasi dampak positif dan negatif dari perubahan tersebut, dan Anda bisa memikirkan langkah apa yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya.

b. Memperhatikan status kepemilikan lahan

Munculnya sengketa pertanahan karena semakin besarnya kebutuhan akan tanah dan lahan untuk memenuhi kebutuhan mata pencaharian dan kehidupan sehari-hari yang terus meningkat, sedangkan tanah dan luas tanah sebagian besar masih tidak berubah. Biarkan lebih banyak orang menggunakan tanah di sekitarnya untuk menjadi mandiri

Ini memiliki arti besar dalam kehidupan manusia. Kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok individu, regulator atau pemerintah tidak diragukan lagi berkaitan dengan sumber daya manusia, sehingga kehidupan manusia banyak bergantung pada manusia.

Kebutuhan manusia akan tanah merupakan kebutuhan pokok dan mutlak. Fakta sejarah menunjukkan bahwa manusia, baik secara individu maupun sebagai masyarakat, memiliki kebutuhan yang tetap terhadap bumi, dengan membangun relasi dan memanfaatkan sumber daya alam.

Kebutuhan akan lahan terus meningkat, yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk pesat. Kebutuhan lahan dalam menampung berbagai aktivitas terus meningkat membutuhkan pemanfaatan lahan yang efisien melalui kesepakatan peruntukan lahan yang berdasarkan produk tata ruang. Dalam hal ini dilakukan agar menghindari konflik. Selain itu, perlunya koordinasi antar lembaga dengan masyarakat dalam status kepemilikan tanah agar mencegah timbulnya pemukiman liar.

Tujuan dari rencana penggunaan lahan ini adalah untuk mendorong pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dalam lingkungan yang lestari dan lestari melalui perencanaan penggunaan lahan. Selain itu, bertujuan untuk membantu mereka yang masih dianggap terpinggirkan untuk melepaskan diri dari belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi dan politik.

8.4 Pendekatan dalam Perencanaan Wilayah

Perencanaan penggunaan ruang wilayah yang diatur dalam bentuk perencanaan tata ruang, sehingga potensi wilayah menggambarkan ciri khas wilayah tersebut akan saling berpengaruh.

- A. Pendekatan Perencanaan Rasional Menyeluruh (*Rational Comprehensive Approach*), pendekatan tersebut mencakup pertimbangan perencanaan keseluruhan, dengan ciri-ciri

dari Perencanaan Rasional Menyeluruh, adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebijakan umum
2. Berdasarkan spesifikasi tujuan yang lengkap, komprehensif, dan terpadu
3. Peramalan yang akurat didukung oleh sistem informasi yang komprehensif
4. Perencanaan dilakukan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Sebagai bentuk permasalahan dari perencanaan ini adalah produk perencanaan yang berupa kurang dalam memberikan informasi data dan evaluasi diri terutama dalam hubungannya dengan prioritas, kurang diimplementasikan karena faktor anggaran dan dinamika masyarakat, serta waktu pelaksanaan dan keabsahan data serta sinkronisasi kelembagaan.

B. Pendekatan Perencanaan Terpilah (*Disjointed Incremental Planning Approach*)

Pendekatan perencanaan ini mengutamakan skala prioritas dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebijakan, para pemangku kepentingan dan implementasi dengan melibatkan masyarakat agar mempermudah proses pelaksanaan produk perencanaan

Bentuk permasalahan dari produk perencanaan ini adalah timbul dampak ikutan yang tidak diduga sebelumnya, penyelesaian jangka pendek dan bentuk penyelesaian “tambal sulam”, tidak efisien.

C. Pendekatan Terpilah berdasar Pertimbangan Menyeluruh (*Mixed scanning Planning Approach*)

Pendekatan terpilah berdasarkan pada pertimbangan menyeluruh ditandai dengan perencanaan yang membahas kebijakan umum, perencanaan dengan latar belakang yang mendalam, memprioritaskan penelitian mendalam, peramalan yang memperhitungkan aspek global, penghematan waktu dan

uang disederhanakan dan untuk mendukung hasil, tujuan dan tujuan telah ditetapkan.

Dalam memperkenalkan konsep tentang perencanaan, John S. Westren menyebutkan beberapa perencanaan yang mempunyai dimensi strategis menyangkut koneksitas objek tersebut dengan objek yang lain, yaitu :

- a. Perencanaan Tata Guna Lahan (Perencanaan *Land – Use*)
Pada dasarnya, ini adalah penggunaan lahan yang ditujukan pada area tertentu. Perencanaan penggunaan lahan memiliki tiga fungsi utama: area kerja, area penggunaan, dan area hubungan masyarakat. Penggunaan lahan sebagai ukuran atau rencana pembangunan wilayah yang bertujuan untuk mengatur fungsi lahan secara rasional guna mewujudkan tatanan penggunaan lahan pada suatu wilayah tertentu.
- b. Perencanaan Transportasi
Perencanaan Transportasi terkait dengan perencanaan tata guna lahan. Perencanaan transportasi timbul ketika masalah diperhadapkan dengan pembebasan lahan. Hal ini dapat mengatasi masalah penyediaan fasilitas yang mampu mengakomodasi perjalanan di masa depan dan diharapkan dapat mempertahankan dan memberikan harapan bagi perkembangan daerah tersebut.
Tujuan dari perencanaan transportasi adalah untuk menemukan rute transportasi yang cepat untuk memulihkan pariwisata sebagai bagian dari strategi transportasi secara keseluruhan yang dapat melayani wilayah dan sekitarnya.
- c. Perencanaan Sosial
Dalam perencanaan sosial dari ulasan berikut Mayer (1972) dalam Arie (2013), terdapat pemahaman bahwa salah satu dari tiga tema dasar memberikan pendapat yang paling konseptual.

Yang pertama berkaitan dengan ketentuan efisiensi terkait dengan layanan terorganisir yang diberikan kepada individu baik untuk membantu mereka menjadi eko-efisien atau untuk menghambat kemajuan sistem ini. Yang kedua menyangkut integrasi semua program dan desain perumahan metropolitan, dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan penduduk, dan yang ketiga menyangkut tekanan dan kendali atas distribusi sumber daya.

d. **Perencanaan Ekonomi**

Tujuan dari perencanaan ekonomi adalah untuk membuat penggunaan terbaik dari sumber daya suatu daerah. Istilah perencanaan ekonomi pertama kali digunakan di Uni Soviet pada tahun 1928. Setelah Perang Dunia, perencanaan ekonomi sudah dianut oleh negara-negara lain karena prinsip dasarnya luas dan mudah. Hal-hal yang perlu diutamakan dari perencanaan ekonomi apa pun adalah suatu pernyataan dalam istilah yang kuantitatif oleh pemerintah dan beberapa sektor dalam kaitannya dengan hasil ekonomi suatu negara dan sumber daya yang diharapkan akan digunakan dalam produksi.

Perencanaan wilayah pada dasarnya adalah penerapan konsep pembangunan ekonomi dengan dimensi keruangan, sehingga perencanaan pengembangan wilayah sebagai akumulasi yang tidak terputus dari konsep pembangunan secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshar, M. 2017. *Perencanaan Kawasan Perdesaan Berbasis Agropolitan*. Universitas Alauddin Makassar.
- Arba, H.M. and SH, M., 2022. *Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah*. Jakarta Timur:Sinar Grafika.
- Baja, I.S., 2012. *Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah*. Penerbit Andi.
- Fatimah, S., 2019. *Teori Perencanaan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hajar, N.K.D.S., Amrizal, D., Izharsyah, J.R. and Mahardika, A., 2022. *Perencanaan Pembangunan & Pembuatan Kebijakan Daerah: Dari Teori Ke Praktik* (Vol. 1). umsu press.
- Harun, U.R., 2010. *Model Perencanaan Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 10(1).
- Manan, B. 2017. Menghidupkan kembali GBHN Makalah, Disampaikan saat Diskusi Badan Pengkajian MPR, Denpasar, 23 Maret 2017.
- Matheus, I.R., 2022. *Analisis Potensi Wilayah Pedesaan: Pendekatan Efektif dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian*. Penerbit Andi.
- Milasari, LA., dkk. 2023. *Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota*. Makassar : CV Tohar Medika.
- Rustiadi, E., 2018. *Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pamungkas, A.G., 2022. *Standar Perencanaan Pembangunan Wilayah Berbasis Ekosistem Hutan Tropis Mendukung Pembangunan IKN*. STANDAR: Better Standard Better Living, 1(2), pp.17-21.
- Pramono, R.W.D., 2021. *Modul Teknik Analisis Dan Perencanaan Wilayah*. Deepublish.

Sofiyah, U., Lestari, E.K. and Yunitasari, D., 2022. *Perencanaan Wilayah Perkotaan Melalui Konsep Smart City Di Kabupaten Jember*. Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, 17(1), pp.104-123.

BAB 9

LINGKUP PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Oleh Fauziah Lestari Akri

9.1 Pengenalan Lingkup Perencanaan Wilayah, Teori Perencanaan, Wilayah dan Kota

Perencanaan Wilayah atau perencanaan pengembangan wilayah yaitu kegiatan yang sistematis dalam mewujudkan suatu wilayah yang baik dalam memanfaatkan potensi sumberdaya juga keterbatasan.

9.1.1 Perencanaan Wilayah

- a. Menurut Friedman (1967) perencanaan wilayah adalah proses perumusan dan penegasan tujuan-tujuan sosial dan ekonomi dalam berbagai kegiatan dalam ruang yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah kota (biasanya disebut dengan supra-urban)
- b. Dalam perencanaan wilayah merupakan satu-satunya jalan terbuka untuk menaikan pendapartan perkapita, mengurangi ketimpangan juga dapat meningkatkan kesempatan untuk kerja (Jhingan, 2000 dalam Soarcs dkk, 2015)
- c. Menurut Riyadi dan Brakusuma (2003) Perencanaan wilayah yaitu suatu proses perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk melakukan perubahan ke arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungan dalam wilayah tertentu. Yaitu memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada juga harus memiliki

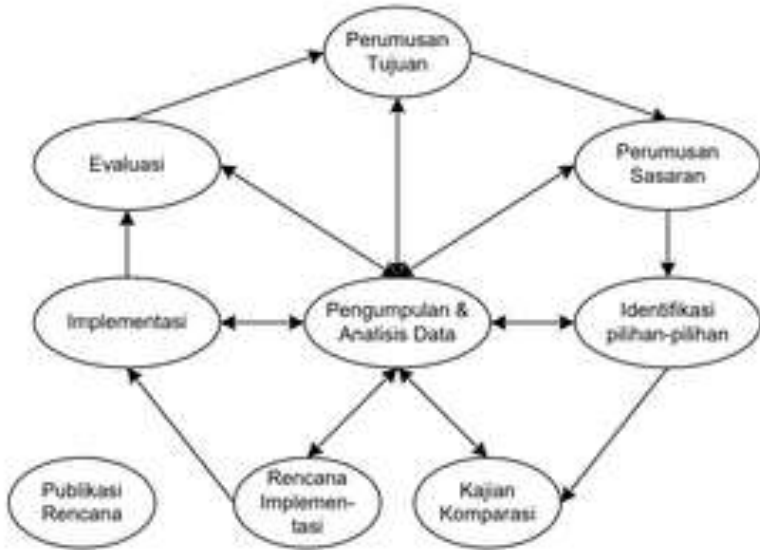
orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, juga berpegang pada azas prioritas.

9.1.2 Teori Perencanaan

Perencanaan ialah proses untuk mencapai suatu tujuan Usaha melalui perwujudan sasaran-sasaran tertentu (yang biasa disebut sebagai tujuan antara), ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan baik oleh pribadi sendiri maupun suatu organisasi tertentu. diperlukan agar alokasi menjadi lebih efisien dan efektif, dengan maksud agar keadaan dimasa yang akan datang menjadi lebih baik. Dalam Teori Perencanaan terdapat beberapa penjelasan menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Fainstcin (2005) bahwa Teori Perencanaan atau disebut Planning Theory lebih banyak dalam membahas tentang dimensi prosedural perencanaan dan teori urban atau urban theory in planning yang membahas tentang substantif dari perencanaan.

Pengertian perencanaan Secara skematis susunan model perencanaan yang ideal tersebut dapat digambarkan seperti pada Gambar 9.1.



Gambar 9.1. Idealized Planning Model
Sumber: Bendavid-Val, (1991)

Dari gambar tersebut terdapat keistimewaan yang terkait dengan arti perencanaan sebagai suatu proses yaitu:

- analisis dan pengumpulan data yang berurutan tetapi fungsinya secara terus menerus mendukung dalam kegiatan juga menerima informasi dari kegiatan,
- setiap tahapan proses merupakan bagian dari siklus yang saling berhubungan, yang mana tujuan dan sasaran ditetapkan dan dirumuskan kembali.
- Publikasi rencana bukan akhir dari proses, tetapi dapat dijalankan pada waktu bergantung kondisi

9.1.3 Wilayah dan Kota

a. Wilayah

Menurut UU No. 26 tahun 2007, Wilayah merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait dan sistemnya ditentukan dari aspek administratif juga aspek fungsional.

b. Kota

Menurut Zoe'raini Djamal Irwan (2004) pengertian kota terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Suatu area yang dimana menjadi pemusatan penduduk dengan kegiatannya dan juga merupakan tempat konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi (industri, perdagangan dan jasa).
2. Merupakan sistem secara fisik maupun sosial ekonomi, bersifat tidak statis sehingga dapat berubah menjadi tidak beraturan dan susah dikontrol.
3. Pengaruh terhadap lingkungan fisik seperti iklim, dan dapat tergantung pada perencanaannya.

9.2 Penerapan Teori dan Tipologi Perencanaan Wilayah dan Kota

9.2.1 Penerapan Teori Perencanaan Wilayah

Dalam setiap perencanaan wilayah perlu adanya komponen penerapan teori yaitu terdapat menurut Archibugi (2008) menjelaskan tentang penerapan teori perencanaan dengan empat komponen yaitu :

a. *Physical Planning* (Perencanaan Fisik).

Melakukan perencanaan secara fisik dalam pengembangan wilayah. Dalam hal ini lebih diarahkan pada pengaturan tentang bentuk fisik kota dengan jaringan infrasutruktur kota menghubungkan antara beberapa titik simpul aktivitas. Contohnya yaitu (tata ruang, lokasi tempat tinggal, aglomerasi dan penggunaan lahan)

- b. *Macro-Economic Planning* (Perencanaan Ekonomi Makro)
Perencanaan ini berkaitan dengan ekonomi wilayah dalam hal pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan, distribusi pendapatan, tenaga kerja, produktivitas, perdagangan, konsumsi dan investasi. Bentuk produk dari perencanaan ini yaitu berupa kebijakan bidang aksesibilitas lembaga keuangan, kesempatan kerja, tabungan.
- c. *Sosial Planning* (Perencanaan Sosial)
Dalam komponen ini membahas mengenai pendidikan, kesehatan, integritas sosial, kondisi tempat tinggal dan tempat kerja, wanita, anak-anak dan masalah kriminal. Bentuk dari produk tersebut berupa kebijakan demografis.
- d. *Development Planning* (Perencanaan Pembangunan)
Perencanaan ini berkaitan dengan perencanaan program pembangunan yang secara komprehensif guna mencapai pengembangan suatu wilayah.

9.2.2 Tipologi Perencanaan

Setiap perencanaan terdapat pemikiran yang dapat didasari secara teoritis pada tipologi perencanaan. Dalam hal ini dibagi menjadi empat bagian (Mansyur, 2020).

- a. *Traditional Planning* (Perencanaan tradisional)
Perencanaan ini mengacu pada kebijakan untuk melakukan perbaikan pada sistem kota, yang dimana memiliki program inovatif terhadap perbaikan lingkungan perkotaan dengan menggunakan standar dan metode yang profesional
- b. *User-Oriented Planning*
(Perencanaan yang berorientasi pada pengguna)
bertujuan untuk mengakomodasi pengguna dari produk perencanaan, yaitu masyarakat yang menentukan produk

perencanaan yang dilibatkan dalam setiap proses perencanaan.

c. *Advocacy Planning* (Perencanaan Advokasi)

Berisikan program pembelaan terhadap masyarakat kurang mampu dalam proses pembangunan kota atau masyarakat miskin kota. Dalam hal ini melalui program khusus untuk meningkatkan taraf dari hidup masyarakat miskin

d. *Incremental Planning* (Perencanaan Dukungan)

Perencanaan ini yang bersifat dukungan terhadap proses dalam keputusan permasalahan kota. Produk ini bersifat analisis mendalam terhadap permasalahan dengan mempertimbangkan dampak positif dan negative dari kebijakan.

9.3 Tujuan Perencanaan Wilayah

Tujuan dari perencanaan yaitu dapat menciptakan kehidupan yang nyaman, efisien, berkeadilan juga berkelanjutan dimana tahap akhirnya menghasilkan rencana menetapkan alokasi dari berbagai kegiatan yang telah disepakati, baik dari pemerintah, masyarakat, hingga pihak swasta.

9.4 Jenis- Jenis Perencanaan

1. Perencanaan Fisik dan Perencanaan Ekonomi

Perencanaan fisik yaitu suatu perencanaan yang dapat mengubah atau memanfaatkan dari struktur fisik suatu wilayah. Contohnya: perencanaan tata ruang, tata guna lahan, perencanaan transportasi, komunikasi.

Sedangkan perencanaan ekonomi ialah perubahan struktur ekonomi suatu wilayah dan langkah untuk memperbaiki tingkat kemakmuran suatu wilayah (KAPET, KADAL, CBD)

2. **Perencanaan Alokatif dan Perencanaan Inovatif**
Perencanaan alokatif yaitu berkenaan dengan mensukseskan rencana umum yang disusun pada level yang lebih tinggi dan telah menjadi kesepakatan bersama
Inovatif yakni menciptakan sistem baru atau perubahan yang dapat memberikan hasil akhir yang besar atau lebih baik.
3. **Perencanaan Bertujuan Jamak dan Perencanaan Bertujuan Tunggal**
Perencanaan jamak memiliki beberapa tujuan sekaligus. Sedangkan Perencanaan tunggal yakni sasaran dapat dicapai dengan sesuatu yang dinyatakan dengan tegas dalam perencanaan bersifat tunggal. Contoh: rencana pemerintah membangun 100 unit rumah dilokasi tertentu
4. **Perencanaan Bertujuan Jelas dan Perencanaan Bertujuan Laten**
Perencanaan bertujuan jelas dimana perencanaan dengan menyebutkan tujuan dan sasaran dari perencanaan yang dimana sasarannya dapat di ukur keberhasilannya. Perencanaan bertujuan laten yaitu menyebutkan sasaran dan tujuan secara jelas sehingga sulit dijabarkan. Contoh: insentif pajak tanah untuk petani
5. **Perencanaan Indikatif dan Perencanaan Imperatif**
Indikatif merupakan perencanaan bertujuan yang hendak dicapai hanya dinyatakan dalam bentuk indikasi, artinya tidak dipatok secara tegas.
6. ***Top Down dan Bottom Up Planning***
Top Down Planning apabila alam kewenangan utama dalam hal perencanaan berada pada institusi perencana pada level rendah dan menerima rencana atau arahan yang lebih tinggi (sentralistik). *Bottom up planning* yaitu kewenangan dalam

perencanaan yang berada pada institusi yang lebih rendah, yaitu institusi perencana pada level tinggi yang dimana harus menerima usulan yang telah diajukan oleh institusi perencanaan pada tingkat rendah (desentralistik)

7. *Vertikal Planning dan Horizontal Planning*

Vertical planning merupakan perencanaan yang mengutamakan koordinasi antar berbagai jenjang pada sektor yang sama. Sedangkan *horizontal planning* yakni menekankan keterkaitan antar berbagai sektor sehingga dapat berkembang secara bersinergi

8. Perencanaan yang Melibatkan Masyarakat Secara Langsung dan Perencanaan yang Tidak Melibatkan Masyarakat Secara Langsung

Dalam melibatkan secara langsung yaitu apabila sejak awal masyarakat sudah dikonfirmasi dan dikutkan serta dalam menyusun rencana. Sedangkan tidak melibatkan masyarakat secara langsung yakni suatu perencanaan bersifat teknis pelaksanaan, bersifat internal yang menyangkut dalam bidang yang sempit dan secara tidak langsung terlibat dengan kepentingan orang banyak.

9.5 Contoh Presedent (Studi Kasus)

STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA GUNUNG GALUNGGUNG (Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya)



Gambar 9.1. Potensi Wisata Gunung Galunggung
Sumber: Mukhsin, D. (2014).

Merupakan kawasan memiliki yang objek wisata alami yang sekaligus fungsi lindung yang dapat melindungi terhadap kawasan dibawahnya.

Wisata Gunung Galunggung banyak diminati sebagian wisatawan karena banyaknya potensi wisata yang mendukung untuk menjadi tempat wisata. Salah satu alternatif untuk mengembangkan kegiatan wisata di Gunung Galunggung adalah dengan menerapkan konsep yang berbasiskan mitigasi bencana, karena kawasan wisata yang memiliki potensi bencana gunung api dan sangat menerapkan keseimbangan lingkungan kesejahteraan masyarakat lokal.

Wisata Gunung Galunggung merupakan salah satu kawasan pariwisata andalan, dilihat dari kunjungan wisatawan yang berkunjung, tidak hanya wisatawan lokal tetapi juga wisatawan asing. Dikarenakan terdapat beberapa daya tarik wisata yang ditawarkan yaitu obyek wisata dan daya tarik wanawisata dengan area seluas ±120 hektar di bawah pengelolaan Perum Perhutani. Objek lainnya seluas kurang lebih 3 hektar berupa pemandian air panas (Cipanas) lengkap dengan fasilitas kolam renang, kamar mandi dan bak air panas.

Dalam strategi pengembangan pariwisata Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya, maka hal tersebut dapat diambil keputusan yaitu:

- Wisata yang berada di Kecamatan Sukaratu memiliki potensi yang sangat luar biasa, potensi tersebut diantaranya adalah keindahan kawah, keindahan alam di sekeliling wisata Gunung Galunggung lahan kosong yang berpotensi, terdapat zona konservasi dan lain-lain.
- wisata Gunung Galunggung merupakan kawasan yang strategis dengan lokasinya yang berada di pusat kota, sehingga membuat kawasan tersebut memiliki nilai lebih sehingga potensi nya tidak mengecewakan.
- Faktor eksternal wisata pengelola/pemerintah harus memanjakan para pengunjung kawasan wisata, agar pengunjung tersebut merasa nyaman, aman dan kembali berkunjung.

- Kemudian adanya kondisi fisik yang berada di kawasan wisata Gunung Galunggung cukup berbahaya untuk berwisata, karena gunungnya yang masih aktif sehingga pemerintah harus semakin terdorong agar memberikan kenyamanan untuk wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah, S. 2019. *Teori Perencanaan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- MULJARIJADI, Ir Bagdja; SE, M. E. Ruang Lingkup Perencanaan Wilayah. *MODUL 1: RUANG LINGKUP PERENCANAAN WILAYAH 1.1*.
- Mukhsin, D. 2014. Strategi pengembangan kawasan pariwisata Gunung Galunggung. *Jurnal perencanaan wilayah dan kota*, 14(1).
- Rustiadi, E. et al. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Tomi Setiawan. 4. Perencanaan Wilayah tersedia pada: https://www.academia.edu/8531213/4_Perencanaan_Wilayah
- Kustiwan, Iwan. 2014. *Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota*. In: Pengertian Dasar, Unsur-Unsur, dan Karakteristik Perencanaan, serta Lingkup Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Terbuka, Jakarta, pp. 1-26. ISBN 9789790117563

BAB 10

PROSES PERENCANAAN KOTA

Oleh Syafri

10.1 Umum

Proses pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berlangsung terus menerus dan tidak pernah selesai. Dalam hal ini pengetahuan, inovasi, dan kreativitas dalam setiap tahapan selalu ada proses yang akan selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Proses merupakan suatu bentuk tindakan dinamis yang selalu berkembang dan selalu butuh penyempurnaan, sehingga proses menjadi suatu siklus dan rangkaian kegiatan yang tidak akan pernah berhenti.

Demikian pula hanya dengan perencanaan, juga merupakan suatu kegiatan yang fleksibel dan dinamis sesuai dinamika lingkungan strategis yang berkembang. Perencanaan tidak pernah dan tidak boleh berhenti, tetapi berlangsung terus-menerus dan senantiasa perlu diperbarui. Namun Perkembangan terjadi dipengaruhi oleh perubahan zaman termasuk kebutuhan manusia. Oleh karena itu, perencanaan merupakan proses kontinu dalam pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan (Conyer, 1984). Adapun perencanaan sebagai pemanfaatan alternatif yang mungkin dari sekian banyak alternatif yang ada. (Kusbiantoro, 2000). Perencanaan merupakan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan di masa depan.

10.2 Pengertian Kota

Istilah kota dan perkotaan dibedakan, karena ada dua pengertian yaitu: kota untuk *city* dan daerah perkotaan untuk *urban*. Istilah *city* diidentikkan dengan kota, sedang urban berupa suatu daerah yang memiliki suasana kehidupan dan penghidupan modern, dapat disebut daerah perkotaan. Menurut Bintarto dari segi geografi, kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial-ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis, atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan nonalami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya.

Penggolongan kota dapat didasarkan pada fungsi, struktur mata pencaharian, tipe masyarakat, jumlah penduduknya, besar-kecilnya daerah pemukiman dan sebagainya. Jadi penggolongan kota bisa dilihat dari segi ekonomi, segi sosiologi, segi demografi, dan segi geografis yang abstrak. Penggolongan nonnumerik adalah penggolongan yang mendasarkan diri pada segi ekonomi, segi sosiologi, segi kependudukan, dan sebagainya tergantung tujuan daripada penggolongannya. Penggolongan yang sifatnya nonnumerik adalah penggolongan menurut fungsi, antara lain: kota-kota sebagai pusat produksi perdagangan, pusat pemerintahan, pusat kebudayaan, pusat kesehatan, dan pusat rekreasi.

10.3 Permasalahan Kota

Kegagalan dalam mengelola perluasan wilayah bukan hanya akan memperburuk kesenjangan, namun juga akan mengakibatkan dampak risiko ekonomi dan lingkungan hidup yang lebih besar bagi kota tersebut secara keseluruhan. Dari

Mumbai sampai Mexico City, melihat daerah kumuh yang luas dan padat tumbuh berdampingan dengan gedung bertingkat dengan harga yang tidak terjangkau dan sering kali kosong tak berpenghuni sudah tidakaneh lagi. Masalahnya, ketika jaringan layanan kota tidak dapat mengimbangi pertumbuhan perkotaan, kota-kota dengan sumber daya terbatas justru cenderung mengikuti tren pembangunan bukannya meminta bantuan agen pembangunan untuk merencanakan pertumbuhan secara proaktif.

Beberapa implikasi dari pertumbuhan yang tidak terkelola ini termasuk:

Kesenjangan yang Semakin Besar: Sama halnya dengan Lagos, banyak kota tengah berjuang melawan kesenjangan, penyediaan layanan yang tidak memadai dan kapasitas kota yang tidak lagi memadai. Perluasan wilayah yang tidak terkelola justru semakin memperburuk keadaan ini. Alhasil, keluarga berpenghasilan rendah pindah ke pinggiran kota untuk mencari perumahan yang terjangkau. Walaupun semakin jauh dari pusat kota, kehidupan keluarga berpenghasilan rendah ini justru akan semakin sulit. Keluarga di pinggiran kota harus menghabiskan uang dua kali lebih banyak dan waktu tempuh tiga kali lipat lebih lama menuju kantor, sekolah dan tempat hiburan di pusat kota. Semakin luas kota ini bertumbuh, dinas layanan kota semakin kesulitan menyediakan air, layanan sanitasi dan listrik. Hingga akhirnya penduduk harus bergantung pada layanan informal—seperti truk air pribadi dan pengepul sampah dengan biaya 30 kali lebih mahal dari dinas layanan kota—atau terpaksa hidup tanpa ketiga layanan mendasar tersebut, yang kemudian berdampak terhadap kesehatan serta kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Hanya penduduk berada yang mampu menjangkau biaya layanan yang tinggi tersebut, sehingga banyak penduduk perkotaan hidup tanpa layanan yang memadai. Pola pertumbuhan tanpa pengelolaan yang jelas ini memiliki efek jangka panjang terhadap akses kepada peluang, produktivitas dan kualitas hidup.

Tekanan Ekonomi di Seluruh Kota: Penelitian menunjukkan bahwa jika kota tumbuh secara horizontal, kepadatan populasi akan menurun namun biaya layanan publik meningkat. Pada kota-kota di India dan Afrika, sarana seperti jalan beraspal, drainase dan air leding menurun drastis begitu mencapai 5 kilometer dari pusat kota. Investasi untuk infrastruktur baru dan biaya sosial untuk menutupi defisit ini akan terus meningkat seiring bertambahnya perluasan wilayah perkotaan. Perluasan kota juga turut menambah kemacetan, polusi serta waktu tempuh. Udara kotor, yang sebagian besar disebabkan oleh penggunaan mobil pribadi dan truk secara berlebih, mengakibatkan biaya sosial dan ekonomi membengkak, seperti dampak kesehatan dan kerusakan panen.

Masalah Lingkungan Hidup: Secara global, tingkat pertumbuhan wilayah perkotaan jauh melampaui pertumbuhan populasi. Namun biasanya, hal ini tercapai dengan mengorbankan lahan pertanian utama, ekosistem dan keanekaragaman hayati, yang memengaruhi produksi pangan dan ketahanan iklim. Saat ini, beberapa wilayah perkotaan dengan pertumbuhan paling pesat berada di wilayah pesisir dataran rendah, dataran banjir, titik-titik keanekaragaman hayati dan wilayah dengan tekanan air yang tinggi. Pertumbuhan tidak terkendali pada ekosistem-ekosistem sensitif di atas dapat semakin membebani sumber daya alam dan menyebabkan bencana banjir di sejumlah kota di Asia Selatan saat musim hujan datang. Penggalan sumur tidak resmi di kota-kota seperti Mexico City, Bangalore dan Jakarta, yang tumbuh pesat secara horizontal dengan air leding yang terbatas dan tekanan air yang tinggi, dapat menyebabkan seluruh kota terendam banjir. Khusus di Jakarta, kondisi ini sangat meresahkan. Menurut para ahli, berdasarkan perhitungan kenaikan permukaan air laut, Jakarta hanya memiliki waktu satu dekade untuk menghentikan kondisi ini, sebelum akhirnya jutaan rumah tenggelam.

10.4 Teori-Teori Kota

a. *Central place theory* dari Christaller

Teori ini lahir atas gagasan pertanyaan apakah sebenarnya yang menentukan banyak, luas dan persebaran kota itu. Untuk menjawabnya dikemukakan beberapa konsep diantaranya ialah range dan treshold. Di mana range adalah jarak yang perlu ditempuh orang untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Sedangkan treshold ialah minimum penduduk yang diperlukan untuk kelancaran atau berkesinambungnya suplai barang. Dalam teorinya ini, Christaller juga mengemukakan sejumlah struktur hexagonal, yaitu yang meliputi :

1. *Market optimising principle*, yaitu bahwa struktur dari permukiman kota akan mempengaruhi para konsumen dalam arti, mereka ingin sedekat mungkin dengan setiap level hirarki. Tiap pusat tingkat atas melayani dua pusat tingkat bawah dan dirinya sendiri.
2. *Traffic-optimising principle*, di sini sebenarnya tempat-tempat pusat tidak hanya menyajikan barang dan jasa bagi pribadi. Namun juga mengandung fungsi seperti menyajikan pendidikan, hiburan bagi umum seperti tempat seni, taman, dan perpustakaan. Di sini lebih efisien karena rute yang menghubungkan pusat tingkat atas melalui tempat tingkat bawah.
3. *Administration-optimising principle*, di sini Christaller menunjukkan bahwa pola pemukiman tersusun begitu rupa sehingga setiap tempat bertingkat bawah terdapat di dalam batas wilayah dari tempat pusat tingkat atas.

Selain itu Christaller juga membuat indeks sentralitas yang digunakan untuk menemukan bagaimana cara membandingkan suatu sistem tempat pusat nyata dengan

teori. Sehingga diperoleh suatu ukuran untuk mengklarifikasi kota-kota yang ada dalam berbagai bagian dari tingkat bawah dan atas.

b. Teori Losch

Pada tahun 1954 Losch melalui bukunya berjudul *The economic of location*, mempertegas teori dari Christaller tentang pemetaan kota. Dia juga menggunakan konsep pemetaan penduduk berbentuk heksagonal milik Christaller namun tidak dapat memetakannya secara merata. Dalam konsepnya, Losch tidak hanya memperhatikan pemetaan wilayah masalah kebutuhan dari golongan menengah hingga yang kaya saja, melainkan juga pemetaan pemenuhan kebutuhan untuk wilayah pemukiman miskin. Dalam konsep Losch digambarkan bahwa lokasi perumahan menengah hingga yang kaya berlokasi di samping pemukiman miskin, begitu terus lokasinya hingga diibaratkan membentuk pola heksagonal, di samping pinggiran pemukiman tersebut ditempatkan jalur utama transportasi, adapun semakin ke pinggiran kota maka semakin menyebar jalur utamanya, jaringan seperti itu disebut bentang ekonomi Losch. Meskipun tidak menempatkan faktor kepadatan dan jumlah penduduk, konsep pemetaan kota Losch sebenarnya bertujuan untuk adanya faktor ketergantungan ataupun timbul balik sehingga sedikit demi sedikit perekonomian wilayah marginal tersebut dapat berkembang.

c. Teori Kota Regional

Dalam teori ini luas dan tidaknya pengaruh suatu kota tergantung adanya lima faktor yaitu : 1) faktor historis, 2) faktor lokasi, 3) faktor aksesibilitas, 4) faktor lingkungan fisik, 5) faktor transportasi dan komunikasi.

Faktor historis terkait dengan umur kota serta perjalanan politik, sosial, ekonomi, dari waktu ke waktu. Faktor lokasi sangat menunjang berkembangnya kota, misal kota yang terletak di tepi perairan yang dapat dilayari akan berbeda dengan kota pedalaman. Faktor aksesibilitas menjanjikan terciptanya frekuensi hubungan antar kota maupun dengan wilayah lain yang lebih baik. Hal ini berkaitan dengan makin tingginya aksesibilitas yang dimiliki kota dengan daerah luar makin tinggi mobilitas barang, orang, jasa, dan informasi antara kota yang bersangkutan. Faktor lingkungan fisik sangat terkait dengan aksesibilitas dan ketersediaan ruang untuk perkembangan selanjutnya. Yang terakhir, faktor transportasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kemampuan jangkauan dari pengangkutan barang, orang, jasa dan informasi.

d. Teori Regenerasi

Regenerasi kota merupakan suatu proses atau siklus mulai dari pertumbuhan (*growth*), penurunan (*decline*), perbaikan (*recovery*) dan berlanjut (*sustainable*), demikian kompleksnya proses ini, terutama memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar agar dapat terjadi regenerasi tersebut (Berry Ed, 1993). Memang, perjalanan sejarah kota-kota di dunia tidak terlepas dari kemajuan dan kemunduran, tergantung pada keberadaan elemen-elemen pembentuk dan pemberi arah perkembangan kotanya. Kota yang direncanakan, cenderung lebih berkembang dibanding kota dadakan yang muncul karena suatu kegiatan tertentu, seperti kegiatan pertambangan dan usaha-usaha lain. Sedikit kota yang mempunyai kebudayaan yang tinggi senantiasa dimulai dengan sebuah rencana. Perencanaan kota yang baik merupakan unsur pokok yang bisa menentukan keberlanjutannya. Kemunduran kota-kota dapat disebabkan oleh konflik, jumlah penduduk

merosot, lapangan kerja kurang, habisnya sumber daya yang menjadi andalan di kota tersebut dan perkembangan terhenti.

10.5 Integrasi Kawasan Pertumbuhan Suatu Kota

Kawasan perkotaan di Indonesia tumbuh secara dinamis sejalan dengan dinamika perkembangan demografis, ekonomi dan fisik-spaial. Secara fisik kota tumbuh ekspansif ke arah luar/pinggiran bahkan melampaui batas wilayah administasi Kota. Dikaitkan dengan keterbatasan daya dukung, terutama lahan dan sumber daya air, kebutuhan sarana-prasarana dasar perkotaan yang semakin meningkat menjadi persoalan yang semakin serius untuk ditangani. Ditinjau dari aspek spasial, struktur dan pola pemanfaatan ruang kota/kawasan perkotaan yang terbentuk cenderung bersifat ekspansif dan menunjukkan gejala urban sprawl yang semakin tidak terkendali, mengkonversi lahan-lahan pertanian subur dengan berbagai dampaknya. Hal ini jelas jauh berbeda dengan konsep dan prinsip *compact city* atau pendekatan kompaksi perkotaan (*urban compaction*) yang diyakini di negara-negara maju mencerminkan kota yang berkelanjutan. Namun dalam konteks negara berkembang, debat mengenai pengembangan *compact city* adalah sejauhmana konsep tersebut dapat diterapkan padahal kota-kota di negara berkembang kondisinya jauh berbeda dengan di negara maju, sebagai manifestasi proses urbanisasi dan perkembangan perkotaan yang berbeda pula.

Kajian empirik yang menyangkut relevansi penerapan kompaksi perkotaan di Indonesia dalam kaitannya dengan aspek keberlanjutan perkotan dapat dikatakan belum pernah dilakukan secara khusus. Dalam kondisi seperti itu, perumusan kebijakan yang menyangkut rencana struktur dan pola ruang kota yang sebagian telah mengarah pada penerapan konsep *compact city*, seperti banyak dilakukan dalam perencanaan pembangunan perkotaan, sebenarnya cenderung bersifat spekulatif karena tidak/

belum didukung hasil kajian empirik yang memadai. Dalam hal ini pemahaman terhadap relevansi kompaksi perkotaan untuk diterapkan serta potensi dan kendala penerapannya belum menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan perencanaan tata ruang kota.

Dalam konteks di atas, yang menjadi persoalan dalam pekerjaan ini adalah belum adanya kajian empirik tentang kompaksi perkotaan sebagai struktur dan pola ruang kawasan perkotaan berkelanjutan yang didasarkan pada keterkaitan antara bentuk perkotaan (*urban form*) dengan keberlanjutannya secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Secara konseptual, kompaksi perkotaan (*urban compaction*) merupakan alternatif atau strategi untuk mewujudkan stuktur dan pola ruang kawasan perkotaan yang berkelanjutan. Penerapannya dalam konteks pertumbuhan fisik/ kawasan terbangun saat ini di berbagai kota besar atau Kawasan Pertumbuhan Perkotaan yang cenderung ekspansif dengan pola *sprawl* yang tidak terkendali, mempunyai potensi untuk mengurangi *ecological footprint*, terutama yang disebabkan oleh segregasi spasial berbagai aktivitas perkotaan dan implikasinya terhadap kebutuhan transportasi.

10.6 Tahapan dalam Perencanaan Kota

Patton dan Sawicki (1968) memandang persoalan agar senantiasa dibahas lebih perinci melalui verifikasi, redefinisi, dan perincian persoalan. Mereka memandang perlunya perincian dalam mengembangkan setiap tahapan perencanaan. Mereka juga menekankan perlunya pengembangan kriteria evaluasi sebelum rencana diimplementasikan. Perencanaan secara umum dapat diartikan sebagai aktivitas pemecahan masalah berbasis pencapaian tujuan. Tahapan umum dalam proses perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Identifikasi Persoalan

Persoalan perencanaan wilayah dan kota dapat berupa permasalahan dan atau potensi pengembangan suatu daerah. Dalam konteks perencanaan wilayah dan kota, pengertian daerah merujuk pada kawasan kota, bagian dari kota dan wilayah yang lebih luas (kabupaten, provinsi, pulau, nasional) serta kawasan yang bersifat lintas wilayah. Baik permasalahan maupun potensi pengembangan suatu daerah perlu dicarikan solusi dan disusun rencananya. Dengan demikian perencanaan dapat mengandung sekaligus unsur mengatasi permasalahan dan mengembangkan potensi atau peluang. Dalam perumusan isu, proses perencanaan harus mampu mengidentifikasi, tidak hanya kondisi dan permasalahan eksisting, tetapi juga bagaimana permasalahan di masa depan. Isu yang dirumuskan harus sedapat mungkin mempertimbangkan kebijakan yang ada sesuai dengan tingkatannya.

2. Perumusan Tujuan, Sasaran, Alternatif Solusi, dan Solusi Terpilih

Tujuan (*goals*) adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang ingin di capai dalam jangka waktu tertentu. Perumusan tujuan terkait dengan persoalan yang telah teridentifikasi pada tahap awal. Tujuan masih bersifat umum, yaitu berhubungan dengan upaya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan dan atau mengembangkan potensi. Sasaran (*objectives*) adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Solusi disusun berdasarkan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, bisa ditempuh melalui beberapa pilihan atau alternatif solusi. Masing-masing solusi memiliki kelemahan, kelebihan, kemudahan, dan kesulitan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, diperlukan pemilihan solusi yang terbaik, yaitu solusi yang telah mempertimbangkan berbagai hal sehingga

akan realistis untuk dilaksanakan. Solusi terpilih akan menuntun langkah-langkah berikutnya. Solusi perubahan parsial akan berbeda dengan solusi perubahan total dalam hal data yang dibutuhkan, analisis dan sintesis serta, rencana dan program yang disusun

3. Pengumpulan dan Interpretasi Data

Kedalaman data dan jenis-jenis data serta hal yang menunjangnya dipengaruhi oleh tujuan, sasaran, dan solusi yang terpilih; data yang tersedia; biaya tenaga, waktu, dan uang; serta sumber daya lainnya yang tersedia untuk mengumpulkan data.

4. Analisis dan Sintesis

Analisis dimaknai sebagai kegiatan berpikir yang melakukan perincian objek perencanaan dalam komponen-komponennya agar dapat menangkap makna yang dikandungnya. Adapun sintesis merupakan kegiatan berpikir yang melakukan penggabungan atau pengombinasian hasil analisis komponen-komponen untuk memperoleh pemahaman secara utuh/sistem. Dengan demikian, analisis dan sintesis merupakan kegiatan yang saling melengkapi sebagai dasar untuk menyusun konsep rencana.

5. Penyusunan Program-program untuk Implementasi Rencana

Program ruang dalam rencana akan menjadi perhatian masyarakat dan praktisi, termasuk pula pemerintah. Apabila rencana telah menggabungkan pertimbangan dari bidang-bidang ilmu yang lain, program-program sebagai implementasi dari rencana harus mampu dimengerti oleh berbagai pihak. Untuk itu, perencana harus mengembangkan informasi yang didasarkan pada lima lingkup topik di bawah ini.

6. Evaluasi Dampak Potensial Rencana-Rencana dan Implementasi Program serta Modifikasi Rencana

Substansi perencanaan dan program implementasi perlu mencakup analisis:

- a) Dampak lingkungan yang mungkin terjadi,
- b) Dampak potensial ekonomi lokal,
- c) Dampak potensial anggaran pemerintah daerah,
- d) Konsekuensi sosial yang mungkin terjadi.

7. Mengulas dan Mengadaptasi Rencana

Dokumen perencanaan beserta seluruh komponennya diadopsi sebagai suatu keputusan pemerintah dan sebagai komitmen untuk tindakan di masa yang akan datang. Langkah ini biasanya diikuti dengan sosialisasi kepada masyarakat. Hal yang penting adalah substansi dari rencana harus dimengerti berbagai pihak, terutama pemerintah yang mengadopsi rencana ini dan kemudian mungkin diterjemahkan dalam peraturan-peraturan yang lebih sederhana. Pemerintah berikut pegawai yang terkait dengan perencanaan harus mengerti maksud dari rencana ini karena akan berdampak pada pembangunan ke depan dan tentunya hajat hidup orang banyak

8. Mengulas dan Mengadaptasi Implementasi Program

Rencana pada gilirannya perlu dipahami oleh seluruh pihak yang akan mengadopsi perencanaan. Dalam eberjalanannya, sosialisasi terhadap masyarakat diperlukan agar memberikan pemahaman dan wawasan bagi masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah.

9. Pengelolaan Implementasi Program

Implementasi rencana berupa pelaksanaan program-program pembangunan akan dirasakan dan perlu diamati oleh seluruh masyarakat walaupun masyarakat tersebut tidak mengetahui ataupun tidak memahami rencana yang telah disusun. Hasil tanggapan

balik dari masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait diperlukan untuk dapat melakukan perbaikan dan tindakan cepat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan yang dimaksud adalah (1) partisipasi publik perlu diakomodasi dalam beberapa tahap, tetapi dampaknya dapat memengaruhi keseluruhan tahapan dalam proses perencanaan; (2) beberapa tahapan dalam proses perencanaan dapat dilakukan secara beriringan, sedangkan yang lain perlu dilakukan secara berurutan; (3) dalam setiap tahapan proses perencanaan perlu selalu dilakukan pengkajian ulang. Apabila salah satu tahap telah selesai, perlu dilihat kembali tahap sebelumnya dan kembali direvisi.

10.7 Membangun *Smart City*

Smart City merupakan bagian dari implementasi *Internet of things (IoT)*. Objek dari program *Smart City* adalah masyarakat, pemerintah, dan infrastruktur kota. Intinya, *Smart City* bertujuan untuk mengintegrasikan informasi dari ketiga objek di atas untuk pelayanan yang efisien. Lalu, bagaimana cara mengintegrasikan masyarakat, pemerintahan dan infrastruktur kota? Salah satu caranya yaitu membuat aplikasi. Memiliki banyak aplikasi bukanlah satu-satunya indikator *Smart City*, tetapi bisa sebagai acuan pengembangan kota menuju *Smart City*.

Menurut Supangkat (2018), *Smart City* adalah ota yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya Prof. Suhono Harso Supangkat. Selanjutnya dijelaskan ciri-ciri penting kota Cerdas adalah kota dapat mengelola berbagai sumber dayanya

secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Setiap kota memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Untuk mengaplikasikan *Smart City* di Indonesia tidaklah mudah.

Untuk tercapainya program *Smart City* di Indonesia, ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya. Menurut Beesmartcity, perusahaan penyedia solusi perkotaan asal Jerman menyebutkan bahwa ada enam indikator *Smart City*.

Indikator yang pertama adalah ***Smart Economy***. Mendorong berkembangnya ekonomi melalui industri kreatif pada bidang digital, merupakan contoh dari pengembangan *Smart Economy*. Dengan memanfaatkan teknologi digital, banyak peluang usaha baru yang muncul dan tak jarang yang menghasilkan solusi efektif untuk suatu masalah perkotaan. Yang kedua adalah ***Smart Environment***. *Waste management, water management*, dan energi alternatif yang ramah lingkungan menjadi objek untuk dikembangkan. ***Smart Government*** menjadi indikator *Smart City* yang ketiga. Sebagai salah satu agen terpenting *Smart City*, pemerintah harus dapat memfasilitasi perubahan, dan perkembangan social dengan baik. ***Smart living*** yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator selanjutnya. Memberikan fasilitas berupa informasi tentang kesehatan, mengembangkan kurikulum melek digital, dan membangun fasilitas ramah difabel merupakan beberapa cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. ***Smart Mobility*** berfokus pada peningkatan kualitas transportasi bagi masyarakat urban. ***Smart People***, semua indikator kuncinya yaitu pada kualitas masyarakat dan pemerintahnya. Tanpa ada kerjasama dari kedua pihak, mustahil *Smart City* di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Dalam hal ini, setiap indikator tidak bisa

berjalan sendiri. Masing-masing dari indikator tersebut memiliki peran masing-masing dan saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Dari mana kita harus memulai membangun *Smart City* di Indonesia setelah tahu 6 indikatornya? Mulailah dari sumber daya manusia. Sebelum memulai program *Smart City*, pastikan pemerintah dan masyarakat siap untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Membangun sumber daya manusia yang siap guna untuk membangun *Smart City* memang tidak sebentar. Namun, berkat kemajuan teknologi, bukanlah tidak mungkin pembekalan masyarakat dan pemerintah mengenai *Smart City* menjadi lebih cepat. Misalnya, sosialisasikan kemungkinan-kemungkinan kondisi masa depan suatu kota. Selain itu, sumber daya manusia ini pula sebagai kunci dari *research and development* dalam pengembangan *Smart City* di Indonesia. Yang perlu diketahui, *Smart City* bukan lah kota sekali bangun, namun akan selalu terjadi perubahan mengikuti kemajuan teknologi dan lingkungan. Setelah sumber daya manusia siap dengan program *Smart City*, lakukan studi penelitian dan pengembangan. Studi penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menganalisis masalah dan pokok masalah dalam perkotaan.

10.8 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota

Penyelarasan, sinkronisasi program-program antar sektoral ini tentunya harus mampu mengutamakan kepentingan keberlanjutan lingkungan agar tetap lestari, sehingga di dalam melakukan sinkronisasi tersebut tentunya setiap sektor harus menyadari dan memiliki keikhlasan bahwa tidak semua program yang dilakukan dapat dilakukan apabila hal tersebut bertentangan dengan tujuan pengaturan tata ruang (Imran 2013). Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan atau adanya rencana, agar

pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Dengan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, maka dapat diidentifikasi sekaligus dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang.

Rencana pemanfaatan ruang sebagai bagian dari rencana kota menjadi alat pengendali pembangunan fisik kota. Dalam implementasinya, terdapat dua cara interpretasi rencana pemanfaatan ruang kota, yaitu: 1) Cara "eksklusif", yaitu misal bila zona diperuntukkan untuk permukiman maka permohonan peruntukan yang lain untuk suatu lokasi di zona tersebut akan ditolak (usulan peruntukan yang berbeda dengan yang telah direncanakan tidak diperbolehkan sama sekali). 2) Cara "dominasi", yaitu misal bila zona diperuntukkan untuk permukiman maka bila ada permohonan peruntukan lain maka akan dilihat apakah peruntukan lain tersebut mendominasi zona tersebut atau tidak. Bila tidak mendominasi atau dengan kata lain dominasi guna lahan masih sesuai dengan rencana, maka usulan peruntukan yang berbeda tersebut masih akan dikabulkan. Pada prakteknya, dua cara tersebut dipandang tidak memuaskan.

Permasalahan lain menyangkut pengendalian guna lahan perkotaan berkaitan dengan bangunan temporer. Di negara tropis, penduduk golongan berpenghasilan tingkat bawah dapat saja memulai bangunan rumahnya dengan wujud bangunan temporer (bahan bambu, ijuk, lantai tanah, dan sebagainya). Bangunan seperti ini, pada praktek umumnya, lepas dari pengawasan IMB.

10.9 Penutup

Proses diartikan sebagai suatu tata urutan kerja yang didasari oleh fakta yang ditunjang oleh kemampuan, kemungkinan, dan kendala untuk menghasilkan suatu sintesis berupa konsep, pertimbangan, pilihan, keputusan, atau rencana. Secara sederhana, proses dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berurutan dan berkaitan satu sama lain atau saling

menunjang. Proses merupakan suatu siklus dan rangkaian kegiatan yang tidak akan pernah berhenti. Proses merupakan suatu bentuk tindakan dinamis yang selalu berkembang dan selalu butuh penyempurnaan. Sedangkan perencanaan adalah proses kontinu dalam pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan.

Perencanaan kota dilakukan sebagai suatu produk pembangunan sehingga proses tata ruang kota dilakukan secara terpadu. Sedangkan perencanaan tata ruang kota terpadu meliputi perencanaan fisik, perencanaan spasial, kemitraan, dan kelengkapan sumber daya. Selain itu, perencanaan perkotaan dilandasi pada pemenuhan kepentingan masyarakat. Perencanaan kota termasuk pengorganisasian, atau memengaruhi, distribusi penggunaan tanah dalam wilayah yang telah dibuat atau dimaksudkan untuk dibuat. Perencanaan perkotaan dilakukan sebagai suatu produk pembangunan sehingga proses tata ruang kota dilakukan secara terpadu.

Dengan demikian, proses perencanaan dapat dimaknai sebagai suatu rangkaian kegiatan berpikir yang berkesinambungan dan rasional untuk memecahkan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu di masa depan secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Berry, Jim Ed. 1993. *Urban Regeneration, Property, Investment and Development*, University of Ulster Jordanstown, 1993.
- Catanese, Anthony J dan James C. Snyder, 1996. *Perencanaan Kota Edisi Terjemahan*. Erlangga.
- Conyers, Diana. 1984. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Gallion B, Arthur and Simon Eisner, 1994. *Pengantar Perancangan Kota, Desain dan Perencanaan Kota, Jilid 1*). Erlangga Jakarta.
- Hudalah. 2010. "*Perencanaan sebagai Suatu Proses*." Presentasi Mata Kuliah Studio Proses Perencanaan. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung.
- Imran, SY. 2013. *Fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup*. 'Jurnal Dinamika Hukum', Volume 13 Nomor 3.
- Kusbiantoro, BS, dkk. 2005. *Kumpulan Materi Kuliah Perencanaan Transportasi*. Departemen Teknik Planologi ITB.
- Patton C. dan, Sawicki, D. 1986. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New Jersey: Prentice Hall (Eaglewood Cliff).
- Supangkat, Suhono Harso. 2018. *Seminar Smart People, Smart School, And Smart city: Mempersiapkan Generasi Cerdas Di Era Digital Sekolah*.

BAB 11

MANFAAT DALAM PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Oleh Nunik Hasriyanti

11.1 Pendahuluan

Perencanaan merupakan pengetahuan dalam menganalisis kondisi yang terjadi saat ini, lalu melakukan peramalan (rencana) untuk perkembangan berbagai faktor keruangan yg relevan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor pembatas, penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya menentukan langkah-langkah sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Selain itu penetapan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilakukan sehingga tercapai tujuan dan sasaran perencanaan tersebut. Perencanaan kota menjadi penting untuk mewujudkan ruang kota dalam penataan ruang yang memberikan keamanan, kenyamanan, memberikan kesempatan produktifitas dan konsep berkelanjutan bagi penduduknya.

11.2 Tujuan Perencanaan Wilayah dan Kota

Dalam sebuah perencanaan wilayah dan kota, yang merupakan kegiatan merumuskan serta memberikan pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan nyata dalam penataan ruang. Tujuan perencanaan wilayah yaitu dengan menciptakan kehidupan yang lebih efisien, lebih nyaman dan memberikan kelestarian sehingga menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik dari pihak pemerintah ataupun dari pihak swasta.

11.2.1 Sifat Perencanaan Wilayah dan Kota

Perencanaan wilayah dan kota menjadi penting karena beberapa faktor pembangkitnya. Faktor utama adalah banyaknya wilayah dan kota yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi terbatas untuk diperbaharui dan ditingkatkan pola ruangnya. Bisa jadi ada beberapa wilayah dan kota yang masih bisa dikembangkan namun hal ini memerlukan waktu yang cukup lama dan dengan pertimbangan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, walaupun potensi yang dimiliki menyangkut aset luas wilayah dan kota, sarana prasana yang memadai, luas hutan, potensi pertambangan yang tinggi, luas jalur hijau memungkinkan untuk direncanakan pemanfaatan ruangnya. Namun kendala di lapangan terkait berkurangnya nilai potensi tersebut dan kendala alam lainnya seperti tanah longsor, permukaan tanah yang tertimpa erosi menyebabkan perencanaan ruang wilayah dan kota menjadi terhambat. Berikut faktor-faktor yang menjadikan perencanaan wilayah dan kota itu penting, yaitu (Tarigan, 2005):

1. Banyak diantara potensi wilayah yang terbatas untuk dikembangkan, diperbanyak dan diperbaharui karena alasan menyangkut luas kawasan, bahan tambang yang terkuras, luas hutan penyangga yang mengecil, jalur hijau yang menciut.
2. Teknologi yang berkembang cepat menyebabkan lahan puluhan hektar dapat mengalami perubahan dalam waktu satu hari hanya karena alasan teknologi. Sehingga perlu adanya perencanaan supaya adanya perubahan bisa dikendalikan dengan cepat untuk mengantisipasi pengembalian pada kondisi semula dan menghindari kesalahan seminimal mungkin.
3. Dalam perencanaan yang terjadi di lapangan sudah tidak bisa diperbaiki dan diubah kembali, karena adanya penggunaan lahan yang tidak terencana dengan baik dan tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan. Saat ini

banyak terjadi adanya pemanfaatan lahan oleh masyarakat diatas bantaran sungai, membangun rumah pada jalur hijau dan pinggir rel kereta api, membangun warung-warung diatas parit yang membuat dampak negatif dalam penggunaan lahan. Ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan akan lahan dan tempat tinggal, sedangkan keterbatasan dan mahalnya harga lahan menjadi faktor penyebab hal tersebut terjadi.

4. Banyak konflik kepentingan yang terjadi dalam praktek di lapangan, dimana keterbatasan lahan yang ada tidak sebanding dengan permintaan penggunaan lahan yang semakin meningkat. Selain itu tingginya harga hunian dan lahan dipusat kota, menyebabkan terjadinya pengembangan perencanaan wilayah dan kota merembes ke daerah pinggiran sehingga menyebabkan *urban sprawl*. Akibatnya pusat kota menjadi sepi pada malam hari, karena banyak commuter yang melakukan perjalanan dari hunian pinggiran untuk memudahkan mereka mencari lahan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada.
5. Tatanan wilayah dan kota menjadi gambaran kepribadian dari masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Bagi masyarakat yang tidak disiplin dan tidak mematuhi aturan yang ada, maka masyarakat seperti ini cenderung untuk menjadikan wilayah dan kotanya juga tidak teratur dan tertata dengan rapi. Namun kebalikannya jika wilayah dan kota yang tidak tertata akan membuat masyarakatnya juga menjadi tidak disiplin.
6. Kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan aset yang harusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam jangka panjang dan memberikan keberlanjutan di masa depan. Dalam hal aset ini tentunya harus dimanfaatkan dan direncanakan secara matang dan komprehensif sehingga hasilnya dapat

memberikan arahan lebih cermat terhadap penggunaan lahan secara keseluruhan. Dan ini bisa menjadi panduan dalam melakukan pembangunan ke depannya.

11.2.2 Tujuan Perencanaan Wilayah dan Kota

Dalam perencanaan wilayah dan kota, dibuat dengan maksud dan tujuan untuk melakukan penataan ruang yang ada di sebuah area. Direncanakan dan dirancang menjadi lebih baik sehingga fungsi dan pemanfaatan lahannya menjadi bernilai guna. Menurut Tarigan, 2005 tujuan perencanaan wilayah dan kota adalah sebagai berikut :

1. Wilayah dan kota yang direncanakan bisa menggambarkan proyeksi kedepan terhadap berbagai aktivitas yang ada baik itu kegiatan ekonomi masyarakat dan penggunaan lahan yang dapat dimanfaatkan di masa mendatang. Sehingga sejak awal sudah harus ada persiapan lokasi yang akan difungsikan dan dibangun untuk menghindari dampak negatif penggunaan lahan yang salah penempatannya. Dan diharapkan menimbulkan dampak positif bagi penggunaan dan pemanfaatan lahan yang sudah direncanakan.
2. Perencanaan dibuat untuk memandu para pelaku ekonomi wilayah dan kota dalam memilih kegiatan yang bisa dikembangkan dan diijinkan untuk disediakan dimasa mendatang.
3. Perencanaan wilayah dan kota diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan dan mengawasi arah perkembangan dan pertumbuhan ekonomi kota dan arah penggunaan lahan kota ke depannya.
4. Perencanaan bertujuan sebagai dasar untuk rencana-rencana ruang yang lebih detil dalam perencanaan sarana prasarana dan perencanaan sektoral.

5. Lokasi pada kawasan perencanaan wilayah dan kota dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan dan menetapkan kegiatan tertentu pada suatu lokasi. Lokasi yang terpilih haruslah memberikan manfaat dan nilai tambah bagi efisiensi spasial ruang kawasan, keselarasan antar sektor, mengoptimalkan investasi, terciptanya efisiensi pemanfaatan ruang, dan menjamin keserasian lingkungan.

11.3 Manfaat Perencanaan Wilayah dan Kota

Pemanfaatan perencanaan wilayah dan kota akan memberikan gambaran proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut di masa yang akan datang, membantu atau memandu para pelaku ekonomi utk memilih kegiatan-kegiatan yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan di mana lokasi kegiatan seperti itu masih diijinkan, sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan (Riyadi, 2020). Selain itu sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, lokasi itu sendiri dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, penetapan kegiatan.

Manfaat Perencanaan Wilayah dalam berbagai kegiatan dan penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat.

Berikut ini beberapa manfaat lain dari perencanaan wilayah dan kota:

1. Perencanaan wilayah harus mampu mendeskripsikan proyeksi dari kegiatan ekonomi dan tata guna lahan di wilayah tersebut di masa depan. Dengan begitu sejak awal telah terlihat arah lokasi yang dipersiapkan untuk dibangun dan akan dijadikan sebagai wilayah penyangga. Selain itu dapat dihindari pemanfaatan lahan yang tidak tepat misal kawasan lindung, konservasi atau cagar

alam. Hal ini berarti sejak awal dapat diantisipasi dampak positif dan negatif dari perubahan tata guna lahan yang akan timbul di kemudian hari dan dapat dipikirkan langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif.

2. Dapat membantu atau memadu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan dimana lokasi ekonomi tersebut masih diizinkan. Hal ini dapat mempercepat proses pembangunan karena investor mendapat kepastian hukum tentang lokasi unit usahanya dan menjamin keteraturan dan menjauhkan dari benturan kepentingan.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengendalikan dan mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah tata guna lahan.
4. Sebagai landasan bagi rencana-rencana strategis lain yang lebih sempit tapi lebih detail misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana umum. Lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan, penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat. Penetapan lokasi harus menjamin terwujudnya keserasian spasial, keselarasan antarsektor, optimalisasi investor, terciptanya efisiensi kehidupan dan menjamin kelestarian lingkungan. Pada dasarnya perencanaan wilayah dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan namun adakalanya menetapkan pilihan lokasi seringkali tidak mudah karena selain masalah klasik seperti biaya juga sering terdapat kepentingan lain yang sulit dikonversi dalam bentuk uang seperti adat istiadat, sejarah, warisan budaya dan lingkungan.

Perencanaan wilayah dan kota memiliki peran dan manfaat dalam hal mengontrol dan mengendalikan laju pertumbuhan ruang dan penggunaan lahan. Sehingga terjadi keseimbangan ekosistem ruang dan tata ruang yang menjamin zonasi lebih baik dalam pengaturannya. Terlebih lagi saat ini dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, teknologi penginderaan jarak jauh dapat lebih akurat memberikan data dan informasi mengenai data ruang secara dua dimensional dan tiga dimensional. Salah satu masalah penting dalam pembangunan wilayah dan kota adalah keberadaan ahli ekonomi ruang kota dalam pemerataan pemanfaatan dan penggunaan lahan. Dengan data citra satelit dan foto udara mempermudah dalam perencanaan ruang untuk menganalisis kondisi pelaksanaan pembangunan wilayah dan kota dari aspek fisik, sosial, ekonomi dan aspek lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Riyadi, Sutaryono. Widiyantoro. 2020. *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah*. Yogyakarta: STPN Press.

BIODATA PENULIS



Dr. Ir. Gito Sugiyanto, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.,

Dosen di Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Dr. Ir. Gito Sugiyanto, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., lahir di Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 1980. Saat ini sebagai Dosen Tetap dengan jabatan fungsional Lektor Kepala (*Associate Professor*) di Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Gito Sugiyanto memperoleh gelar Doktor (Dr.) Ilmu Teknik Sipil bidang konsentrasi Rekayasa Transportasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2011. Gelar Magister Teknik (M.T.) pada bidang Ilmu Teknik Sipil konsentrasi Transportasi diperoleh dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2007. Gelar Sarjana Teknik (S.T.) bidang Teknik Sipil diperoleh dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada tahun 2002. Gelar Insinyur (Ir.) diperoleh dari Program Studi Program Profesi Insinyur (PPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020.

Dr. Ir. Gito Sugiyanto, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., telah melakukan beberapa penelitian dengan sumber dana dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)-Kemenkeu, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan topik transportasi udara dan transportasi darat. Hasil penelitian telah dipublikasikan pada berbagai jurnal internasional, konferensi internasional, dan hak cipta. Jumlah artikel yang terindeks Scopus sebanyak 22 artikel dengan $H\text{-Index Scopus} = 10$ dan 17 (tujuh belas) buah karya hak cipta. Minat penelitian utamanya adalah bidang rekayasa lalu lintas, ekonomi transportasi, *pricing*, keselamatan lalu lintas, dan transportasi udara. Gito Sugiyanto adalah anggota dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Masyarakat Perkeretaapian Indonesia (MasKA) dan juga tergabung sebagai pengurus MTI Jawa Tengah dan Komite Ilmiah dalam Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi (FSTPT). E-mail: gito.sugiyanto@unsoed.ac.id.

BIODATA PENULIS



Ramses Victor Elim, S.Si., M.Si

Dosen Program Studi Manajemen Sumber Daya Hutan
Jurusan Kehutanan

Penulis lahir di Kupang tanggal 28 Juli 1977. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Sumber Daya Hutan, Jurusan Kehutanan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Biologi Satya Wacana dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Lingkungan Undana. Penulis menekuni bidang menulis tentang Biologi dan Masalah Lingkungan.

BIODATA PENULIS



Yunus Arifien

Dosen di Universitas Nusa Bangsa

Penulis bernama : Yunus Arifien, dilahirkan di Surakarta, 4 November 1961. Pendidikan S1 Institut Pertanian Bogor, Jurusan Ilmu Tanah (Konservasi Tanah) tahun 1984, S2 Institut Pertanian Bogor Program Studi Tanah (Evaluasi Lahan) tahun 1994 dan S3 Institut Pertanian Bogor Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) tahun 2012. Sejak tahun 1987 mengajar di Universitas Nusa Bangsa mata kuliah Statistik, Kesuburan Tanah, dan Perencanaan Wilayah dan Perdesaan. Penulis juga sebagai tenaga ahli di beberapa konsultan dan Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, serta Badan Restorasi Gambut dll. Beberapa buku yang ditulis antara lain Buku Peran landreform dalam pembangunan pertanian, Buku Potensi dan Manajemen Sumberdaya Lahan Sawah, Buku Pertanian, Kehutanan dan Kemakmuran Petani, Buku Pengantar Ilmu Pertanian, Buku Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Buku Paradigma Agribisnis serta buku Pertanian Urban.

BIODATA PENULIS



Dr. E. Suharno, S.E., M.Si.

Dosen Program Studi Magister Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

Penulis saat ini aktif dalam Konsultan penelitian dengan kepakaran Resources & Regional Economics. Buku ini semoga bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan mahasiswa.

BIODATA PENULIS



Retna Kristiana, S.T., M.M., M.T.

Dosen Program Studi Teknik Sipil
Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana

Penulis salah satu dosen program studi teknik sipil di Universitas Mercu Buana. Ia menyelesaikan Pendidikan sarjana program studi teknik sipil di Universitas Mercu Buana tahun 2003. Program Magister Manajemen diselesaikannya di Universitas Budi Luhur tahun 2012. Sementara itu, Program Magister Teknik pada program studi teknik sipil dengan perminatan bidang manajemen konstruksi diselesaikannya di Universitas Indonesia tahun 2016. Penulis sudah menulis beberapa artikel ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional.

BIODATA PENULIS



Fathan Mubina Dewadi

Dosen Universitas Buana Perjuangan Karawang

Fathan Mubina Dewadi merupakan pria yang berusia 30 tahun sudah tertarik dengan bidang Pendidikan tinggi sejak tahun 2015. Sejak lulus jurusan Teknik mesin program pascasarjana Universitas Pancasila. Kini penulis sedang bekerja sebagai dosen tetap program studi Teknik mesin di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kini kesibukan penulis ialah lebih menghabiskan waktu mengajar menulis. Karya-karya yang telah dibuat dimuat di media *online*, jurnal nasional, jurnal internasional dan jurnal nasional bereputasi. Sudah lebih dari 50 karya yang telah dibuat dan sedang proses untuk pembuatan buku dan bab buku.

BIODATA PENULIS



Lisa Astria Milasari, S.T., M.T.

Dosen Program Studi Arsitektur

Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Penulis lahir di Samarinda tanggal 5 Februari 1985. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Planologi, ITN Malang dan melanjutkan S2 pada Magister Teknik Sipil Minat Kekhususan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Brawijaya. Penulis menekuni bidang penjaminan dan audit mutu. Aktif melakukan penelitian pada bidang perencanaan wilayah dan kota, yang salah satunya berhasil didanai oleh Ristekdikti pada tahun 2022. Adapun karya buku yang telah ditulisnya sejak tahun 2020, diantaranya berjudul Ilmu Kealamiah Dasar, Statistik Ekonomi, Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2022-2026, Buku Saku Pedoman Auditor SPMPT-AMI, Monograf Efektivitas Fungsi Taman Kota dan buku referensi lainnya.

BIODATA PENULIS



Fauziah Lestari Akri, S.Tr., Ars.

Alumni Program Studi Desain Kawasan Binaan
Fakultas Arsitektur Politeknik Negeri Pontianak

Penulis lahir di Pontianak tanggal 10 Oktober 1999. Penulis adalah alumni dari Program Studi Desain Kawasan Binaan Fakultas Arsitektur, Politeknik Negeri Pontianak. Menyelesaikan pendidikan D4 pada Jurusan Arsitektur.

Pengalaman selama kuliah mengikuti kegiatan penelitian dosen mulai tahun 2020 penelitian tentang kawasan pesisir, mitigasi, wisata dan dijadikan sebagai lokus tugas akhir, setelah lulus kuliah masih mengikuti kegiatan penelitian dosen hingga sekarang yaitu kegiatan MFV tahun 2022, berjudul "hilirasi produk UKM abon ikan, belacan dan madu kelulut di Desa Sebus sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat pada kawasan konservasi".

BIODATA PENULIS



Dr. Syafri, ST., M.Si

Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Bosowa

Penulis lahir di Cakke 05 Juli 1968. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik, Universitas Bosowa. Menyelesaikan pendidikan SD, SMP dan SMA di Cakke Kabupaten Enrekang. Selanjutnya mengikuti pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Planologi/Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas 45 Makassar (1995), Pendidikan S2 Program Studi Teknologi Lingkungan di Universitas Hasanuddin Makassar (2005), dan pendidikan S3 program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) di Universitas Negeri Makassar (2016).

Selain itu, penulis pernah mengikuti pendidikan informal antara lain: Kursus Penataan Ruang dan Pembangunan yang Dinamis, Kursus Amdal, Kursus Penataan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kursus Peraturan Zonasi (*Zoning Regulation*), Kursus *Human Resources Development and Regional Planning*, Kursus Pembangunan Perumahan Bertumpu pada Masyarakat, Kursus Penataan Ruang Berbasis GIS.

BIODATA PENULIS



Nunik Hasriyanti, ST., MT.

Dosen Program Studi Rancang Kota (DKB)
Politeknik Negeri Pontianak

Penulis lahir di Pontianak tanggal 23 Mei 1976. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Desain Kawasan Binaan Jurusan Teknik Arsitektur, Politeknik Negeri Pontianak. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Islam Indonesai dan melanjutkan S2 pada Jurusan Rancang Kota ITB. Pengalaman dan karya di bidang penelitian dan pengabdian sudah banyak dilakukan oleh penulis terutama yang berkaitan dengan bidang arsitektur dan perancangan kota / kawasan sejak tahun 2007. Riset yang diperoleh merupakan riset dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan LPDP. Riset yang dilakukan 5 tahun terakhir adalah Rancang Kawasan Konservasi Pesisir Randayan sebagai Desa Wisata Bahari yang Digitalized berbasis Ekonomi Kreatif dengan SIG-GIS di Desa Pulau Lemukutan (LPDP, 2022), Studi Pola Arah Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Akibat Kenaikan Muka Air Laut Pada Kawasan Pesisir Kalimantan Barat (Simlitabmas Ristek BRIN, 2019-2021), Rancang Bangun Spasial Koridor WPU Ambawang Yang Berkelanjutan Menuju Pembangunan Kota Ekologis (Simlitabmas

Ristek BRIN, 2018-2019), Perancangan Pengelolaan Air Pada Permukiman Tepian Sungai Kapuas Pontianak Dengan Pendekatan Konsep Water Sensitive Urban Design (Simlitabmas Ristek BRIN, 2017-2018), Rancang Bangun Pemekaran Fisik Kota Pada Koridor Ambawang Dengan Metode AHP (Simlitabmas Ristek BRIN, 2016-2017). Selain itu beberapa judul buku sudah dihasilkan oleh penulis yaitu Ekowisata Sungai Kapuas (2014), Telaah Arsitektur Berlanggam Melayu pada Rumah Tradisional Melayu di Koridor Sungai Kapuas (2008), Citra Arsitektur dan Elemen Estetika Bentuk Rumah Tradisional Melayu di Tepian Sungai Kapuas Pontianak (2008). Analysis Disaster Vulnerability Capacity in Mempawah Hilir Subdistricts (2019). Jurnal dan artikel ilmiah juga sudah banyak ditulis, bisa dilihat dalam googlescholar Nunik Hasriyanti (<https://scholar.google.com/citations?user=uGGSONYAAAAJ&hl=en&oi=ao>). Email untuk koreksi : nayla_koe@yahoo.com atau nunikhasriyanti@polnep.ac.id